



BUKU AJAR

SEJARAH AFRIKA

Tinjauan Historis Kehidupan Penduduk Afrika
dari Pra Sejarah hingga Pasca Perang Dingin
dan Munculnya Negara-Negara Merdeka
hingga Abad 20



PENULIS:

Bahtiar Afwan, S.Pd., M.Pd.
Dr. Sumargono, S.Pd., M.Pd.

PENERBIT
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Buku Ajar : Sejarah Afrika
Mata Kuliah : Sejarah Afrika
Kode Mata Kuliah/sks : SEJ625104/2 sks

Identitas Penulis

a. Nama Lengkap : Bahtiar Afwan, S.Pd., M.Pd.
b. NIP/NIDN : 199403282025061003
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi/Fakultas : Pendidikan Sejarah/FKIP
e. Nama Editor : Dr. Sumargono, S.Pd., M.Pd.

Identitas Buku

a. Tanggal Terbit : -
b. Nomor ISBN : -
c. Nama Penerbit : -
d. Alamat Penerbit : -

Bandar Lampung, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui
Dekan Fakultas,

Penulis,

Dr.Albert Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19870504 201404 1 001.

Bahtiar Afwan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199403282025061003

Mengesahkan
Kepala LPMPP Universitas Lampung,

Prof. Dr. Abdurrahman, M.Si
NIP. 196812101993031002

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar *Sejarah Afrika* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu bahan ajar untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah Sejarah Afrika di perguruan tinggi, khususnya pada program studi pendidikan sejarah. Buku ajar ini hadir dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya sumber pembelajaran yang secara khusus membahas sejarah Afrika dalam konteks akademik yang sistematis dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Padahal, Afrika merupakan salah satu benua yang memiliki kontribusi penting dalam sejarah peradaban dunia, mulai dari lahirnya peradaban kuno, perkembangan kerajaan-kerajaan besar, hingga dinamika kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan.

Materi dalam buku ini disusun secara kronologis dan tematik, mencakup pembahasan tentang peradaban awal Afrika, perkembangan kerajaan dan perdagangan, masuknya pengaruh luar, kolonialisme dan imperialisme, hingga proses dekolonisasi dan dinamika Afrika kontemporer. Penyajian materi juga dilengkapi dengan pendekatan analitis guna mendorong mahasiswa tidak hanya memahami fakta sejarah, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, historis, dan reflektif. Sebagai buku ajar, penyusunan materi dalam buku ini telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), serta dirancang untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan kontekstual.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pembelajaran sejarah yang lebih luas dan inklusif.

Bandar Lampung, 10 April 2026

Penulis

TATA CARA PENGGUNAAN BUKU

A. Penjelasan bagi Mahasiswa

Buku ajar Sejarah Afrika ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran guna membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara optimal. Buku ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa memahami dinamika sejarah Afrika secara kronologis dan tematik, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir historis, kritis, dan reflektif.

Dalam penggunaannya, buku ini terintegrasi dengan platform pembelajaran digital (VClass) pada Program Studi Pendidikan Sejarah. Mahasiswa diharapkan tidak hanya membaca materi, tetapi juga aktif mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran yang tersedia, seperti diskusi daring, penugasan, kuis, serta eksplorasi sumber-sumber sejarah digital yang relevan dengan topik kajian Afrika.

Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan petunjuk belajar, pertanyaan pemantik, dan latihan yang bertujuan mendorong pembelajaran kontekstual. Mahasiswa diarahkan untuk:

1. Mengkaji materi sebelum perkuliahan melalui VClass (pre-learning).
2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi, baik secara luring maupun daring.
3. Mengerjakan tugas individu maupun kelompok berbasis analisis sejarah Afrika.
4. Mengembangkan kemampuan komunikasi akademik melalui presentasi dan forum diskusi di VClass.
5. Memanfaatkan berbagai referensi tambahan (buku, jurnal, sumber digital) untuk memperkaya pemahaman.

Dalam menggunakan buku ajar ini, mahasiswa harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Untuk mencapai keduanya, mahasiswa diharapkan mengikuti seluruh pengalaman belajar yang telah dirancang, baik melalui pertemuan tatap muka maupun pembelajaran berbasis VClass secara mandiri dan kolaboratif.

B. Peran Dosen dalam Pembelajaran

Pembelajaran dalam mata kuliah Sejarah Afrika menggunakan pendekatan student centered learning yang terintegrasi dengan pemanfaatan VClass. Dalam hal ini, dosen berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang adaptif, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Diagnostician (mendiagnosis kemampuan mahasiswa)

Dosen mengidentifikasi kemampuan awal mahasiswa terkait pemahaman sejarah global dan Afrika melalui asesmen awal, diskusi, maupun aktivitas di VClass untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat.

2. Challenger (memberikan tantangan intelektual)

Dosen merancang tantangan akademik berupa studi kasus, analisis sumber sejarah, dan isu-isu kontemporer Afrika yang diunggah melalui VClass, guna mendorong mahasiswa berpikir kritis dan analitis.

3. Activator (mengaktifkan partisipasi mahasiswa)

Dosen memfasilitasi keaktifan mahasiswa melalui berbagai metode, seperti diskusi kelas, brainstorming, forum daring di VClass, serta penugasan kolaboratif, sehingga mahasiswa mampu mengoptimalkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

4. Monitoring (memonitor perkembangan mahasiswa)

Dosen memantau perkembangan belajar mahasiswa secara berkelanjutan melalui aktivitas di kelas dan rekam jejak pembelajaran di VClass, termasuk keaktifan diskusi, pengumpulan tugas, serta capaian kuis dan evaluasi.

5. Evaluating (mengevaluasi pembelajaran)

Evaluasi dilakukan secara komprehensif, mencakup proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diintegrasikan melalui berbagai instrumen, baik secara langsung maupun melalui VClass, seperti kuis daring, tugas proyek, dan refleksi pembelajaran.

Dengan sinergi antara penggunaan buku ajar dan optimalisasi VClass, diharapkan proses pembelajaran Sejarah Afrika menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik serta keterampilan abad ke-21.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PRAKATA	ii
TATA CARA PENGGUNAAN BUKU	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PERKEMBANGAN AWAL KEHIDUPAN PENDUDUK DI AFRIKA, PERSEBARAN PENDUDUK, BAHASA, DAN PUSAT-PUSAT PERADABAN

A. Latar Belakang	1
B. Perkembangan Awal Kehidupan Penduduk di Afrika	2
C. Keragaman Bahasa di Afrika	7
D. Pusat-Pusat Peradaban di Afrika	9
E. Rangkuman	12
F. Latihan	12
G. Rujukan	12

BAB II PUSAT-PUSAT PERADABAN, KEBUDAYAAN KUNO DI AFRIKA MELIPUTI KARTAGO, AKSUM, KUSH SERTA KERAJAAN-KERAJAAN DAGANG DI AFRIKA BARAT

A. Latar Belakang	14
B. Keadaan Pusat-Pusat Peradaban di Afrika	14
C. Kebudayaan Kuno di Afrika	15
D. Kerajaan-Kerajaan Dagang di Afrika Barat	18
E. Rangkuman	19
F. Latihan	20
G. Rujukan	20

BAB 3 ISLAM DI AFRIKA MASUKNYA MUBALIGH DALAM MENYEBARKAN ISLAM DI AFRIKA DAN DAMPAKNYA

A. Latar Belakang	22
B. Proses Masuknya Agama Islam di Afrika	23
C. Cara Mubaligh Menyebarkan Agama Islam di Afrika	28
D. Kerajaan/Dinasti yang Berkuasa dalam Proses Islamisasi di Afrika	31
E. Pengaruh Islamisasi di Afrika.....	36
F. Rangkuman	38
G. Latihan	39
H. Rujukan	39

BAB 4 PERKEMBANGAN AWAL KEDATANGAN ORANG-ORANG EROPA DI AFRIKA DAN PENJELAJAHAN BENUA AFRIKA OLEH BANGSA EROPA

A. Latar Belakang	41
B. Tujuan Penjelajahan Orang Eropa di Afrika	42
C. Dampak dari Kedatangan Eropa	43
D. Interaksi Para Penjelajah Eropa Dengan Bangsa Afrika.....	44
E. Penjelajahan Belgia Di Afrika.....	45
F. Penjelajahan Perancis di Afrika	47
G. Penjelajahan Inggris di Afrika.....	49
H. Penjelajahan Portugal di Afrika	50
I. Politik dari Kedatangan Orang Eropa di Afrika dan Perubahan Sosial dan Budaya akibat Penjelajahan Eropa.....	52
J. Rangkuman.....	53
K. Latihan	54
L. Rujukan.....	54

BAB 5 KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI AFRIKA, KOLONIALISME KUNO DAN MODERN, INDUSTRIALISME DAN NEGARA NEGARA EROPA BARAT

A. Latar Belakang	56
B. Kolonialisme Dan Imperialisme Barat Di Afrika.....	58
C. Kolonialisme Kuno Dan Modern Mempengaruhi Afrika	60
D. Kolonialisme Dan Imperialisme Barat Mempengaruhi Industri Di Afrika Dan Hubungan Afrika Dengan Negara- Negara Eropa Barat	62
E. Rangkuman	64
F. Latihan	65
G. Rujukan	65

BAB 6 KONFLIK-KONFLIK YANG BERKEMBANG DI AFRIKA (KRISIS ETHIOPIA, KRISIS FASHODA, KRISIS MAROKO 1, DAN KRISIS MAROKO 2)

A. Latar Belakang	67
B. Krisis Ethiopia.....	69
C. Krisis Maroko 1.....	71
D. Krisis Maroko 2	73
E. Rangkuman	74
F. Latihan	74
G. Rujukan	74

BAB 7 TERBENTUKNYA NEGARA MERDEKA ZAIRE (JAJAHAN BELGIA)

A. Latar Belakang	76
B. Terbentuknya Negara Merdeka Zaire.....	76
C. Leopold Berdaulat di Kongo 1885-1905.....	77
D. Kasus Rwanda dan Burundi.....	81
E. Nasionalisme dan Pergerakan Kemerdekaan	84
F. Rangkuman	85

G. Latihan	86
H. Rujukan	86

BAB 8 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN JAJAHAN INGGRIS DAN TERBENTUKNYA NEGARA-NEGARA EROPA

A. Latar Belakang	88
B. Terbentuknya Negara-negara Jajahan Inggris	89
C. Kekuasaan Inggris di Mesir.....	71
D. Latar Belakang dibangunnya Terusan Suez	92
E. Strategi Politik di Mesir	93
F. Rangkuman	94
F. Latihan	95
G. Rujukan	95

BAB 9 NEGARA-NEGARA JAJAHAN INGGRIS DI AFRIKA SELATAN DAN PERKEMBANGANNYA

A. Latar Belakang	96
B. Terbentuknya Negara-Negara Jajahan Inggris Di Afrika Selatan	97
C. Perang Boer Melawan Inggris dan Uni Afrika Selatan	98
D. Masalah Apartheid	101
E. Rangkuman	102
F. Latihan	102
G. Rujukan	103

BAB 10 NEGARA-NEGARA JAJAHAN PRANCIS DAN ALJAZAIR DAN KEMERDEKAAN TUNISIA

A. Latar Belakang	104
B. Negara-Negara Jajahan Prancis di Afrika	105
C. Perjanjian Bardo pada Tahun 1881	107
D. Prancis Di Tunisia Hingga Kemerdekaan Tunisi	108
E. Rangkuman	109
F. Latihan	110
G. Rujukan	110

BAB 11 JAJAHAN NEGARA PERANCIS, MAROKO, PERJANJIAN FEZ 1912, PERISTIWA BAR BAR TAHUN 1950, KEMERDEKAAN MAROKO

A. Latar Belakang	112
B. Maroko Sebagai Negara Jajahan Perancis	113
C. Perjanjian Fez 1912.....	116
D. Peristiwa Bar-bar.....	117

E. Kemerdekaan Maroko	119
F. Rangkuman	122
G. Latihan	122
H. Rujukan	122

BAB 12 KOLONISASI DAN KEKUASAAN ITALIA DI AFRIKA TIMUR TAHUN 1934-1943

A. Latar Belakang	125
B. Koloni Italia di Wilayah Afrika.....	127
C. Sejarah Pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya.....	128
D. Dampak dari Kolonisasi dan Kekuasaan Italia di Negara Ethiopia, Eritrea, Dan Libya	139
E. Rangkuman	142
F. Latihan	143
G. Rujukan	143

BAB 13 KEMERDEKAAN NEGARA- NEGARA MERDEKA LAINNYA KEKUASAAN JERMAN, SPANYOL, DAN PORTUGAS DI AFRIKA

A. Latar Belakang	145
B. Kekuasaan Bangsa Jerman di Afrika.....	146
C. Kekuasaan Spanyol di Afrika.....	147
D. Kekuasaan Portugis di Afrika	151
E. Gerakan Kemerdekaan Negara-Negara Kolonial di Afrika.....	154
F. Rangkuman	156
G. Latihan	156
H. Rujukan	156

BIODATA PENULIS	158
------------------------------	------------

BAB I

PERKEMBANGAN AWAL KEHIDUPAN PENDUDUK DI AFRIKA, PERSEBARAN PENDUDUK, BAHASA, DAN PUSAT-PUSAT PERADABAN

A. Latar Belakang

Afrika adalah sebuah benua yang terletak di belahan selatan bumi dan merupakan benua terbesar ketiga di dunia. Luasnya kurang lebih 30,343,578 km² dengan presentase daratan 20,0%. Afrika sering dikenal dengan sebutan "*The Dark Continent*". Karena mayoritas penduduknya memang dari ras negroid yang berkulit hitam, istilah ini sebetulnya merupakan istilah yang sudah membantu dalam masyarakat luas yang berasal dari suatu predikat yang ramai diteriakan pada zaman kolonial terhadap Afrika. sebutan *Dark Continent* lebih pada konotasi negatif yang merendahkan dan sering kali dipakai untuk tujuan yang bersifat imperialistis. Selain sebutan benua gelap, Afrika juga dikenal dengan "*Terra Incognita*" yang berarti tanah yang tidak dikenal. Tidak dikenalnya Afrika adalah akibat dari terisolasinya daerah tersebut terutama daerah pedalaman dari pusat-pusat peradaban dunia. (Gamal Komandoko, 2010).

Nama "Afrika" sudah dikenal sejak zaman kuno. Besar kemungkinan orang roma yang pertama kali menggunakannya, walaupun semula hanya untuk menunjukkan suatu wilayah tertentu di pantai Afrika Utara yang menjadi daerah kekuasaannya. Mereka menyebutnya *Afri*, atau *A Fricani*, yang berasal dari nama salah satu suku mayoritas penduduk setempat Aouriqha atau Afarika. Kemudian pada masa orang Arab berkuasa menggantikan kedudukan Roma, nama tersebut juga digunakan dengan ejaan yang sedikit berbeda *Ifrikiya*. Selanjutnya pada zaman Kolonial orang Eropa menggunakannya untuk seluruh gugusan benua, dan sejak saat itulah nama Afrika terpakai secara umum (Adityas Arifianto, 2023).

Afrika merupakan sebuah wilayah yang luas, secara sosial budaya menyajikan problematika dan keragaman yang perlu untuk diketahui dan dianalisis. Mayoritas penduduknya yang berkulit hitam ternyata memiliki latar belakang sosial, budaya, agama, bahasa, dan sejarah perkembangan masyarakatnya yang sangat heterogen, bukti fosil menunjukkan bahwa Afrika adalah tempat lahirnya manusia modern. Persebaran penduduk awal di Afrika dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk iklim, sumber daya, teknologi, dan migrasi. Situs-situs penting dari awal kehidupan

manusia di Afrika memberikan bukti tentang evolusi manusia dan perkembangan budaya manusia (Daniel Blondel, 2022).

Bahasa di Afrika memiliki berbagai ragam jenis yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis dan komunitas di seluruh wilayahnya. Beberapa bahasa memiliki status resmi di negara-negara tertentu, sementara yang lain digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di tingkat lokal. Menurut Ethnologue, sebuah sumber terkemuka dalam bidang linguistik, terdapat lebih dari 2.000 bahasa yang digunakan di Afrika. Rekonstruksi bahasa-bahasa di Afrika pada masa awal kehidupan manusia sangatlah sulit dan bersifat spekulatif karena belum adanya penemuan sistem tulisan dari era tersebut. Namun, para ahli bahasa menggunakan beberapa metode untuk mencoba memahami asal-usul dan perkembangan bahasa-bahasa di benua Afrika. Globalisasi telah mempengaruhi perkembangan bahasa di Afrika, dengan munculnya bahasa-bahasa baru dan perubahan dalam cara komunikasi. Bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Prancis semakin dominan dalam komunikasi internasional dan bisnis (Darsiti Soeratman, 1965).

Afrika memiliki sejarah panjang dan kaya dengan berbagai pusat peradaban yang berkembang di berbagai wilayahnya. merujuk pada lokasi-lokasi di benua Afrika yang menjadi pusat perkembangan budaya, politik, sosial, dan ekonomii pada masa lampau. Benua Afrika memiliki sejarah panjang peradaban yang kaya, dengan banyak wilayah yang menjadi pusat-pusat penting dalam perkembangan manusia dan peradaban di masa lalu (Kevin Shillington, 2012).

B. Perkembangan Awal Kehidupan Penduduk di Afrika

Pola Kehidupan Penduduk Awal Afrika adalah masyarakat lebih sering berkelana jika dibandingkan dengan Eropa karena di Afrika hanya terdapat sedikit daerah yang subur, maka pencaharian lahan produktif telah menyebabkan anggota masyarakat mencari kesempatan hidup baru. Sebagian besar orang Afrika adalah petani yang bercocok tanam untuk menghidupi keluarga mereka. Selama berabad-abad orang Afrika telah bergotong-royong melaksanakan berbagai tugas kemasyarakatan, misalnya membuat jalan setapak, jalan besar ataupun jembatan. Penduduk bergotong-royong dengan tetangga atau saudara-saudara mereka mendirikan rumah, menuai panen, dan menggembala ternak mereka. Sepanjang sejarah, masyarakatnya secara keseluruhan selalu ikut serta dalam acara hiburan, pagelaran musik dalam tarian, atau upacara ritual keagamaan (Rizem. A, 2018).

Setiap kelompok masyarakat memiliki bentuk pengambilan keputusan masing-masing yang berpusat pada seseorang kepala suku, pada sekelompok tetua desa, semacam dewan desa, atau

pada acara rembuk desa. Bahkan kekuasaan kepala suku pun hampir selalu dibatasi. Keikutsertaan seluruh orang dewasa dalam pengambilan keputusan merupakan tradisi Afrika yang tersebar luas. Setiap masyarakat mengembangkan adat-istiadatnya sesuai dengan kebutuhan anggotanya misalnya, kebutuhan atas perlindungan terhadap gangguan keamanan atau atas pemasaran hasil pertanian khusus mereka. Jika kesatuan masyarakat perlu diperkuat, kekuatan lebih banyak dipusatkan pada pimpinan mereka. Jika kehidupan aman dan damai, rakyat dapat lebih banyak membuat keputusan sendiri dalam kelompok keluarga yang lebih kecil (Tim, 1984).

Seperti ditempat lain, masyarakat Afrika bergabung satu sama lain, berpisah atau bersatu dengan kelompok lain, kemudian berpindah membentuk kelompok-kelompok baru. Proses ini mendorong terjadinya adat istiadat baru. Pemerintahan, hukum, bahasa, agama, dan hubungan kekeluargaan terpengaruh oleh perubahan itu. Sebagian besar masyarakat tradisional Afrika masih hidup nomaden sehingga sulit untuk menarik batas-batas yang pasti diantara berbagai daerah Afrika. Jelas sekali bahwa orang Afrika adalah keturunan dari beberapa bentuk kombinasi yang berasal dari keturunan Bushmanoid, Negroid, dan Kaukasoid, yang secara tetap beradaptasi dengan lingkungan setempat. Orang Kaukasoid tersebar diseluruh bagian utara Afrika sampai ke timur selama masa permulaan. Orang Negroid berpindah-pindah sepanjang daerah Afrika Barat. Kedua keturunan ini bertemu dan melalui perkawinan antar mereka lahirlah keanekaragaman suku diantara bangsa Afrika modern (Kirdi dipoyudo, 1997).

Salah satu ekspor budaya penting dari utara ke selatan adalah teknologi penanaman pangan dan pemeliharaan hewan. Penemuan teknologi ini mungkin semua diciptakan di Asia barat lalu disebarluaskan di Afrika Utara dan selanjutnya ke Lembah Sungai Nil. Dengan pengetahuan bercocok tanam, kelompok besar bergerak mencari lahan yang lebih baik. Beberapa kelompok mengkhususkan diri dibidang peternakan. Kini Suku Masai di Kenya dan Tanzania menjadi contoh orang-orang yang bertahan dalam tradisi ini. Namun, kebanyakan beberapa masyarakat Afrika menggabungkan pertanian dengan peternakan (Kirdi Dipoyudo, 1983).

Berapa Negara dari Afrika besar lama yang didirikan di Afrika barat adalah Ghana, Mali, Songhai, Kanembornu. Sementara diabad pertama masehi mulai terjadi perpindahan penduduk bantu secara besar-besaran. Mereka menyebar baik dari barat maupun dari pusat atau dari kedua daerah itu menyerang ke daerah Timur Afrika, Tengah, dan Selatan berbaur dengan penduduk lokal yang berbahasa Khoisan dan Kushitik. Sebagai akibat penyebaran besar penduduk, saat ini Afrika memiliki beratus kelompok keturunan dan hampir 1000 bahasa yang berbeda. Bahasa Arab di

Utara, Bahasa Swahili di Timur dan Bahasa Kausa di Barat merupakan bahasa yang digunakan oleh sejumlah besar penutur (Anisa. S, 2020).

Afrika disebut Cradle of Humankind karena kehidupan manusia berasal dari sana. Nama tersebut berlaku lebih khusus untuk suatu wilayah di Afrika Selatan di mana sisa-sisa fosil dari beberapa nenek moyang manusia telah ditemukan bukti fosil tertua berasal dari tiga juta tahun lebih. Manusia modern secara anatomis paling awal muncul 200.000 tahun yang lalu di tempat yang dulunya merupakan lahan basah yang luas yang terbentang di Botswana di Afrika Selatan. Pergeseran iklim selanjutnya membuka koridor hijau ke timur laut dan barat daya, membuat nenek moyang manusia menyebar ke seluruh Afrika. Perkembangan peradaban manusia tertua di dunia dan penggunaan api 1,5 hingga 2 juta tahun yang lalu terjadi di Afrika. Afrika juga menjadi tempat lahirnya alat-alat perkakas pertama, pengetahuan astronomi, perhiasan, matematika, bercocok tanam, seni, dan domestikasi hewan ternak (Adityas Arifianto, 2023).

Afrika telah diidentifikasi sebagai tempat asal Homo sapiens, dibuktikan oleh tingginya keragaman genetik dan divergensi tertinggi yang ditemukan di antara individu-individu benua ini. Kehadiran fosil-fosil manusia purba tertua di Afrika, termasuk di bagian utara (dengan usia sekitar 300.000 tahun), selatan (individu dengan usia 260.000 tahun), dan timur Afrika (sekitar 195.000–160.000 tahun yang lalu), semakin menegaskan peranan penting Afrika dalam evolusi manusia purba. Rekaman fosil manusia purba Afrika menunjukkan variasi morfologis yang luas, menandakan kemungkinan interaksi dengan garis keturunan yang sekarang telah punah dari spesies atau bentuk Homo lainnya (Tim, 1992).

Dengan adanya Teori Out of Africa yang didukung oleh banyaknya penemuan fosil makhluk menyerupai kera yang berasal dari berbagai kawasan di benua Afrika, telah ditemukan beberapa fosil yang penting oleh Raymond Dart (1829-1924) di Afrika Selatan, termasuk fosil *Australopithecus africanus*, *Paranthropus robustus*, dan *Plesianthropus transvaalensis*. Menurut Dart, fosil-fosil ini memiliki beberapa karakteristik khas, seperti kemampuan untuk berdiri tegak dan berjalan dengan dua kaki, tinggi badan sekitar 1,5 meter, volume otak sekitar 450-600 cm³, dan habitat yang cenderung terbuka. Selama jutaan tahun berikutnya, ukuran otak mulai meningkat, dengan kapasitas tengkorak Homo erectus yang mencapai dua kali lipat menjadi 850 cm³ menurut catatan fosil. Penemuan lainnya adalah *Australopithecus habilis*, yang memiliki volume otak sekitar 650 cm³, yang lebih besar daripada makhluk mirip kera Afrika lainnya, menunjukkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Penemuan fosil Homo habilis ini merupakan

bukti paling awal dari evolusi genus Homo, yang diyakini telah menggunakan alat-alat dari batu sejak sekitar 2,3 juta tahun yang lalu, dengan volume otak yang sebanding dengan simpanse (Thula Simpson, 2022).

Arkeolog asal Inggris menemukan fosil makhluk mirip kera yang dulunya menghuni wilayah Afrika timur. Sebuah tengkorak fosil yang relatif utuh berusia 3,8 juta tahun ditemukan di daerah Miro Dora, sebuah wilayah di Distrik Mile di Afar, Ethiopia. Biasanya, fosil nenek moyang manusia yang sangat tua langka ditemukan dan terdiri dari fragmen tulang belulang. Namun, penemuan fosil di Miro Dora ini adalah sebuah tengkorak yang hampir utuh, memungkinkan untuk studi rinci. Ethiopia, sebagai salah satu wilayah atau negara di Afrika, diyakini sebagai tempat asal dari penyebaran manusia pertama ke benua-benua lain di luar Afrika. Penemuan ini mendapat dukungan yang kuat melalui analisis radioaktif dan genetik ulang terhadap fosil-fosil yang ditemukan pada tahun 1967. Fosil-fosil tersebut, dikenal sebagai Homo 1 dan Homo 2, ditemukan di daerah Kubis dekat Sungai Omo di bagian selatan Ethiopia. Tim peneliti juga berhasil mengumpulkan sampel bebatuan di lokasi penemuan fosil homo. Selain tengkorak, juga ditemukan tulang lengan, tungkai, kaki, dan pelvis yang dikonfirmasi sebagai milik Homo 1. Awalnya, umur fosil Homo 1 diperkirakan 130.000 tahun, namun setelah dilakukan penanggalan ulang, umurnya ternyata 195.000 tahun, lebih tua daripada perkiraan sebelumnya sekitar 65.000 tahun. Penemuan dua tengkorak Homo dari Ethiopia ini akhirnya dikonfirmasi sebagai fosil Homo sapiens tertua yang diketahui hingga saat itu, dengan usia direvisi menjadi 195.000 tahun. Usia ini melampaui usia fosil tengkorak manusia purba yang sebelumnya ditemukan pada tahun 2003 di wilayah Apar, Ethiopia Timur, yang dianggap sebagai fosil tertua dengan usia sekitar 154 hingga 160.000 tahun (Hollfelder dkk., 2021).

2.2 Persebaran Penduduk di Afrika

Perpindahan dan penyebaran penduduk di Afrika di pengaruhi oleh perubahan iklim. Selama beberapa ratus tahun terakhir, sebagian wilayah Afrika mengalami kekeringan. Namun, sekitar 60.000-70.000 tahun yang lalu, terjadi periode kelembaban yang menyeluruh di seluruh benua untuk sementara waktu. Kelembaban ini cukup untuk membuka jalur antara wilayah Selatan dan Timur. Kemunculan bukti ini memberikan kemungkinan bahwa sekelompok kecil orang berpindah dari Afrika Selatan menuju ke arah Timur sekitar 65.000 tahun yang lalu. Selama perjalanan ini, mereka membawa serta warisan budaya manusia modern yang maju kepada populasi di Afrika Timur. Leluhur manusia modern secara anatomi (Homo sapiens) kuno, telah berevolusi sekitar

400.000 hingga 250.000 tahun yang lalu. Baru-baru ini, bukti DNA menunjukkan bahwa sejumlah *haplotype* (sekelompok gen yang terletak berdampingan pada kromosom dan cenderung diwariskan bersama-sama) Neanderthal ditemukan di antara semua populasi di luar Afrika. Manusia dengan anatomi tubuh modern berkembang dari Homo sapiens kuno pada periode pertengahan Paleolitikum sekitar 200.000 tahun yang lalu. Kebanyakan ahli antropologi meyakini bahwa transisi ke perilaku modern, termasuk perkembangan budaya simbolik, bahasa, dan teknologi batu, terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Namun, ada juga pendapat di kalangan ahli antropologi yang percaya bahwa perubahan kebiasaan tersebut mungkin terjadi secara bertahap dalam periode waktu yang lebih panjang (Riyadi, 2019).

Dalam komunitas ilmiah, terdapat dua aliran utama dalam diskusi mengenai asal usul dan penyebaran manusia modern di Bumi. Pendekatan pertama mendukung teori "*Out of Africa*", yang menyatakan bahwa manusia modern berasal dari satu wilayah di Afrika. Dikatakan bahwa kehidupan manusia dimulai di wilayah tersebut sekitar 200.000 tahun yang lalu. Generasi awal manusia ini kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai tempat. Mereka hidup sebagai kaum nomaden, berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Dari mereka, lahirlah generasi manusia modern yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, aliran pendapat kedua mempercayai kemungkinan penyebaran manusia dari berbagai wilayah, atau yang dikenal dengan istilah "*multiregional evolution*". Menurut pandangan ini, manusia modern tidak hanya berasal dari Afrika, tetapi juga dari Eropa dan Asia, sebagai hasil evolusi dari populasi yang sudah ada sebelumnya di wilayah-wilayah tersebut. Debat tentang teori *Out of Africa* sendiri masih terus berlanjut. Ada pandangan dari para ilmuwan yang mengemukakan bahwa kelompok pertama yang meninggalkan Afrika adalah homo sapiens, yang kemudian menyebar dan menetap di berbagai wilayah di seluruh dunia seperti sekarang ini. Mereka menganggap bahwa fosil-fosil hominid dengan variasi morfologis yang beragam terbentuk melalui adaptasi regional terhadap lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa sebelum homo sapiens menyebar dari Afrika, sudah ada spesies hominid lain yang tinggal di wilayahwilayah tertentu, namun kemudian digantikan oleh kedatangan homo sapiens dari Afrika. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Homo rhodesiensis atau Homo antecessor berpindah keluar dari benua Afrika sekitar 100.000 hingga 50.000 tahun yang lalu (Mukhlis Akhadi, 2021).

Pesebaran penduduk di Afrika memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Geografi, wilayah yang subur memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung menarik perhatian

penduduk; ekonomi, seperti akses terhadap sumber daya ekonomi dan standar hidup yang baik cenderung menarik migrasi penduduk dari daerah lain; faktor sosial budaya, kelompok etnis atau agama tertentu mungkin cenderung berkumpul di wilayah tertentu dan norma sosial dan kebiasaan budaya juga dapat memengaruhi pilihan tempat tinggal dan pola migrasi; infrastruktur dan perubahan lingkungan yang baik; dan urbanisasi. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan kompleks, seiring berjalannya waktu perubahan dalam faktor-faktor ini juga dapat mengubah pola migrasi dan persebaran penduduk di wilayah tersebut (Abdul Rahman, 2023).

C. Keragaman Bahasa di Afrika

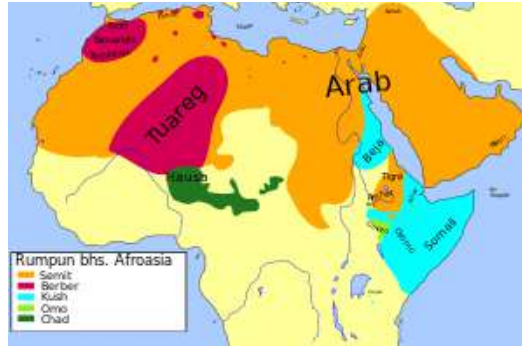
Benua Afrika terkenal akan keragaman budayanya, dan salah satu aspek yang paling menonjol adalah keragaman bahasanya. Diperkirakan terdapat sekitar 2.000 bahasa yang digunakan di seluruh benua, mencakup hampir sepertiga dari total bahasa di dunia. Ini menjadikannya salah satu benua dengan keragaman bahasa terkaya. Keragaman ini dikelompokkan menjadi beberapa rumpun bahasa utama :



Gambar 1. Daerah Sebar Tutur Bahasa-Bahasa Niger-Kongo

Sumber : Wikipedia

Niger-Kongo: Ini adalah rumpun bahasa terbesar di Afrika, dengan penutur terbanyak di wilayah Afrika Barat dan Tengah. Beberapa bahasa terkenal dalam rumpun ini termasuk Swahili, Yoruba, dan Hausa. Kelompok Bahasa Niger-Kongo mencakup kebanyakan dari Afrika bagian sub-Sahara dan kemungkinan adalah kelompok bahasa terbesar di dunia dari segi jumlah bahasa. Sejumlah besar diantaranya adalah bahasa-bahasa bantu yang digunakan di sebagian besar Afrika bagian sub-Sahara.



Gambar 2. Persebaran Bahasa-Bahasa Afro-Asia

Sumber : Wikipedia

- Afro-Asia: Kelompok Bahasa Afro-Asiatik adalah sebuah kelompok bahasa yang terdiri dari sekitar 240 bahasa dan 285 juta penutur yang tersebar luas di sepanjang Afrika Utara, Afrika Timur, Sahel, dan Asia Barat Daya mencakup bahasa-bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Amharic.



Gambar 3. Penyebaran Rumpun Bahasa Nilo-Sahara

Sumber : Wikipedia

- Nilo-Sahara: Kelompok Bahasa Nil-Sahara terdiri dari lebih dari seratus bahasa yang dituturkan oleh 30 juta orang. Bahasa Nil-Sahara kebanyakan diucapkan di Chad, Sudan, Ethiopia, Uganda, Kenya, dan sebelah utara Tanzania. Dan juga ditemukan di Afrika Sub-Sahara, di antaranya bahasa Nubia, Kanuri, dan Songhai.
- Khoisan: Kelompok Bahasa Khoisan terdiri dari sekitar 50 bahasa dan dituturkan di sebelah selatan Afrika oleh sekitar 120.000 jiwa. Banyak dari bahasa-bahasa Khoisan

adalah bahasa yang terancam punah. Suku Khoi dan San dianggap sebagai penduduk asli di wilayah ini. (Sulistinah, Kuspriyanto. 2015).

Dimulai dari kedatangan orang Belanda ke Tanjung Harapan pada abad ke-17. Bahasa Afrika, atau yang lebih dikenal sebagai Bahasa *Afrikaans*, adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di Afrika Selatan. Bahasa *Afrikaans* berasal dari Bahasa Belanda yang digunakan oleh para imigran Belanda, Jerman, dan Prancis yang tiba di Tanjung Harapan pada abad ke-17. Pada awalnya, bahasa ini dikenal sebagai "*Kaps Hollands*" atau "*Kaps-Maleis*" karena pengaruh dari Bahasa Melayu dan bahasa daerah Khoi-Khoi di wilayah tersebut. Seiring waktu, Bahasa *Afrikaans* mulai berkembang menjadi bahasa yang berbeda dari Bahasa Belanda, dengan pengaruh dari berbagai bahasa lain yang digunakan di wilayah tersebut, termasuk Bahasa Inggris, Portugis, dan Bahasa Afrika-Belanda (bentuk Belanda yang diadaptasi oleh komunitas kulit hitam di Afrika Selatan). Pada abad ke-19, Bahasa *Afrikaans* mulai diakui sebagai bahasa yang berbeda dari Bahasa Belanda dan mendapatkan pengaruh dari bahasa-bahasa daerah di Afrika Selatan. Pada tahun 1925, Bahasa *Afrikaans* dijadikan bahasa resmi di Afrika Selatan bersama dengan Bahasa Inggris. Bahasa *Afrikaans* memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan identitas budaya dan nasional di Afrika Selatan. Bahasa ini menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Afrika Selatan yang berbahasa *Afrikaans*, dan dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya mereka (Roberge, 1994).

D. Pusat-Pusat Peradaban di Afrika

Pusat-pusat peradaban awal di Afrika memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan manusia dan peradaban. Salah satu contoh utama adalah Lembah Sungai Nil di Mesir kuno. Mesir kuno dikenal karena peradaban maju mereka yang menciptakan piramida megah, sistem tulisan hieroglif, dan sistem penanggalan yang canggih. Nil, sebagai sumber kehidupan, memberikan tanah subur bagi pertanian dan perdagangan. Peradaban Mesir kuno juga memiliki pengaruh besar dalam bidang seni, matematika, dan astronomi. Selain Mesir, Pusat peradaban Nok di Nigeria adalah contoh lain dari kemajuan awal di Afrika. Peradaban Nok, yang berkembang sekitar 1500 tahun yang lalu, terkenal karena seni patung tanah liatnya yang unik. Patung-patung ini merupakan salah satu contoh seni tertua di Afrika. Mereka juga menunjukkan tingkat kemajuan teknologi yang tinggi pada masa itu, dengan kemampuan membentuk dan memahat tanah liat menjadi karya seni yang indah (Yuval Noah Harari, 2015).

Di sebelah selatan Afrika, Zaman Besi Bantu merupakan periode penting dalam sejarah peradaban. Pergerakan Bantu, yang dimulai sekitar 2000 tahun yang lalu, membawa teknologi pertanian baru, bahasa, dan budaya ke wilayah-wilayah di seluruh Afrika bagian selatan. Peradaban Bantu berkontribusi pada pembentukan kerajaan-kerajaan dan perkotaan di wilayah tersebut, memperkaya warisan budaya Afrika. Salah satu peradaban yang kurang dikenal tetapi tak kalah penting adalah Kerajaan Aksum di Etiopia. Berpusat di wilayah yang sekarang disebut Tigray, Kerajaan Aksum berkembang sekitar abad pertama Masehi. Mereka dikenal karena perdagangan internasional mereka dengan bangsa Yunani, Romawi, dan India. Aksum juga merupakan salah satu dari sedikit kerajaan Afrika yang mengadopsi agama Kristen pada awalnya. Hal ini membuatnya menjadi pusat spiritual dan budaya yang signifikan di Afrika Timur. Tidak dapat dilupakan adalah Kerajaan Mali di Afrika Barat. Berdiri sekitar abad ke-13 hingga ke-16, Mali adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling kaya di dunia pada zamannya. Berkat kekayaan dari perdagangan emas dan garam, Mali menjadi pusat kebudayaan dan pembelajaran, terutama di kota Timbuktu yang terkenal. Selain itu, Kerajaan Mali juga terkenal karena penguasaannya yang bijak dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut (Amanda Paramesthi, 2023).

Beberapa pusat peradaban yang terkenal di Afrika :

1. Kerajaan Kush, Kush adalah sebuah kerajaan yang terletak di Afrika Utara, di wilayah yang setara dengan Sudan saat ini, Wilayah yang lebih luas di sekitar Kush (kemudian disebut Nubia) telah dihuni sekitar satu dekade lalu, namun kerajaan Kush bangkit kemudian. Wilayah ini dikenal oleh orang Mesir sebagai *Ta-Sety* ("Negeri Busur"), mengacu pada pemanah Kushite yang terampil, pada masa Kerajaan Lama Mesir (c. 2613-2181 SM) dan wilayah utara, berbatasan dengan Mesir, sebagai Wawat. Apa sebutan Kush oleh penduduknya saat ini tidak jelas, mungkin ia selalu dikenal sebagai Kush atau variannya karena prasasti Mesir juga menyebutnya sebagai Kus, Kas, dan Kash. Sebutan '*Kush*' nampaknya merupakan nama asli sedangkan nama selanjutnya untuk wilayah yang sama, Nubia, kemungkinan besar berasal dari orang Mesir di utara. Meskipun sejarah negara secara keseluruhan cukup kuno, Kerajaan Kush berkembang antara 1069 SM dan 350 M. Kerajaan Baru Mesir (1570-1069 SM) berada pada tahap akhir kemunduran 1069 SM, yang memberdayakan negara kota Kushite, Napata. Kaum Kush tidak perlu lagi khawatir akan serangan Mesir ke wilayah mereka karena Mesir kini sudah cukup kesulitan dalam

mengatur dirinya sendiri. Mereka mendirikan Kerajaan Kush dengan Napata sebagai ibu kotanya, dan Kush menjadi kekuatan di wilayah tersebut sementara Mesir mengalami kegagalan (Joshua J. Mark, 2018).

2. Kerajaan Aksum, Kekaisaran Aksum (sekitar abad ke-5 SM- abad ke-11 M) telah merintis rute Laut Merah sebelum abad ke-1 Masehi. Pada pertengahan abad ke-7 kebangkitan Islam menutup jalur pada rute darat kafilah yang melalui Mesir dan Kanal para Firaun, dan memisahkan komunitas perdagangan Eropa dari Aksum dan Hindustan (Ria Armayani Hasibuan & Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1988). Pada abad pertama sesudah Masehi di wilayah ini berdiri kerajaan Aksum, tempat Dinasti Sulaiman memerintah. Aksum di daerah tanah Tinggi setelah menaklukkan bangsa hamit yang sebelumnya telah tinggal disana. Kerajaan Aksum atau Kekaisaran Aksum adalah adalah negara dagang penting di Afrika Timur laut antara tahun 100-9140. Aksum menempati wilayah yang kini menjadi Ethiopia Utara dan Eritrea (M. Azmie Fadillah, 2019).
3. Kekaisaran Mali, 11 Tradisi kuno di Sudan Barat ditemukan di daerah Kangaba yang menjadi cikal bakal kerajaan Mali sekitar sebelum tahun 1000 M. Kerajaan Mali kuno merupakan salah satu kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Ghana dan songhai atau lebih tepatnya secara kronologis Ghana (700 sampai 1100), Mali (800- 1550) dan Songhai (1100 sampai 1600). Terdapat tiga periode kejayaan Kekaisaran Mali yaitu: 1. Kekuasaan Sundiata (1235-1260) sebagai pendiri kerajaan. 2. Kekuasaan Mansa Sakuru (1298-1308) dia memperluas kerajaan meliputi seluruh Sudan dan banyak Saudagar melakukan perjalanan ke Mali. 3. Kekuasaan Mansa kankan Musa (1312-1337) dia kembali memperluas kerajaan hingga pada masa Mansa Sulaiman.
4. Kerajaan Ghana, Kerajaan ini terletak di Afrika Barat pada masa pemerintahan Raja AlYakubi, Ghana telah menjadi sumber penghasil emas yang besar. Kerajaan Ghana pernah diperintah oleh salah satu dinasti Arab yang bertahta di Kumbi Saleh. Rajanya yang terkenal ialah Tunkamanin. Kota Kumbi Saleh yang menjadi pusat perdagangan pedagang Arab dan Berber dan Mograb , Mesir dan Asia Barat daya. Kerajaan Ghana berakhir sekitar tahun 1240 Masehi. Pada masa pemerintahan raja Al-yakubi, Ghana telah menjadi sumber penghasil emas yang besar. dibawah kekuasaannya Al-Yakubi pula beberapa kerajaan kecil tunduk di bawah Ghana seperti Kerajaan Sugham dan Sama. Ghana menjadi bawahan

negara dari Kekaisaran Mali yang tengah bangkit di abad 13 kerajaan ini mengalami kehancuran sekitar tahun 1240 M (Muhammad Ibnu Fadillah, 2022).

Secara keseluruhan, pusat-pusat peradaban awal di Afrika memberikan bukti akan kekayaan dan keragaman warisan budaya benua tersebut. Dari Mesir kuno hingga Kerajaan Mali, setiap peradaban memiliki kontribusi uniknya sendiri dalam sejarah manusia. Melalui penelitian lebih lanjut dan upaya pelestarian, kita dapat terus menghargai dan mempelajari warisan yang kaya ini untuk generasi mendatang.

E. Rangkuman

Afrika memiliki sejarah panjang dan kaya dengan berbagai perkembangan dan kontribusi penting bagi dunia. Penduduk Afrika beragam dalam hal bahasa, budaya, dan persebaran geografis. Peradaban-peradaban kuno Afrika telah memberikan banyak kontribusi penting bagi dunia. Bukti fosil menunjukkan bahwa Afrika adalah tempat asal evolusi manusia. Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu. Migrasi keluar dari Afrika terjadi dalam beberapa gelombang, dimulai sekitar 100.000 tahun yang lalu. Penduduk Afrika terkonsentrasi di beberapa wilayah, seperti Afrika Utara, Lembah Nil, dan Afrika Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk termasuk iklim, kesuburan tanah, dan akses ke sumber daya air. Afrika memiliki keragaman bahasa yang tinggi, dengan lebih dari 2.000 bahasa yang berbeda. Bahasa-bahasa Afrika diklasifikasikan ke dalam beberapa keluarga bahasa utama, seperti Niger-Kongo, Afro-Asiatic, dan Nilo-Saharan.

F. Latihan

1. Bagaimana Perkembangan Awal Kehidupan Penduduk di Afrika?
2. Bagaimana Persebaran Penduduk di Afrika?
3. Bagaimana Keragaman Bahasa di Afrika?
4. Bagaimana Pusat-Pusat Peradaban di Afrika?

G. Rujukan

- Abdul Rahman. (2023). *Ekonomi Demografi dan Kependudukan* (S. E. , M. Prof. Dr. Nursini, Ed.). Nas Media Pustaka
- Adityas Arifianto. (2023). *Sejarah Ringkas Dunia Kuno 4 Benua : Dari Peradaban Lembah Sungai Nil Hingga Peradaban Pegunungan Andes*. Anak Hebat Indonesia.

- Amanda Paramesthi, Siti Khafifah Dwiyantri, & Dina Siti Logayah. (2023). Wilayah Afrika Utara/Asia Barat Daya. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 2(1), 22–28.
- Anisa. S, *Sejarah Peradaban Dunia Kuno Empat Benua*, (Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2020), Hal: 19-20.
- Daniel Blondel, *Kendala, Bahaya, dan Tantangan Abad XXI*, Jakarta: Komnas Indonesia untuk UNESCO Departemen Pendidikan Nasional, 2022, pp 13-15.
- Darsiti Soeratman.1965. *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern*: Jilid I. Yogyakarta: Vita.
- Gamal Komandoko, 2010, *Ensiklopedia Pelajar Dan Umum*, Penerbit Pustaka Widyatama, Yogyakarta, hlm. 678.
- Hollfelder, N., Breton, G., Sjödin, P., & Jakobsson, M. (2021). *The deep population history in Africa. Dalam Human Molecular Genetics* (Vol. 30, Nomor R1, hlm. R2–R10). Oxford University Press.
- Joshua J. Mark. (2018). The Kingdom of Kush. *World History Encyclopedia*
- Kevin Shillington. (2012). *History of Africa* (3 ed.). Palgrave Macmillan.
- Kirdi dipoyudo. 1997. *Afrika dalam Pergolakan*. Jakarta: Depdikbud
- M. Azmie Fadillah. (2019). *SEJARAH NEGARA ETHIOPIA* (Makalah)
- Muhammad Ibnu Fadillah. (2022). *Sejarah Afrika* (resume).
- Mukhlis Akhadi. (2021). *RADIOEKOLOGI RADIONUKLIDA KOSMOGENIK*. Deepublish.
- Riyadi. (2019). *SEJARAH AFRIKA DARI MASA KUNO SAMPAI MODERN* (1 ed., Vol. 1). UNESA PRESS.
- Rizem. A, *Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit Noktah, 2018), Hal: 85-86.
- Roberge, P. T. (1994). The formation of Afrikaans. [Dept. of Linguistics, Univ. of Stellenbosch].
- Sulistinah, Kuspriyanto. 2015. *GEOGRAFI REGIONAL DUNIA*. UNESA UNIVERSITY PRESS. Surabaya
- Thula Simpson. (2022). *History of South Africa: From 1902 to the Present*. Oxford University Press.
- Tim. 1984. *Perkembangan di Afrika dan Politik Luar Negeri RI*. Semarang: Deplu FISIP UNDIP
- Tim. 1992. *Perubahan di Afrika Bagian Selatan Serta Dampaknya Terhadap Politik Luar Negeri RI*. Bandung: UNPAJ PRESS
- Yuval Noah Harari. (2015). *Sapiens A Brief History of Humankind*. Vintage Publishing

BAB 2

PUSAT-PUSAT PERADABAN, KEBUDAYAAN KUNO DI AFRIKA MELIPUTI KARTAGO, AKSUM, KUSH SERTA KERAJAAN-KERAJAAN DAGANG DI AFRIKA BARAT.

A. Latar Belakang

Afrika barat adalah salah satu wilayah tertua dan paling kompleks di dunia. Orang-orang Afrika barat telah tinggal disana selama kurang lebih 300.000 tahun. Sisa-sisa manusia paling awal di Afrika barat berusia sekitar lebih dari satu juta tahun. Beberapa pemukim manusia paling awal di wilayah ini adalah orang San. Mereka adalah satu-satunya orang yang diketahui menggunakan bijih besi untuk pembuatan perkakas. Selama berabad-abad, banyak kelompok lain yang bermigrasi dan pindah ke wilayah tersebut. Termasuk populasi besar Austronesia dan kemudian suku Bantu dan masyarakat Afrika barat lainnya. Berbagai suku dan kelompok etnik selalu hidup berdekatan di Afrika barat, dan telah terjadi perkawinan campuran serta perdagangan di antara kelompok-kelompok ini. Hal ini telah menciptakan budaya yang beragam dan penuh warna di Afrika barat.

Kerajaan masyarakat di Afrika barat adalah kerajaan dan kepala suku yang diperintah oleh raja dan ratu. Hal ini terjadi sebelum kontak dengan Eropa dan perbudakan di Afrika. Kerajaan mereka sudah hadir pada milenium pertama masehi. Kerajaan di Afrika barat adalah Ghana, Mali, Songhai, dan Kongo.

Hal ini disebabkan pergejolan yang ada di Kartago terjadi antara Kartago dan bangsa Romawi. Serta bangsa Romawi mengklaim bahwa Kartago merupakan lawan terbesar bangsa Romawi pada saat itu. Terlihat dari sejarahnya Kartago kuno adalah peradaban yang berpusat di kota Kartago, yang terletak di Afrika utara di Teluk Tunis, sekarang adalah kota Tunisia. Peradaban tersebut didirikan sekitar tahun 814 SM. Kehidupan ekonomi di Kartago terlihat dari adanya kota pelabuhan kuno yang dijadikan pelabuhan luhur tertua. Saat itu terjadilah perdagangan yang sangat pesat bangsa Fenesia yang sudah berdagang di seluruh Mediterania selama satu abad lebih, mereka memperdagangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan penting bagi mereka dan disisi lain mereka juga memiliki keahlian khusus di bidang pasar logam berharga, seperti menjual tembaga timah, emas, dan perak. (Muhammad Wildan, Siti Maryam 2012,321)

B. Keadaan pusat-pusat peradaban di Afrika

Afrika memenuhi perkembangan sejarah, budaya, dan peradaban di seluruh benua. Seluruh ini akan berbagai dengan pusat-pusat peradaban dan kebudayaan. Teknologi, yang berkembang dan berkumpul, menciptakan warisan yang beragam dan berharga bagi manusia secara global, berbagai aspek kehidupan manusia, seperti agama, politik, ekonomi, seni, dan teknologi (Pouwels & Leftzion, 2000). Beberapa pusat peradaban dan kebudayaan yang paling penting dan berpengaruh di Afrika adalah sebagai berikut:

1. Mesir Kuno

Salah satu penguin paling terkenal dan rendah hati di dunia adalah Mesir Kuno. Terjun ke Sungai Nil, Mesir Kuno mencapai puncak kejayaannya selama era Dinasti Firaun. Kuil ini terkenal dengan piramida, patung megah, dan catatan sejarah kaya. Selain memiliki pengaruh yang signifikan pada matematika, astronomi, arsitektur, dan agama, penelitian Mesir Kuno telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan sistem penulisan hieroglif (Geoff & Emberling, 2011).

2. Kerajaan Mali

Salah satu negara terbesar di Afrika Barat adalah Kekaisaran Mali, yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mali. Dikenal karena ketekunan dan ketekunannya selama era Mansa Musa, negara ini menjadi pusat perdagangan dan interaksi sosial penting di Afrika Barat. Universitas terkenal Timbuktu, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian Islam di wilayah ini, adalah aset lain dari monarki Mali.

3. Kerajaan Zimbabwe

Orang-orang Zimbabwe adalah penduduk asli dari wilayah yang sekarang menjadi Zimbabwe. Daerah ini dikenal memiliki struktur batu besar, seperti Tembok Agung Zimbabwe, yang berfungsi sebagai hub untuk politik, ekonomi, dan agama di daerah itu. Zimbabwe dikenal karena integritas dan kekuatan dalam perdagangan emas (Thomas & Huffman, 2007).

C. Kebudayaan Kuno di Afrika

Kebudayaan kuno yang ada di Afrika adalah sebagai berikut:

1) Peradaban Kartago

Peradaban Kartago Pada tahun 264 SM, Kartago merupakan kota pelabuhan luhur yang terletak di pantai Tunisia modern. Didirikan oleh bangsa Fenisia pada pertengahan ratus tahun ke-9 SM. Kartago merupakan negara yang kuat, pada saat itu hanya Republik Romawi yang mampu menyaingi kekuasaan, kejayaan dan populasi Kartago. Kartago kuno adalah peradaban yang berpusat di negara kota Kartago, yang terletak di Afrika Utara di Teluk Tunis, yang sekarang adalah Tunisia. Peradaban tersebut didirikan pada tahun 814 SM. Semua jajahan Tirus, Kartago meraih kemerdekaannya sekitar tahun 650 SM dan mendirikan hegemoni di pemukiman Fenisia yang lain di seluruh Afrika Utara yang sekarang bernama Spanyol yang berlangsung hingga tahun 146 SM. Pada masa keemasan kota tersebut, pengaruhnya hingga ke sebagian besar Mediterania Barat.

Wilayahnya yang strategis berada di sebuah dataran berbatu antara dua pelabuhan alami yang ini menjadi suatu basis pelabuhan untuk melakukan perdagangan yang terjadi sehingga wilayah ini berhasil membangun perekonomiannya secara cepat. Kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Kartago ini yakni kepercayaan agama Fenisia (berasal dari agama Levant) suatu kepercayaan politeisme yang artinya banyak para dewa yang disembah. Akan tetapi, pada sekitar pertengahan abad ke-2 masehi, agama Kristen berkembang pesat, sehingga menjadi tempat perdagangan yang sangat pesat, bangsa fenisia yang sudah berdagang di seluruh Mediterania selama satu abad lebih. Pada saat itu perdagangan pun semakin ramai mereka memperdagangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan penting mereka dan di sisi lain mereka juga memiliki keahlian khusus di bidang pasar logam berharga, seperti menjual tembaga, timah, emas dan perak (Michael Kerrigan, 2016: 157).

Keruntuhan Kartago terjadi secara mengejutkan pada saat terjadinya perang Punik I sehingga terjadinya perang Punik selanjutnya yang terjadi sampai tiga kali perang, yaitu perang Punik I, Punik II dan perang Punik III.

- Perang Punik I

Perang punik pertama terjadi sekitar tahun 264-241 SM, merupakan perang Romawi dan Kartago yang terjadi di Sicily. Perang ini bermula dengan tentara Kartago memberikan bantuan kepada Mamertine dan akhirnya mereka melakukan pengkianatan dengan menentang dan menyerang balik tentara kartago. Selanjutnya peperangan penuh antara Kartago dan Romawi diawali dengan Roma yang mengirim pasukan untuk menaklukkan Messina, akhirnya Kartago marah dan

memberi bantuan pada Syracuse. Ketegangan ini berujung pada perang, untuk menguasai dan menakukkan Sisili (George, 2000: 15).

- Perang Punic II

Hannibal Barca, yaitu salah satu yang berasal dari keluarga Barcyd sama sekali tidak melupakan peristiwa kekalahan dalam Perang Punisia I. Pada 221 SM, Hannibal bersumpah bahwa dirinya sama sekali tidak mau berdamai dengan Romawi. Kekalahan yang dialami Kartago membuat semangat perbakaikan dan perombakan sistem keuangan, perluasan koloni ke Spanyol. Pada tahun 221 SM Hannibal menyerang Sekutu Romawi yaitu Seguntum di Spanyol. Akhirnya Pecahlah perang punisia II. Hannibal melakukan perekrutan kavaleri Numidi untuk penghancuran Roma.

- Perang Punic III

Pada 149 SM, Roma menciptakan serangkaian klaim untuk menghancurkan Kota Kartago dan untuk dipindahkan pada bagian lepas pantai Afrika. meletuslah Perang Punisia ketiga. Selama tiga tahun Aemilianus mencoba untuk mengepung kota Kartago sebelum pada akhirnya dapat menembus dinding, dan menjarah dan membakar Kartago. Roma ingin menghancurkan kota Kartago. Sampai akhirnya Kartago benar-benar dihancurkan. Warga Kartago di jadikan budak. Kota Kartago barulah dibangun kembali ketika masa kaisar Oktavianus dengan membuat Kartago sebagai kota koloni Romawi. (George, 2000: 221).

2) Peradaban Aksum

Sebagai sekelompok negara yang saat ini terdiri dari Eritrea dan Ethiopia, kerajaan Aksum pernah menjadi bagian dari Ethiopia, kerajaan Aksum pernah menjadi bagian dari wilayah itu. Karena perdagangan maritim dan perannya dalam penyebaran kekristenan di wilayah itu, negara ini terkenal. Tempat ini memiliki pohon megah yang sangat luar biasa dan sistem irigasi yang kuat serta pengaruh agama yang kuat di Timur Tengah (Stuart & Munro, 1991).

3) Peradaban Kush

Kush, sebuah kerajaan yang terletak di selatan Mesir, merupakan kerajaan penting di sepanjang bagian selatan Sungai Nil. Kebudayaan awal sebelum Kerajaan Kush adalah kebudayaan Kerma, yang berkembang antara tahun 2400 SM dan 1400 SM. Kerajaan Kush sendiri dikagumi dan dipengaruhi oleh Mesir kuno. Pengaruh ini berjalan dua arah yaitu Kerajaan Kush menginvasi Mesir dan menjadi Dinasti ke-25. Kerajaan ini memiliki dua ibu kota utama selama sejarahnya

yang panjang: Napata dan kemudian Meroe. Di Meroe, dikembangkan suatu bentuk tulisan unik yang belum dapat diuraikan sepenuhnya. Agama dan arsitektur mereka merupakan campuran inovasi Mesir dan lokal. Kerajaan Kush akhirnya berakhir ketika diserbu oleh Aksum.

Setelah pindah ke Meroe, Kerajaan Kush mulai benar-benar mengembangkan budaya uniknya sendiri. Berkenaan dengan organisasi politik, otoritas politik Kush tidak terorganisir seketat di Mesir. Para penguasa mempunyai kendali tertentu terhadap kepala daerah yang pada gilirannya memerintah masyarakat di desa-desa yang tersebar. Aspek penting lainnya dari organisasi politik Kush adalah penguasa perempuan. Pertama, ibu raja mempunyai pengaruh yang besar terhadap suksesi raja dan kemudian perempuan menjadi ratu yang berkuasa atau Candace dengan hak mereka sendiri.

Pengaruh budaya Mesir di Kush tidak pernah hilang sama sekali. Orang Kushi mengagumi budaya Mesir dan memasukkan aspek agama dan arsitektur mereka. Subsisten datang dalam bentuk tanaman seperti millet dan sorgum. Terdapat padang rumput di wilayah tersebut yang juga mendukung penggembalaan ternak. Ada juga daerah yang memiliki pepohonan yang memasok kayu keras dan arang. Pertambangan adalah industri penting di kerajaan ini. Salah satu industri terpentingnya adalah pengerjaan logam besi. Setelah pindah ke Meroe, mereka mengembangkan teknik pengerjaan besi yang dapat menyaingi sebagian besar teknik pengerjaan besi di dunia pada saat itu.

D. Kerajaan-kerajaan yang terlibat dalam perdagangan di Afrika barat

Kekuasaan dan perdagangan yang berperan penting untuk mengendalikan jalur perdagangan lintas benua di wilayah ini. Kerajaan-Kerajaan yang terlibat dalam perdagangan di Afrika Barat. Mereka memiliki keuntungan yang signifikan dalam memfasilitasi dan mengubah perdagangan antara negara-negara Afrika Barat dan wilayah lain, termasuk Eropa, Timur Tengah, dan mungkin Asia (Humphrey & Conrad, 1982). Beberapa negara terkenal yang terlibat dalam perdagangan di Afrika Barat meliputi :

1. Kerajaan Ghana

Republik Ghana, sering dikenal sebagai Wagadu, adalah salah satu negara terlemah dalam perdagangan Afrika Barat. Terletak di wilayah yang saat ini terdiri dari Ghana, Mali, dan Mauritania, Kerajaan Ghana terkenal dengan kendali dan pengawasan atas rute perdagangan emas

dan garam di wilayah itu. Penulis penulis seperti Al-Bakri dan Ibn Battuta membahas kesulitan dan kekuatan bangsa Ghana dalam pernyataan mereka (Willet,1960)

2. Kerajaan Mali

Empayar Mali adalah keturunan dari Kekaisaran Ghana dan negara terbesar di Afrika Barat. Tersebar di seluruh wilayah Mali, Niger, dan Senegal saat ini, Kekaisaran Mali terkenal dengan keberanian dan kekuatannya selama era Mansa Musa. Negara ini mendukung kepentingan emas dan garam perdagangan, serta berpartisipasi dalam reformasi Islam di wilayah itu. Pengetahuan tentang sejarah seperti "Tarikh al-Sudan" yang ditulis oleh Mahmud Kati memberikan gambaran tentang sejarah dan perdagangan dengan Mali (Pouwels &Leftzion (2000).

3. Kerajaan Songhai

Kerajaan Songhai adalah negara penerus Mali dan merupakan salah satu negara yang paling penting dalam perdagangan dengan Afrika Barat sebelum pecahnya Bangsa Terang. Terletak di wilayah yang saat ini terdiri dari Mali, Niger, dan Nigeria, Kerajaan Songhai terkenal karena kekayaan dan kuasaannya selama periode pemerintahan Askia Muhammad. Kerajaan ini memiliki universitas terkenal di Timbuktu dan mempromosikan perdagangan emas, garam, dan budak. Pengetahuan tentang sejarah seperti "Tarikh al-Fattash" oleh Abd al-Rahman al-Sa'di memberikan informasi tentang sejarah dan perdagangan dengan Kerajaan Songhai (John & Hunwick,2003).

E. Ringkasan

Afrika memiliki sejarah,budaya,dan peradaban yang kaya di seluruh benuanya. Beberapa pusat peradaban dan kebudayaan yang penting di Afrika adalah Mesir kuno, kerajaan Mali, dan kerajaan Zimbabwe. Mesir kuno dikenal sebagai karena piramida dan pengetahuan matematika, astronomi, arsitektur, dan agama mereka. Kerajaan Mali adalah pusat perdagangan dan pendidikan Islam di Afrika barat, sementara kerajaan Zimbabwe terkenal karena perdagangan emas dan struktur batu besar mereka. Ada juga berbagai kebudayaan kuno di Afrika termasuk peradaban Kartago, peradaban Aksum, dan peradaban Kush. Peradaban Kartago adalah kota pelabuhan yang terkenal di Tunisia yang memiliki pengaruh besar di Mediterania barat. Peradaban Aksum terkenal karena perannya dalam perdagangan maritim dan penyebaran kekristenan di wilayah itu. Sedangkan kerajaan Kush adalah kerajaan yang penting di sepanjang sungai Nil dengan pengaruh budaya Mesir dan penguasa perempuan yang kuat. Selain itu, terdapat kerajaan-kerajaan yang terlibat

dalam perdagangan di Afrika barat, seperti kerajaan Ghana, Mali, dan Songhai. Kerajaan Ghana mengendalikan rute perdagangan emas dan garam, kerajaan Mali terlibat dalam perdagangan emas, garam, dan reformasi Islam. Sedangkan kerajaan Songhai menjadi negara terbesar dalam perdagangan dengan Afrika barat. Perkembangan sejarah, budaya, dan peradaban di Afrika menciptakan warisan yang beragam dan berharga bagi manusia secara global. Ini memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, seperti Agama, politik, ekonomi, seni, dan teknologi. Pengaruh Afrika dapat dilihat dalam berbagai pusat peradaban dan kebudayaan yang penting di seluruh benua.

F. Latihan

1. Bagaimana pusat-pusat peradaban dan kebudayaan kuno di Afrika?
2. Bagaimana pusat peradaban dan kebudayaan kuno di kerajaan Kartago ?
3. Bagaimana pusat peradaban dan kebudayaan kuno di kerajaan kust?
4. Bagaimana pusat peradaban dan kebudayaan kuno di Kerajaan Aksum?

G. Rujukan

Munro-Hay, Stuart. Aksum: An African Civilisation of Late Antiquity. Edinburgh University Press, 1991.

Levtzion, Nehemia, dan Randall L. Pouwels. The History of Islam in Africa. Ohio University Press, 2000.

Emberling, Geoff. Nubia: Ancient Kingdoms of Africa. Institute for the Study of the Ancient World, 2011.

Huffman, Thomas N. Handbook to the Iron Age: The Archaeology of Pre-Colonial Farming Societies in Southern Africa. University of KwaZulu-Natal Press, 2007.

Darsiti Soeratman. 1965. Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern: Jilid I. Yogyakarta: Vita.

Kirdi Dipoyudo. 1983. Afrika Dalam Pergolakan 2. Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and International Studies.

Soepratigno. 1992/1993. Sejarah Afrika: Tinjauan Umum Dan Dilema Perjuangan. Malang: IKIP Malang.

Rawlins, George. 2000. History of Phoenicia. The Project Gutenberg Etext of History of Phoenicia. Vol 5: 2.

Kerringan, Michael. 2016. Mengungkapkan Rahasia Naskah-Naskah Kuno. Jakarta. PT Alex Media Komputindo.

104 Instructional Development Journal (IDJ), Vol. 5, No. 2, Agustus 2022, Hal. 94-107

Fink, A. (2010). Conducting research literature reviews: From the internet to paper. SAGE Publications

Willett, Frank. "Ife and Its Archaeology." The Journal of African History 1 (1960)
Levtzion, Nehemia, dan Randall L. Pouwels. The History of Islam in Africa. Ohio University Press, 2000

Conrad, David C., dan Humphrey J. Fisher. African Swidden Agriculture: An Interpretation of the Songhay Example*. Clarendon Press, 1982.

Hunwick, John O. Timbuktu and the Songhay Empire: Al-Sadi's Tarikh al-Sudan down to 1613 and Other Contemporary Documents. Brill, 2003.

BAB 3

ISLAM DI AFRIKA

MASUKNYA *MUBALIGH* DALAM MENYEBARKAN ISLAM DI AFRIKA DAN DAMPAKNYA

A. Latar Belakang

Perkembangan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sejak awal kemunculannya menuai banyak reaksi karena mendorong adat istiadat yang telah dilakukan oleh bangsa arab khususnya *kafir quraish* di mekah yang notabene sebagai penyembah berhala. Namun perlahan tapi pasti Islam mulai diterima oleh hati masyarakat apalagi ketika umar bin khattab terislamkan lewat senandung surat *thaha* yang dibacakan oleh adiknya sendiri, sehingga semakin kuatlah pondasi agama Islam. Islam sendiri merupakan agama pembebas bagi kalangan tertindas dan *hegemoni* penguasa yang *non* Islam seperti Persia dan Romawi, acap kali dianggap agama yang identik dengan darah dan pedang. Anggapan tersebut sama sekali tidaklah terbukti karena Islam merupakan agama pembela bagi kalangan tertindas, tidak terkecuali di wilayah Afrika, khususnya sub-Sahara (Mahmud, 1997).

Pada saat islam disebarkan, telah banyak sekali penyiksaan terhadap sesama manusia dan perbudakan yang terjadi dimana-mana. Karena terjadi banyak penyiksaan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan perbudakan, Rasulullah beserta para sahabat memutuskan untuk *hijrah* ke *habsy* disitulah pertama kali ada kontak Islam dengan Afrika dan mendapatkan perlakuan baik dari masyarakat maupun dari penguasa yaitu Raja Najjasyi atau Negus. Kemudian kontak tersebut meluas dan tersebar hingga zaman modern ini (Prothero, 2015).

Afrika adalah tempat dimana terdapat berbagai bangsa dan kebudayaan. Afrika juga sebuah negeri dengan pertentangan yang sangat mencolok dan keindahan yang liar. Di sana terdapat banyak masalah termasuk perang, kelaparan, kemiskinan, dan masalah penyakit. Realitas wilayah Afrika sendiri merupakan daerah yang berada dibawah kekuasaan kekaisaran Romawi, yaitu sebuah kekaisaran yang super power pada masa itu. Dalam sejarah peradaban dunia, dikatakan bahwa kaisar-kaisar Romawi dikenal sebagai penguasa yang kejam, *dzalim* dan berdarah penjajah. Namun pada kenyataannya, justru Islam dapat berkembang di Afrika

dan populasi penduduk muslimnya mencapai 75 juta dari 500 juta jumlah populasi umat muslim seluruh dunia (Sumanto, 2011).

Di Afrika juga terdapat dinasti-dinasti/kerajaan-kerajaan yang ikut terlibat dan mewarnai Islamisasi di wilayah tersebut. Secara umum dunia Islam Afrika mewakili salah satu keragaman budaya Islam yang mengagumkan sesuai dengan struktur kesukuan bangsa di benua tersebut. Para *sufi* telah membawa Islamisasi yang damai dan memberi citra pada pengukuhan akan kesan kedamaian, Benua Afrika juga memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari benua-benua lain di dunia, yaitu adanya negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim tapi dipimpin oleh non muslim (Prothero, 2015).

Berkaitan dengan hal diatas, makalah ini disusun untuk membahas bagaimana proses masuknya agama Islam di afrika, bagaimana para mubaligh menyebarkan agama Islam, dan dinasti/kerajaan yang telah berkuasa dalam sejarah perjalanan Islam di Afrika, serta pengaruh yang Islamisasi di benua Afrika sendiri.

B. Proses Masuknya Agama Islam di Afrika

Sejarah mencatat bahwa Islam sudah dikenalkan di Afrika sejak zaman Rasulullah SAW khususnya Ethiopia di Afrika Timur. Pada tahun kelima kerasulannya, Nabi SAW menetapkan Habsyah (Ethiopia) sebagai negeri tempat pengungsian, karena Negus (raja) negeri itu adalah seorang yang adil. Rombongan pertama sejumlah sepuluh orang pria dan empat orang wanita, diantaranya Usman bin Affan beserta istrinya Rukayyah putera. Rasulullah SAW, Zubair ibn Awwam, dan Abdurrahman ibn Auf. Kemudian menyusul rombongan kedua sejumlah hampir seratus orang, dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Usaha orang-orang Quraisy untuk menghalangi hijrah ke Habsyah ini, termasuk membujuk Negus agar menolak kehadiran umat Islam, gagal. Disamping itu, semakin kejam mereka memperlakukan umat Islam, semakin banyak orang yang masuk agama ini (Badri, 2015).

1. Proses perkembangan Islam di Afrika Utara

Pada awalnya Afrika Utara sebelum datangnya Islam didominasi oleh kristen yang memiliki kondisi yang sangar memprihatinkan seperti rusaknya pemerintahan dan

perundang-undangan, maraknya penyusunan, adanya penjajahan dari Romawi, Rusaknya. keadilan sosial dan lain sebagainya (Ali, 1998).

Peradaban Islam di Afrika Utara bermula dari serangkaian penaklukan bangsa Arab pada abad ke-7 dan ke-8. Antara serangkaian penaklukan tersebut dan pertengahan abad ke-13, sejarah wilayah ini sejalan dengan periode kekhilafahan dalam sejarah perkembangan Timur Tengah dan merupakan varian dari tipe peradaban Islam Timur Tengah. Pada abad 12 dan 13 beberapa pemerintah Muslim di Afrika Utara mulai membentuk sebuah konfigurasi institusional yang menyerupai konfigurasi institusional imperium Seljuk di Iraq dan Iran dan imperium Mamluk di Mesir dan Syiria. Pada abad 16, sebagian besar wilayah Afrika Utara (kecuali Maroko), sebagaimana beberapa pemerintahan bangsa Arab di Timur Tengah, jatuh ke tangan dominasi Usmani yang mengantarkan institusi Usmani ke Aljazair dan membantu mengkonsolidasikan bentuk- bentuk Islam bangsa Afrika Utara. Pada abad 18 dan 19, beberapa masyarakat tersebut dihancurkan oleh kompetisi ekonomi bangsa Eropa dan akhirnya jatuh ke dalam pemerintahan kolonial (Ira, 2000).

Negara Afrika Utara yang pertama kali ditaklukkan oleh Islam yaitu Mesir yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Mesir secara keseluruhan. berada di bawah kekuasaan Islam-Arab setelah penyerahan Iskandariyah (Alexandria), ibu kota Mesir dan ibu kota kedua bagi kekaisaran Romawi Timur pada tahun 642 M/21 H. Setelah Khalifah Umar wafat, kepemimpinan digantikan oleh Khalifah Usman ibn Affan. Pada masa Khalifah Usman (644-656 M), Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa di Persia, Transoxania, dan Tabnistan berhasil direbut. Penaklukan Tunisia pun dilanjutkan pada masa pemerintahan Dinasti Umayyad khususnya ketika masa pemerintahan Muawiyah (Badri, 2015).

Tunisia merupakan sebuah pusat natural bagi rezim dan masyarakat Arab Muslim. Ketika masyarakat Timur Tengah yang dalam berabad-abad telah mengalami naik turunnya beberapa imperium di carthaginian dan beberapa wilayah Romawi hanya

Tunisia yang telah mengembangkan infrastruktur perkotaan, pertanian, dan perdagangan yang sangat diperlukan bagi eksistensi sebuah pemerintahan yang memusat. Yang awalnya kekuasaan Bizantium, maka Tunisia memiliki sejumlah kader yang diperlukan bagi sebuah rezim yang memusat. Setelah Muawiyah berhasil menaklukkan Tunisia yang juga dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik, Khalifah Walid ibn Abdul Malik yang memerintah setelah ayahnya, berhasil menaklukkan Maroko dan Aljazair (Badri, 2015).

2. Proses perkembangan Islam di Afrika Barat

Perkembangan Islam di Afrika Barat sangat berkaitan erat dengan perkembangan Islam di Afrika Utara, khususnya Sudan. Hal ini dikarenakan kerajaan Sudan menguasai beberapa wilayah yang berada di Afrika Barat seperti Kawkaw, Takrur, Ghana, dan Bornu. Penaklukan bangsa Arab atas Afrika Utara meningkatkan interest terhadap beberapa jalur perdagangan Sahara dan menguatkan hubungan antara bangsa Arab, Berber, Sahara, dan Sudan. Bangsa Berber di Afrika Utara memeluk Islam Kharij pada abad 7, sedang bangsa Berber di Mauritania memeluk Islam pada abad 9. Pada akhir abad 10 dan 11 sebagian besar kota perdagangan di Sudan telah memiliki sebuah perkampungan Muslim, dan beberapa warga muslim menjalankan peran penting sebagai penasihat dan beberapa jabatan lainnya di beberapa istana penguasa lokal. Untuk mendapat dukungan administratif, legitimasi, dan hubungan dagang, para penguasa Kawkaw, Takrur, Ghana, dan Bornu memeluk Islam pada akhir abad 10 dan 11. Meskipun Islam telah menjadi tata peribadatan imperial dan telah menjadi agama bagi kalangan elit negara dan elit perdagangan, namun warga pertanian tetap mempertahankan keyakinan tradisional mereka (Ira, 2000).

Pada abad II Takrur merupakan kerajaan yang terbesar. Kerajaan ini mengeksport emas dan budak ke Afrika Utara untuk ditukarkan dengan wool, tembaga, dan manik-manik. Takrur dengan gigih melancarkan jihad melawan kekuatan non muslim sekitarnya, tetapi kemudian kerajaan ini jatuh dalam kekuasaan Mali pada abad 13, selanjutnya mengalami disintegrasi. Selanjutnya Takrur digantikan oleh

Ghana sebagai pusat bagi Islam di wilayah Barat Sudan. Dengan kehancuran rezim Almoravid pada abad 12, Ghana menjadi Kerajaan yang paling kaya di Sudan, tetapi pada abad 13, beberapa wilayah jajahannya melepaskan diri dari kekuasaan pusat dan kerajaan Ghana mengalami periode disintegrasi. Kemudian sejak awal abad 13 sampai akhir abad 16, Mali menjadi rezim paling berpengaruh di wilayah barat Sudan dan menjadi pusat Islam yang utama (Ira, 2000).

Pada akhir abad 16 imperium Mulai dilanda kehancuran. Dengan hancurnya imperium Mali, kerajaan Kawkaw yang sama tunduk terhadap hegemoni Mali mencapai kemerdekaannya. Kondisi demikian ini memungkinkan seorang pimpinan lokal bernama Sunni Ali (1469-1492) mendirikan sebuah imperium baru, Songhay, di wilayah Niger dan wilayah barat Sudan dan menguasai jalur perdagangan Sahara. Imperium Songhay dihancurkan oleh invasi bangsa Maroko pada tahun 1591, dan arma atau keturunan pasukan penyerbu menjadi elit penguasa di wilayah Nigeri (Ira, 2000).

3. Proses perkembangan Islam di Afrika Timur

Masuk dan masuknya Islam di Afrika Timur bukanlah suatu hal yang baru. Dengan kata lain, jauh sebelum kerajaan-kerajaan Islam, Islam sudah mulai dikenal di Afrika Timur, khususnya Ethiopia. Pada masa kerasulannya, Nabi Muhammad SAW dan menetapkan Abyssinia (Ethiopia) sebagai tempat perlindungan, karena Negus (raja) negeri itu adalah orang yang adil. Singkat cerita saat itu banyak orang Ethiopia yang memeluk Islam (Badri, 2015).

Selain Ethiopia, salah satu negara Islam di Afrika Timur adalah Somalia. Pada abad 3 H. sekelompok masyarakat berhijrah ke Somalia. Sehingga dengan demikian, dapat diduga bahwa masyarakat Somalia mulai memeluk Islam pada abad 3 H. Berkembangnya peradaba Islam di Afrika Timur, tidak sepenuhnya disebabkan oleh migrasi, pemukiman, dan pembentukan kota-kota baru sebagai pusat pertemuan antar pedagang, pemindahan ide dan konsep, dan sebagai tempat tinggal pedagang-pedagang muslim (Ira, 2000).

4. Proses perkembangan Islam di Afrika Selatan

Sebagaimana di negara-negara Afrika lainnya, perkembangan Islam di Afrika Selatan juga cukup menarik untuk dibahas dalam kajian ini. Sejarah Islam mencatat bahwa salah satu penyebar Islam di Afrika Selatan tidak jauh berbeda dengan penjajahan pertama di Cape oleh Belanda. Tidak begitu lama setelah Jan Van Riebeeck yang telah mendarat di Cape sebagai Good Hope pada tahun 1652 yang mana seorang muslim pertama, Ibrahim dari Batavia (Jakarta) telah dibawa kesana sebagai seorang tahanan (Suleman, 1981).

Orang buangan pertama adalah Syaikh Yusuf dari Makassar yang dipercaya sebagai pionir Islam di Afrika Selatan. Kehidupan Syaikh Yusuf dihubungkan dengan kedatangan muslim pertama di Afrika Selatan dan sejarah pendirian Islam di tanah Afrika Selatan. Maka dari itu, sejarah Islam di Afrika Selatan tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Syaikh Yusuf (Suleman, 1981).

Setelah Syaikh Yusuf Makassar, perkembangan Islam di Afrika Utara juga tidak lepas dari seorang tokoh asal Tidore yakni Tuan Guru Imam Abdullah ibn Qadni Abd al-Salam. Tuan Guru Imam Abdullah ibn Qadni Abd al-Salam adalah seorang ulama yang berperan penting dalam pengembangan Islam di Afrika Selatan. Ia adalah ulama asal Tidore (Maluku Utara) yang diasingkan ke Cape pada tahun 1780 karena menentang praktek monopoli, perbudakan, dan kerja paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Selain pengasingan di Cape Town ia berhasil merampungkan sejumlah karya besar, antara lain Ma'rifah al-Islam wa al-Iman yang berisi tentang ilmu qalam, tauhid, dan fiqh. Setelah dibebaskan ia mendirikan sebuah sekolah madrasah untuk mendidik para budak dan warga kulit hitam yang telah memeluk agama Islam. Pendidikan Islam yang dikembangkan Tuan Guru di Cape Town didasarkan pada filsafat pendidikan Ash'ari yang mencakup taqdir, iradah, taqwa, iktisab, qadha, dan qadhar. Konsep filsafat pendidikan inilah yang menjadi dasar pembentukan pribadi muslim yang berakhlakul karimah (Bunyamin, 2004).

5. Proses perkembangan Islam di Afrika Tengah

Islam masuk di Afrika Tengah bersamaan ketika Islam masuk Chad pada abad ke-11. Afrika tengah sangat berdekatan dengan Chad. Sudan, Kamerun atau Niger, dimana negara-negara tersebut banyak menampung suku Fulani yang sangat dikenal sebagai pemeluk Islam yang sangat setia dan kehidupannya nomaden. Menurut sejarah suku Fulani termasuk suku pertama di Afrika yang memeluk Islam. Saat ini, ada sekitar 40,000 orang Bagirmi Fulami di Afrika Tengah dan 100% adalah pemeluk Islam. Suku kedua yang memasuki Afrika Tengah yaitu suku Runga pada abad ke-17, mereka berasal dari lembah Sungai Niger, dan akhirnya menyebar ke Sudan, Chad, dan Afrika Tengah. 80% suku Runga adalah pemeluk Islam dan menganut paham Sunni (Bunyamin, 2004).

Walaupun jumlahnya hanya 15%, namun pengaruh mereka sangat membanggakan di Afrika Tengah. Hal ini karena mereka sangat menguasai dunia perdagangan, akhir-akhirini karena terjadi kesulitan ekonomi, Afrika Tengah banyak menerima investasi dari negara-negara Arab. Tentu saja hal tersebut membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Afrika Tengah, antara lain banyaknya mahasiswa yang belajar di Sudan dan Saudi Arabia, pengembangan masjid semakin marak, demikian juga pembangunan sekolah-sekolah Islam lengkap dengan laboratorinya semakin berkembang di Afrika Tengah. Perkembangan Islam di Afrika Tengah akan semakin baik. bila para da'i, mubaligh, dan para pedagang muslim dapat mengajak 35% masyarakat Afrika Tengah yang masih animis, menjadi pemeluk Islam (Bunyamin, 2004).

Sebagian besar kaum muslim di Afrika Tengah bermukim di utara dekat perbatasan dengan Chad. Di mana dari mereka inilah tampil Michel Djaotodia sebagai presiden muslim pertama negara itu, dan pendukungnya para perwira di Koalisi Celica (Bunyamin, 2004).

C. Cara *Mubaligh* Menyebarkan Agama Islam di Afrika

Islam masuk ke Afrika sub-Sahara melalui tiga wilayah; pertama, dari bagian utara. Islam mulai menyebar mulai tahun 1000 an M di beberapa wilayah Sudan yaitu Niger dan Chad. Islamisasi terjadi melalui migrasi pedagang-pedagang muslim, sejumlah guru, murid, dan juga datangnya pedagang dari Mediterania sehingga terbentuklah masyarakat muslim minoritas di beberapa wilayah Afrika sub-Sahara. Dari kelompok inilah kemudian Islam mengempakkan sayapnya dengan cara mengislamkan penguasa-penguasa lokal dan kemudian menyebar luas ke masyarakat dan para petani (Muhsin, 2002).

Kedua, melalui bagian Timur, yaitu dari Zayla yang sekarang dikenal dengan nama Somalia, mulai abad ke-9. Pengislaman wilayah ini hampir sama dengan bagian-bagian lain Sudan yaitu melalui perdagangan, akan tetapi mayoritas berasal dari Mesir dan Saudi Arabia. Ketiga, melalui bagian selatan yaitu Afrika selatan. Islam berkembang dimulai pada masa penjajahan Belanda yang tergabung dalam dua gelombang. Gelombang pertama adalah orang-orang dari Melayu, Bengal, Malabar dan Madagaskar yang dibawa oleh pemerintah Belanda ke Afrika Selatan sebagai tahanan dan budak. Gelombang kedua adalah para pekerja dan pedagang datang dari Calcuta, Madras, Bombay dan Gujarat yang datang pada abad ke-19 (Muhsin, 2002).

Selain Islamisasi dilakukan secara formal oleh al-Murabithun dan al-Muwahhidun, Islamisasi juga dilakukan dengan cara kultural. Islamisasi tersebut dilakukan melalui media perdagangan. Mereka membangun pemukiman pedagang muslim di wilayah Sudan. Sambil melakukan proses perekonomian, mereka juga melakukan dakwah Islamiah. Di sepanjang bagian barat Afrika sub-Sahara, Islam dapat diterima dengan mudah oleh suku Soninke dan nenek moyangnya suku Tokolor. Dari sini penyebaran Islam ke timur sampai ke lembah Senegal. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses Islamisasi di Sub-Sahara persis seperti di Nusantara, yaitu melalui jalur perdagangan (Muhsin, 2002).

Penyebaran Islam di Afrika sendiri tidak terlepas dari peran para *Mubaligh*, *Mubaligh* sendiri merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam baik secara lisan ataupun tulisan. Para *Mubaligh* menyebarkan Agama Islam di Afrika menggunakan beberapa cara dan metode, seperti:

a. **Penyebaran melalui pengajaran dan dakwah**

Para *mubaligh* mengajarkan dan mengembangkan agama Islam dengan mengajarkan tentang keagamaan, praktik, dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Afrika. Ini dilakukan melalui pengajaran secara langsung, mengajarkan bahasa Arab, dan mengembangkan pendidikan Islam (Wildan, 2002).

b. **Penyebaran melalui perdagangan**

Para *mubaligh* menggunakan perdagangan sebagai alat untuk menyebarkan Islam di Afrika. Mereka membangun pemukiman pedagang muslim di wilayah Sudan dan melakukan proses perekonomian, serta mengajarkan Islam kepada masyarakat lokal (Wildan, 2002).

c. **Penyebaran melalui pemerintahan**

Para *mubaligh* mengutus pasukan muslim untuk mengutusi wilayah di Afrika, seperti Amr ibn 'Ash yang berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan pasukan Bizantium pada tahun 639-644 M (Wildan, 2002).

d. **Penyebaran melalui pengembangan peradaban**

Para *mubaligh* mengembangkan peradaban di Afrika, seperti dengan membangun masjid, sekolah, dan institusi pemerintahan yang membawa kegemilangan dalam membangun peradaban Islam (Wildan, 2002).

e. **Penyebaran melalui toleransi beragama**

Para *mubaligh* tidak memaksa penguasa setempat untuk memeluk Islam, kecuali atas kemauannya sendiri. Dalam penaklukan wilayah di Afrika, pasukan Islam tidak memaksa penguasa setempat untuk memeluk Islam, kecuali atas kemauannya sendiri (Wildan, 2002).

f. Penyebaran melalui pemerintahan otonom

Para *mubaligh* memberikan hak untuk meneruskan pemerintahan otonom dengan kewajiban membayar pajak perlindungan atau Jizyah, serta memberikan perlindungan terkait hak kebebasannya dari khalifah (Wildan, 2002).

D. Kerajaan/Dinasti yang Berkuasa dalam Proses Islamisasi di Afrika

1. Dinasti Almoravides (Murabithun)

Al-Murabithun merupakan dinasti yang menguasai Maghribi dan Spanyol (Andalusia) pada tahun 558-541 H / 1056-1147 M. Asal usul dinasti ini adalah berasal dari suku Lamtunah, tepatnya salah satu anak dari suku Sanhaja. Mereka sering disebut al-Mulassimun (mereka yang bercadar). Dinasti al-Murabithun pada mulanya adalah sebuah perkumpulan militer keagamaan yang didirikan pada pertengahan abad ke-11 M, oleh sebuah gereja Muslim yang saleh di sebuah ribath (di sinilah terbentuknya namanya dari dinasti al-Murabithun), sejenis pertapaan masjid berbenteng di sebuah pulau di Senegal. Anggota pertama sebagian besar berasal dari suku Lamtunah, cabang dari suku Sanhaja, masyarakat nomaden gurun Sahara, dan menurut adat istiadat keturunannya, dari suku Thawariq (Touareng) Rephrase (Maryam, 2017).

Pergerakan dinasti al-Murabitun dimulai sekitar tahun 1056 M oleh Abdullah bin Yassin, seorang ulama Islam Maroko yang berdakwah kepada masyarakat Samhaja yang tinggal di pedalaman gurun Sahara. Dia membangun benteng di pulau Niger. Benteng atau rivas ini dibangun di sepanjang perbatasan antara dunia Islam dan non-Islam. Pasukan yang ditempatkan di Rivas biasanya adalah sukarelawan, dan ketika mereka tidak berperang melawan orang-orang kafir di seberang sungai, mereka menghabiskan waktunya untuk mengingat Allah (Maryam, 2017).

Di bawah pemimpin spiritual mereka Abdullah ibn Yassin dan panglima militer Yahya bin Umar, mereka berhasil memperluas wilayah mereka hingga Wadi Dara. Kemudian pada tahun 447/1055 M, ia juga berhasil menaklukkan kerajaan Sijilmasat yang diperintah oleh Mas'ud bin Wanuddin al-Maghrawi. Ketika Yahya bin Umar wafat, kedudukannya digantikan oleh adiknya Abu Bakar bin Umar. Gerakan al-Murabitun terus menyebar

dengan sangat pesat hingga Maroko yang sedang bergejolak begitu pula Andalusia ditaklukkan oleh dinasti al-Murabitun, menyuntikkan energi baru dan mengingatkan kita akan potensi dinamis Islam terapan. Abu Bakar kemudian menaklukkan wilayah Sahara Maroko pada tahun 450 M/1058 M dan mencapai Atlas Tinggi (Hit Atlas). Hal ini diikuti dengan serangan terhadap Maroko tengah dan selatan Ia kemudian berperang melawan kaum Bhargawata yang diyakini sebagai pengikut ajaran sesat (Maryam, 2017).

Akibat penyerangan ini, Abdullah bin Yasin terbunuh pada tahun 451 M/1059 M Sejak saat itu, Abu Bakar mengambil alih kekuasaan penuh dan secara bertahap berhasil mendirikan kesultanan. Abu Bakar berhasil menaklukkan daerah sebelah utara atlas tinggi dan akhirnya pada 462 H/1070 M ia dapat menaklukkan daerah Marakech (Maroko). Prestasi dan karir politik dinasti al-Murabitun mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin pada tahun 1061 hingga 1107 M Yusuf ibn Tashfin menjadi penguasa tunggal dinasti al-Murabitun, negara barbar yang mampu menguasai sebagian besar daratan Afrika Utara sebaliknya, saat itu ada Reconquista Kristen (Maryam, 2017).

2. Dinasti Aghlabiyah

Dinasti Aghrabiya adalah dinasti Islam Afrika Utara yang memerintah selama kurang lebih 100 tahun (800-909 M) Wilayahnya meliputi Ifriqiyah, Aljazair, dan Sisilia Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab Agrabiyyah sebenarnya adalah sebuah dinasti kecil pada masa Abbasiyah, dan penguasanya berasal dari keluarga Bani al-Aghlab, oleh karena itu dinamakan Agrabiyyah. Kemunculan dinasti ini dimulai ketika Bagdad berada di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid Dua bahaya besar mengancam otoritasnya di Afrika Utara bagian barat Yang pertama dari Dinasti Syiah Idris, dan yang kedua dari Dinasti Khawarij (Siti, 2016).

Rezim Agrabiya pertama berhasil meredam keresahan yang muncul dari kaum barbar Kharijiyya di wilayah tersebut Kemudian pada tahun 827 M, Aghrabiya yang dipimpin oleh Ziyadatullah I mengerahkan seorang panglima angkatan laut yang terdiri dari 900 kavaleri dan 10000 infanteri di bawah pimpinan panglima Asad bin Furat untuk menyerang pulau terdekat dengan Tunisia yaitu Sisilia Ini adalah ekspedisi laut terbesar. Pasukan Agrabiya juga merebut kota Regusa (890 M) di pesisir Yugoslavia dan pulau Malta (869 M), serta

menyerang pulau Corsica dan Mallorcas, serta kota Portofino di pantai barat Kota Athena di Yunani berada dalam jangkauan untuk menaklukkan Italia (890) seranganmu Keberhasilan penaklukan ini membuat Dinasti Agrabia menjadi sangat kaya, dan para penguasanya sangat tertarik untuk mengembangkan Tunisia dan Sisilia Ziyadatullah I membangun Masjid Agung Kailuan, Amir Ahmad membangun Masjid Agung Tunis, dan juga membangun hampir 10000 benteng di Afrika Utara (Siti, 2016).

3. Dinasti Muwahhidun

Dinasti Muwahhidun Dinasti Muwahhidun (1121-1269 M = 148) Dinasti Muwahidin adalah dinasti Islam yang berjaya selama 148 tahun di Afrika Utara dan Spanyol, didirikan oleh Muhammad bin Tumart (1080-1130 M), yang dikenal dengan nama Ibnu Tumart Dinasti Muwahhidun, kelompok monoteistik, didasarkan pada prinsip khotbah Ibnu Tumart yang menentang ideologi Tajassum Pemahaman ini berasumsi bahwa Tuhan mempunyai wujud (personifikasi), yang berkembang di Afrika Utara sebagai bentuk ajaran dari dinasti al-Murabitun (1056-1147 M). Ajaran al-Murabitun menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat ketuhanan, seperti tangan Tuhan, tidak dapat dijelaskan dan harus dipahami secara harfiah (Siti, 2016).

Menurut Ibnu Tumat, pemahaman Tajisme sama dengan Shurik, dan yang menganut paham tersebut sama dengan musyrik Secara umum khotbah Ibnu Tumart murni dan bukan karena alasan politik, ia hanya ingin melestarikan tauhid Namun, ketika kekuasaan dinasti al-Murabitun sudah lemah, Ibnu Tumart merasa dakwahnya diterima dan didukung oleh suku-suku barbar seperti Halaka, Jadmiwa, dan Jawfisa, sehingga ia merebut kekuasaan pada tahun 1120 M, ia menobatkan dirinya sebagai al-Mahdi dan menggantikan dinasti Murabitun sebagai penguasa al-Muwahhidun di Afrika Utara Penerus Ibnu Tumat adalah Abdul Muqmin dari suku Zanata, yang menyebarkan ajaran gurunya ke seluruh Atlas dan Rif (Afrika Utara) Pada tahun 1147 ia berhasil menguasai wilayah Almoravid, Aljazair (1152), Tunisia, dan Tripolitania (1160) (Siti, 2016).

4. Dinasti Fatimiyyah

Dinasti Fatimiyyah atau dikenal juga dengan nama Al-Fatimiyun merupakan satu-satunya

dinasti Syiah dalam Islam yang namanya konon diambil dari Fatima al-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Kebangkitan dinasti ini terjadi di tempat yang sekarang dikenal sebagai Tunisia (Ifriqiyah). Munculnya dinasti ini disebabkan oleh adanya tuntutan adanya imāf sebagai khalifah atau penerus nabi setelah wafatnya. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa gerakan Syiah merupakan protes politik terhadap penguasa dan respon terhadap penguasa dunia Islam saat itu yang berpusat di Bagdad. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah (909-1171) di Afrika Utara yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam (Sounders, 1981).

Dinasti ini dibangun berdasarkan konsep Syi'ah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fathimah (putri Nabi Muhammad SAW). Kata Fatimiyah diyakini berasal dari Fatima. Karena para pengikutnya mengadopsi silsilah Fathimah as-Zahra binti Rasulullah. Dinasti Fatimiyah disebut juga Dinasti Ubaidiya, dan pendiri dinasti tersebut adalah Abu Muhammad Ubaidillah al-Mahdi (297H-322H). Kaum Fatimiyah disebut juga kaum Alawi karena masih berkerabat dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada tahun , Abdullah bin Maymun menunjuk pengikutnya yang paling bersemangat, Abu Abdullah al-Husain, sebagai pemimpin gerakan Syiah Ismaili pada tahun 874 M. Ia mengaku sebagai orang Yaman dan wakil gerakan al-Mahdi hingga abad ke-9. Ia sampai di Afrika Utara dan berkat propagandanya berhasil mendapatkan simpati dari suku-suku barbar, khususnya suku Kutama, (Hitti, 2018).

Pada tahun 945M, Dinasti Fatimiyah mengkonsolidasikan kekuasaannya di Tunisia dan berhasil menguasai tidak hanya Sisilia tetapi juga beberapa wilayah sekitarnya. Perkembangan terpenting pada masa pemerintahan al-Mu'izz adalah ia memiliki seorang jenderal ulung, Jauhar. Pada awal masa pemerintahannya, Jauhar memimpin pasukan penakluk ke Samudera Atlantik, dan kendali Fatimiyah atas seluruh Afrika Utara terbentuk. Kemudian al-Mu'izz mengalihkan perhatiannya ke arah timur. Jelas bahwa Fatimiyah berada dalam posisi untuk mendominasi pusat dunia Islam, dan kedua pendahulunya telah gagal menaklukkan Mesir. (Montgomery, 1990)

5. Dinasti Ziridiyah

Pendiri dinasti Ziridiyah adalah orang yang mengabdikan sepenuhnya pada dinasti Bani Fatimiyah dan diberi tugas untuk mengatur kekuasaan di Afrika Utara ketika dinasti Bani

Fatimiyah meninggalkan negara tersebut Dan dalam perkembangannya, kekuatan suku ini berubah menjadi sebuah dinasti bernama Jiridiya, yang pertama kali dipimpin oleh Bulgin ibn Jirid Wilayahnya meliputi Tripoli, Tunisia, dan Aljazair bagian timur Dinasti ini dengan Asir sebagai ibu kotanya, bertahan hingga tahun 1148 M, ketika kekuasaan dinasti Zaridiya berakhir dan penguasa baru didirikan di Afrika Utara, dinasti al-Murabitun (Ali, 2000).

6. Dinasti Rustamiyyah

Pada tahun 160 M (776 M), masyarakat Ibatiya sepakat untuk mengucapkan sumpah setia kepada 'Abd al-Rahman sebagai pemimpin pemerintahan Ibatiya Sejak itu, pemerintahan Rustamiya didirikan Letak Dinasti Rustamiya adalah ibu kota Dinasti Agrabiyya (183-296 M/800-909 M), Dinasti Idrisiyya (172-313 M/789-926 M), dan Dinasti Midrariya (140-296 M/ 757-Dinasti Rustamiya Tahert (Tihart, Tāhart, Taihort) sekarang terletak di dekat Tiaret di barat laut Aljazair, sedangkan Jabal Nafsa (al-Jabal al-Gharbi) juga merupakan wilayah Aljazair Dinasti ini sekarang terletak di wilayah barat laut Libya Secara Geografis, Oleh karena itu, wilayah kekuasaannya meliputi sebagian sungai Maghrib-Awsar dan Maghrib-Adnur kepemimpinan politik ideologi Khawarij Ibadiyya Pemilihan pendekatan behavioral didasarkan pada kenyataan bahwa pendekatan ini menekankan pada analisis berbasis pengetahuan terhadap perilaku politik individu dan kelompok serta proses politik. (Rofiq, 2016)

Selain dinasti-dinasti di atas terdapat pula beberapa kerajaan/dinasti dalam proses islamisasi di Afrika, beberapa di antaranya adalah:

- Kesultanan Kilwa: Kesultanan ini berkuasa di wilayah pesisir Tanzania pada abad ke-12 hingga abad ke-15. Mereka merupakan salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan Islam di Afrika Timur (Hawi, 2016).
- Kerajaan Kano: Kerajaan ini berkuasa di wilayah Nigeria Utara dari abad ke-10 hingga abad ke-19. Mereka memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Afrika Barat (Hawi, 2016).
- Kekaisaran Ghana: Kekaisaran ini merupakan salah satu kerajaan pertama di Afrika yang menerima Islam. Mereka berkuasa di wilayah Ghana pada abad ke-8 hingga abad ke-13 (Hawi, 2016).

- Dinasti Rasyidin: Dinasti ini merupakan dinasti pertama yang memerintah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Proses penyebaran Islam di Afrika dimulai pada masa Dinasti Rasyidin (Hawi, 2016).
- Dinasti Murabithun: Dinasti ini berkuasa di Kerajaan Maroko pada abad ke-11 hingga abad ke-12. Mereka berperan penting dalam penyebaran Islam di Afrika Utara (Hawi, 2016).

E. Pengaruh Islamisasi di Afrika

1. Sosial

Dalam bidang sosial, dulunya kehidupan masyarakat utara adalah sebuah kehidupan masyarakat pedesaan yang bersifat kesukuan, berpindah-pindah tempat, dan patriaki. Ketika daerah ini berada di bawah kekuasaan kekaisaran romawi, masyarakat di pengaruhi oleh para elit kota yang mengadopsi bahasa, gagasan, adat istiadat para penguasa. Setelah orang-orang romawi dikalahkan oleh Uqubah Ibnu Nafi', pengaruhnya di Afrika Utara mulai berhenti. Sehingga penduduk Afrika Utara terhindar dari kekejaman dan pemerasan. Oleh karena itu mereka merasakan ketentraman (Muhammad, 1994).

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan sosial peradaban Islam, terutama di Afrika adalah toleransi beragama, kelembutan dan keadilan. Abu Suud menjelaskan bahwa tidak seorang prajurit dan orang Arab berhak atas kawasan baru yang dikuasai. Semua kekayaan dan kawasan baru menjadi milik Islam. Penguasa setempat tidak dipaksa menganut Islam, kecuali atas kemauan sendiri. Mereka diberi hak untuk meneruskan kepemimpinan otonom dikawasan mereka, dengan kewajiban membayar pajak. Perlindungan (Jizyah) kepada khalifah, pengaturannya dilakukan oleh seorang Amir, yaitu Komandan tentara pendudukan dan pasukan, sebagai wakil khalifah. Kehidupan amir dan pasukannya dijamin oleh pemerintah setempat dengan dana dan logistik untuk pelaksanaan operasional tugas mereka di daerah pendudukan (Hawi, 2016).

2. Kebudayaan

Pengaruh Islam terhadap bahasa dan kesastraan mereka dapat ditemui dari berbagai ragam terjemahan naskah-naskah agama terutama yang berkaitan dengan tarikh Nabi Muhammad

SAW, Nabi-Nabi yang disebut dalam Injil, Ali, Hussain dan kisah wali-wali sufi yang mencerminkan pentingnya kehidupan sufisme bagi mereka. Begitu juga karya-karya tentang fiqih, tauhid dan astrologi cukup dikenal di kalangan mereka. Pola pikir yang mempengaruhi bangsa-bangsa Islam Afrika kebanyakan berupa cerita populer, sebagian dalam bentuk puisi, tetapi sebagian besar dalam bentuk prosa; dan bukan ditulis dalam bahasa Arab kiasik, melainkan dalam bahasa-tulis Arab pasca-klasik atau bahasa lisan modern. Karya-karya prosa ini hampir semuanya dicetak di Kairo, sedangkan teks-teks puitis percakapan biasanya beredar dalam edisi lokal (Thohir, 2019).

3. Ilmu Pengetahuan, Arsitektur, dan Bangunan

Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Arsitektur dan Bangunan Kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga pada bidang ilmu pengetahuan, arsitektur dan bangunan wilayah bersejarah yang menjadi pusat-pusat kajian Islam. Pada masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah di kota Kairo Mesir dibangun pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam yaitu Universitas yang memberikan sumbangan besar bagi kemajuan intelektual dan keilmuan Islam. Pada masa Dinasti Fatimiyah, merupakan salah seorang ilmu pengetahuan. Ia mendirikan instansi pendidikan yang bernama Al-Azhar dan memberi subsidi besar setiap bulannya (Hawi, 2016).

Pada masa Ibnu Khilisi merupakan seorang wazir Fatimiyah yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Pada masa Ibnu Khilisi di dalam Istana al-Aziz terdapat seorang fisikawan besar bernama Muhammad al-Tamim, sejarawan dan topografer besar bernama al-Kindi, pakar astronomi Ali bin Yunus, pakar Optik bernama Ali Al-Hasanbinal-Khaitami serta sejumlah sastrawan dan ilmuwan yang berkarya di Istana Dinasti Fatimiyah (Hawi, 2016).

4. Ekonomi

Ekonomi Afrika didukung dengan hasil pertanian yang unggul dan kualitas yang tinggi dalam perindustrian. Dalam Pemerintahan Dinasti Fatimiyah Afrika menganut prinsip dagang dengan bebas dan terbuka. Dan pedagang hanya ditanggihkan pajak impor-ekspor. Nilai-nilai Islam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap kewirausahaan. Inisiatif-inisiatif ini dapat mencakup pembangunan usaha kecil dan

menengah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi komunitas (Lina, 2023).

Afrika sendiri merupakan sebuah Negara maju dengan penduduk yang berpendapat sederhana. Negara ini kaya dengan bahan-bahan tambang, terutama yang bernilai tinggi seperti emas, platinum dan berlian. Ia juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energy infrastruktur yang maju dan modern. Dengan kekayaan yang dimiliki Afrika tersebut yang membuat hingga zaman modern ini afrika bisa menjalin hubungan antara Negara-negara islam di luar benua Afrika dan bisa lebih dekat untuk menjanjikan dakwah di afrika tersebut (Muhammad, 1994).

5. Politik

Uqbah Ibn Nafi berhasil membawa kehidupan masyarakat Afrika Utara kepada kehidupan yang tentram, dimana masyarakat tidak begitu terbebani oleh pungutan pajak. Mereka membayar jizyah sebagai perlindungan jiwa dan harta mereka. Dalam bidang politik, Uqbah Ibn Nafi berhasil membebaskan Afrika Utara dan membangun kota militer, kawasan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahannya (Muhammad, 1994).

6. Keagamaan

Dalam Bidang Keagamaan, Uqbah Ibnu Nafi berhasil menyebarkan agama islam pada wilayah ini serta membangun masjid sebagai sarana peribadatan. Mereka yang dahulu dipaksa untuk memeluk suatu kepercayaan, yaitu Kristen. Sejak wilayah tersebut dikuasai oleh Uqbah Ibn Nafi, toleransi agama mulai diterapkan meski dakwah islam selalu digiatkan oleh Uqbah Ibnu Nafi (Muhammad, 1994).

F. Rangkuman

Penyebaran Islam di Afrika memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Islam pertama kali masuk ke Afrika saat hijrahnya orang Islam dari Mekkah ke Habasyah atau Abisina (Ethiopia) pada tahun 615 Masehi. Proses penyebaran Islam di benua Afrika secara luas dan mendalam baru terjadi beberapa abad kemudian, dimulai sejak abad ke-7 Masehi.

Agama Islam tersebar secara berkelanjutan di Afrika pada masa Kekhalifahan Rasyidin, dan masuk melalui wilayah-wilayah Mesir, Nubia, Ethiopia, serta Afrika Utara lainnya. Pada awal masuknya Islam di Mesir, penduduk Koptik memberikan dukungan karena pasukan

Muslim membebaskan mereka dari tekanan Kekaisaran Romawi Timur. Sejarah mencatat perkembangan Islam di wilayah Asia dan Afrika bahkan hampir selesai sekitar tahun 750 Masehi. Penyebaran Islam di Benua Afrika juga tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Namun, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik kuantitas maupun kualitas.

Dalam penyebaran nya Islam di Afrika tidak lepas dari berbagai macam peran dinasti atau kerajaan yang ada di Afrika. Adapun dinasti yang berkuasa disaat Islam di sebar di Afrika adalah Dinasti Aghlabiyah dan Kekhalifahan Kordoba. mereka memainkan peran penting dalam proses islamisasi di Afrika, dengan mempengaruhi masyarakat lokal dan menyebarkan ajaran Islam melalui berbagai jalur seperti militer, dakwah, dan perdagangan.

Dalam proses Islamisasi di Afrika terdapat beberapa pengaruh atau dampak nya sendiri, dampak penyebaran Islam di Afrika sangatlah signifikan. Islam telah menjadi agama dominan di beberapa bagian Afrika dan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial budaya, ilmu pengetahuan, politik, dan perekonomian di benua tersebut.

G. Latihan

Kerjakan Latihan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Bagaimana proses masuknya agama islam di Afrika?
2. Bagaimana para *Mubaligh* menyebarkan agama islam di Afrika?
3. Apa saja kerajaan/dinasti yang berkuasa dalam proses islamisasi di Afrika?
4. Apa saja pengaruh dalam masuknya agama islam di Afrika?

H. Rujukan

Al-Sallabi, Ali muhammad Muhammad. 1998. *Safahatu min Tarikhi Libya al-Islami wa al-Syimal al-Friqiyyi*. Beirut: Daar al-Bayariq. Lapidus.

Dangor, Suleman Essop. 1981. *A Critical Biography of Shaikh Yusuf*. Durban: Universty of Durban-Westville.

Hawi, Akmal. 2016. *Pengembangan Islam di Afrika Utara dan Peradabannya*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Hitti, Philip K. 2018. *History of The Arabs*. Jakarta: Zaman.

- Ira M. 2000. *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian kesatu dan kedua terj.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- JJ. Sounders. 1981. *A History of Medival Islam.* London: Redwood Book.
- K. Ali. 2000. *Sejarah Islam; Tarikh Pramodern, Terj.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lina, H. 2023. *Kepemimpinan Ubaidillah Al-Mahdi Pada Dinasti Fatimiyah Di Afrika Utara Tahun 910-927 M.*
- Mahmud. 1997. *al-Tarikhi al-Islami 16.* Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Marasabey, Bunyamin. 2004. *Tuan Guru: The Cape Muslim Philosophy Education System, Makara, Sosial Humainora.* Vol. 8, No. 3, hlm. 162-132.
- Maryam, Siti. 2017. *Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik hingga Modern.* Yogyakarta: Lesfi.
- Muhammad Yusran Asmuni. 1994. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam.* Surabaya: al-Ikhlas. hlm. 85.
- Muhsin, I. 2000. *Peradaban Islam Pra-Modern di Afrika Utara dalam Siti Maryam (edit). Sejarah Peradaban Islam, Dari Klasik Hingga Modern.* Yogyakarta: LESFI.
- Prothero, George Walter. 2015. *Sejarah Islam klasik: Perkembangan Islam di Turki hingga Afrika terj.* Yogyakarta: Indopublika.
- Rofiq, Ahmad Choirul. 2016. *Ideologi Politik Khawarij Ibadiyyah dan Sistem Monarki Dinasti Rustamiyyah.* Vol. 16, No. 2. Al-Tahrir. STAIN Ponorogo.
- Siti Zubaidah. 2016. *Sejarah Peradaban Islam.* Medan: Perdana Mulya Sarana. hlm 124.
- Sumanto, Muryifah. 2011. *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Pengetahuan Islam.* Jakarta: Kencana.
- Thohir, A. 2019. *Studi kawasan dunia Islam: Perspektif etno-linguistik dan geo-politik.* PT Raja Grafindo Persada.
- W. Arnold, Thomas. 2019. *Sejarah Lengkap Penyebaran Islam di Dunia.* Yogyakarta: IRCiSoD.
- Wildan, M. 2000. *Peradaban Islam di Afrika sub-Sahara. Sejarah Peradaban Islam, Dari Klasik Hingga Modern.* Yogyakarta: LESFI.
- W.Montgomery Watt. 1990. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari tokoh Orientalis.* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yatim, Badri. 2015. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

BAB 4

PERKEMBANGAN AWAL KEDATANGAN ORANG-ORANG EROPA DI AFRIKA DAN PENJELAJAHAN BENUA AFRIKA OLEH BANGSA EROPA

A. Latar Belakang

Afrika, sering kali disebut sebagai “Benua Gelap”, adalah wilayah yang luasnya diperkirakan mencapai sekitar 8050 km dari utara ke selatan dan sekitar 7400 km dari timur ke barat, dengan luas keseluruhan mencapai sekitar 30.295.000 km². Dengan mempertimbangkan perbedaan iklim, kondisi tanah, dan populasi, Afrika dapat dikelompokkan menjadi lima bagian utama: Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, dan Afrika Tengah. Negara-negara di Eropa mulai menjelajahi dunia untuk mencari sumber daya yang dibutuhkan di tanah air mereka. Pada awalnya, tujuan utama penjelajahan ini adalah untuk memperdagangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas perdagangan itu dianggap kurang efektif. Bangsa Eropa kemudian mulai merasakan hasrat untuk menguasai wilayah-wilayah yang dianggap memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, mereka juga memiliki keinginan untuk memperoleh dominasi global untuk menegaskan posisi mereka di hadapan negara-negara lain (Riyadi, 2016).

Penjajahan bangsa Eropa di Afrika dimulai pada abad ke-15, terutama oleh orang-orang Portugis. Mereka mengincar wilayah seperti Tanjung Bojador, Tanjung Verde, Tanjung Palmas, dan pantai-pantai di sepanjang Afrika Barat. Tidak hanya Portugis, Spanyol juga tertarik untuk menguasai Afrika, meskipun hal ini terkendala oleh Perjanjian Tordesillas. Afrika memiliki daya tarik yang besar bagi bangsa Eropa dan penjajah lainnya. Selain kaya akan sumber daya alam, wilayah ini juga melimpah dengan tenaga kerja manusia. Namun, yang paling menonjol adalah keberadaan sumber daya emas yang melimpah di Afrika. Sebagai contoh, Sudan diperkirakan memiliki seperempat dari cadangan emas dunia. Karena itu, tidak mengherankan jika bangsa Eropa berambisi untuk menguasai wilayah Afrika demi kepentingan mereka sendiri. Portugis menjadi salah satu kekuatan dominan di Afrika, bahkan membangun koloni yang besar di sana selama 75 tahun. Namun, pada abad ke-17, mereka terpaksa meninggalkan Afrika karena persaingan dari bangsa Eropa lainnya yang juga ingin menguasai wilayah tersebut, seperti Perancis, Inggris, dan Belanda. Belanda mendominasi kawasan Afrika

Selatan, mempekerjakan masyarakat lokal untuk menanam hasil perkebunan seperti buah-buahan dan sayuran. Eksploitasi sumber daya secara besar-besaran juga terjadi di kawasan lain oleh penjajah lainnya. Meskipun penjajahan terhadap Afrika bisa dikatakan telah berakhir setelah Perang Dunia II, gejolak masih terjadi di kawasan tersebut, termasuk pemberontakan politik seperti apartheid dan demonstrasi akibat krisis ekonomi. Apartheid adalah kebijakan pemisahan hak dan kewajiban berdasarkan perbedaan rasial di Afrika yang merugikan masyarakat setempat. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan dominasi penjajah di Afrika (Sulistiowati, 2020).

B. Tujuan Penjelajahan Orang Eropa di Afrika

Penjelajahan orang Eropa di Afrika pada masa lampau memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Tujuan-tujuan di balik penjelajahan ini sangat bervariasi, mencakup aspek perdagangan, eksploitasi sumber daya alam, eksplorasi geografis, penyebaran agama dan kebudayaan, serta niat untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh. Dalam konteks ini, adalah penting untuk memahami berbagai motivasi yang mendorong orang Eropa untuk menjelajahi benua Afrika dan dampaknya terhadap perkembangan sejarah global. Adapun tujuan utama dari penjelajahan orang Eropa di Afrika adalah (Hadiyanto, 2014):

1. Mencari jalur perdagangan baru yang menguntungkan. Pada periode awal penjelajahan, para penjelajah Eropa mencari cara baru untuk mencapai sumber daya alam yang kaya di Asia, terutama rempah-rempah yang sangat berharga. Namun, ketika rute perdagangan tradisional ke Asia terhambat oleh penghalang-penghalang politik dan geografis, mereka mulai mencari jalur alternatif melalui benua Afrika. Afrika Selatan, dengan pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjung Harapan, menjadi pusat strategis dalam upaya ini.
2. Didorong oleh keinginan untuk mengakses sumber daya alam yang melimpah. Afrika dikenal memiliki kekayaan alam yang besar, termasuk emas, perak, garam, dan barang-barang lainnya yang menjadi objek keinginan bagi bangsa-bangsa Eropa. Penjelajahan ini tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam yang ada, tetapi juga pada penemuan dan penguasaan terhadap sumber daya baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik Eropa.

3. Aspek eksplorasi geografis juga menjadi faktor penting dalam penjelajahan Eropa di Afrika. Penjelajahan ini didorong oleh keinginan untuk memahami lebih baik geografi dan topografi benua Afrika, serta untuk memetakan wilayah-wilayah yang belum dijelajahi secara lengkap. Pengetahuan geografis yang diperoleh dari penjelajahan ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam perdagangan dan ekspansi kolonial, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa.
4. Dipengaruhi oleh motivasi agama dan kebudayaan. Misalnya, misi-misi Kristen Eropa di Afrika bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen dan memperluas pengaruh gereja di benua tersebut. Selain itu, penjelajahan ini juga menjadi ajang bagi orang Eropa untuk mempelajari dan mendokumentasikan budaya dan kebiasaan orang Afrika, meskipun seringkali dengan sudut pandang yang kolonial dan paternalistik.
5. Keinginan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh politik. Bangsa-bangsa Eropa bersaing untuk menguasai wilayah-wilayah strategis di Afrika guna memperkuat posisi mereka dalam persaingan global. Penguasaan atas wilayah-wilayah tersebut juga dianggap penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas kekaisaran kolonial Eropa.

C. Dampak dari Kedatangan Eropa

Masuknya bangsa Eropa di Afrika memiliki dampak yang sangat luas dan beragam, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang masih dirasakan hingga saat ini. Salah satu dampak utama adalah terjadinya kolonisasi yang membawa perubahan besar dalam struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya di benua Afrika. Secara politis, kedatangan orang Eropa menyebabkan pembagian wilayah-wilayah Afrika antara kekuatan kolonial Eropa. Proses pembagian ini seringkali tidak memperhatikan batas-batas etnis, budaya, atau politik yang sudah ada di Afrika sebelumnya, dan seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar suku atau etnis. Sistem politik kolonial yang diterapkan juga seringkali otoriter dan tidak demokratis, yang meningkatkan ketidakstabilan dan ketidakpuasan di antara penduduk lokal (Vansina, 1974).

Secara ekonomi, kedatangan orang Eropa di Afrika menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran. Perusahaan-perusahaan kolonial Eropa mengeksploitasi tanah dan sumber

daya alam Afrika untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri, seringkali tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan atau kesejahteraan penduduk lokal. Hal ini mengakibatkan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang mendalam di banyak wilayah Afrika. Dampak sosial dari kedatangan orang Eropa di Afrika juga sangat besar. Misalnya, perdagangan budak yang dilakukan oleh orang Eropa menyebabkan pemisahan keluarga, kehilangan budaya, dan trauma psikologis yang masih dirasakan oleh keturunan budak hingga saat ini. Selain itu, penjajahan Eropa juga membawa sistem rasial yang diskriminatif dan pemisahan hak-hak, yang menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok rasial di beberapa wilayah Afrika. Dalam bidang budaya, kedatangan orang Eropa membawa agama, bahasa, dan budaya Barat ke Afrika, yang seringkali menyebabkan pengusiran atau pengabaian terhadap budaya dan tradisi lokal. Meskipun ada upaya untuk melestarikan budaya dan bahasa asli, pengaruh budaya Eropa tetap kuat di banyak wilayah Afrika (Nugraha, 2015).

D. Interaksi Para Penjelajah Eropa Dengan Bangsa Afrika

Interaksi antara para penjelajah Eropa dengan bangsa Afrika selama periode penjelajahan dan penjajahan memiliki dampak terhadap kedua belah pihak, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu peristiwa sejarah yang mencerminkan interaksi ini adalah perdagangan budak Atlantik yang melibatkan jutaan orang Afrika yang dibawa ke Amerika sebagai budak selama berabad-abad. Perdagangan budak Atlantik adalah salah satu contoh interaksi yang paling tragis antara Eropa dan Afrika. Penjelajah Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris memanfaatkan perdagangan budak untuk memperoleh tenaga kerja paksa di koloni-koloni Amerika mereka. Orang-orang Afrika dijual sebagai budak dalam jumlah besar, terutama dari wilayah-wilayah pesisir barat Afrika. Praktik ini tidak hanya menghancurkan komunitas dan keluarga di Afrika, tetapi juga membangun fondasi ekonomi Amerika yang sangat bergantung pada kerja paksa.

Interaksi antara Eropa dan Afrika juga terjadi melalui perdagangan barang-barang dan sumber daya alam. Penjelajah Eropa datang ke Afrika untuk mencari rempah-rempah, emas, perak, dan barang-barang lainnya yang bisa dijual di pasar Eropa. Hal ini membuka jalur perdagangan baru antara Eropa dan Afrika yang memberikan keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak, meskipun seringkali dengan kondisi yang tidak merata dan eksploitatif. Interaksi antara Eropa dan Afrika

semakin terfokus pada penguasaan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belgia, dan Jerman mendirikan koloni-koloni di berbagai wilayah Afrika, mengklaim kedaulatan atas tanah dan sumber daya alamnya. Praktik kolonialisme ini seringkali disertai dengan penindasan, eksploitasi, dan pemerasan terhadap penduduk asli Afrika, serta pembangunan infrastruktur untuk kepentingan ekonomi dan militer Eropa. Namun, interaksi antara Eropa dan Afrika juga membawa dampak positif dalam bentuk pertukaran budaya dan pengetahuan. Meskipun banyak budaya Afrika yang mengalami penindasan atau pengabaian selama periode kolonial, ada juga pertukaran budaya yang terjadi antara kedua belah pihak. Misalnya, penyebaran agama Kristen di Afrika dan adopsi bahasa Eropa di beberapa wilayah menjadi bagian dari interaksi budaya yang kompleks antara Eropa dan Afrika (M. ADRIANSAH AKBAR P, 2017).

E. Penjelajahan Belgia Di Afrika

Penjelajahan Belgia memiliki peran penting dalam penjajahan Afrika, terutama melalui eksploitasi di Kongo, yang dikenal sebagai Kongo Belgia atau Kongo Bebas pada awalnya. Penjelajahan Belgia di Afrika dimulai pada akhir abad ke-19, ketika Raja Leopold II dari Belgia memperoleh kendali atas wilayah Kongo sebagai milik pribadinya pada Konferensi Berlin tahun 1885, tanpa konsultasi atau persetujuan dari penduduk setempat. Tujuan utama dari penjelajahan Belgia di Afrika, terutama di Kongo, adalah untuk memperoleh kekayaan alam, terutama karet dan karet. Karet menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar global pada saat itu, digunakan dalam produksi ban dan industri lainnya di Eropa dan Amerika. Raja Leopold II melihat Kongo sebagai sumber yang tidak terbatas dari komoditas ini dan mengimplementasikan sistem kerja paksa yang brutal untuk mengumpulkan karet dari penduduk setempat



1.1 King Leopold II

Metode ini melibatkan penggunaan tenaga kerja paksa, pemaksaan kerja paksa, dan kekerasan yang brutal terhadap penduduk asli Kongo yang menolak atau tidak dapat memenuhi target produksi. Akibatnya, jutaan orang Kongo meninggal karena kelaparan, penyakit, atau kekerasan langsung. Selain eksploitasi sumber daya alam, penjelajahan Belgia di Afrika juga bertujuan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan Belgia di benua tersebut. Dengan menguasai wilayah Kongo yang luas, Belgia ingin menegaskan posisinya sebagai kekuatan kolonial utama di Afrika dan mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi yang besar dari penjajahan tersebut. Namun, upaya ini sering kali menimbulkan perlawanan dan pemberontakan di antara penduduk asli Kongo, yang menentang penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belgia. Dampak dari penjelajahan Belgia di Afrika, terutama di Kongo, sangatlah besar dan kontroversial. Di satu sisi, penjelajahan ini membawa modernisasi dan pembangunan infrastruktur ke Kongo, seperti jalan, rel kereta api, dan pelabuhan, yang memfasilitasi ekspor sumber daya alam ke pasar internasional. Namun, di sisi lain, penjelajahan Belgia juga menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi penduduk asli Kongo, dengan jutaan orang meninggal karena kerja paksa, kelaparan, atau penyakit yang menyebar karena kondisi hidup yang buruk di bawah rezim kolonial.



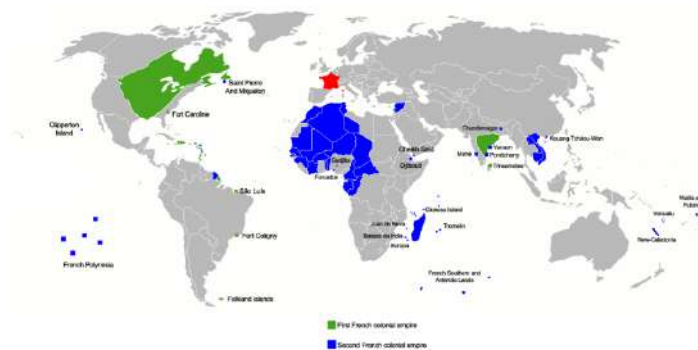
1.2 Rute Kolonisasi Belgia

Selama periode penjajahan Belgia di Kongo, praktik kolonialisme Eropa yang brutal menyebabkan kritik dan kecaman dari komunitas internasional. Berbagai laporan dan investigasi yang dilakukan oleh misionaris, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia mengungkapkan kekejaman yang terjadi di Kongo di bawah pemerintahan Belgia. Pada tahun 1908, tekanan internasional yang meningkat memaksa Raja Leopold II untuk menyerahkan kendali langsung atas Kongo kepada pemerintah Belgia. Namun, praktik eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap penduduk asli Kongo masih berlanjut di bawah pemerintahan Belgia yang baru. Setelah Kongo memperoleh kemerdekaannya dari Belgia pada tahun 1960, negara tersebut menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial dalam upaya membangun negara yang stabil dan mandiri. Warisan kolonialisme Belgia, termasuk pembagian yang tidak adil dari sumber daya dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata, menyebabkan ketidakstabilan politik dan ketidaksetaraan ekonomi yang masih ada di Kongo hingga saat ini (Darsiti, 2012).

F. Penjelajahan Perancis di Afrika

Ketertarikan bangsa Perancis pada Afrika dimulai sejak abad ke 17 dimana mereka saat itu mendirikan pelabuhan dagang di wilayah Afrika Barat. Pada masa ini, kekuatan koloni Eropa yang menduduki Afrika tidak hanyalah Perancis, namun juga Inggris, Jerman, dan Italia. Sehingga dengan banyaknya koloni Eropa di Afrika saat itu, kemudian ditanda tangani perjanjian pada konferensi berlin tahun 1884, yang kemudian menjadi pintu awal terjadinya praktik kolonialisme

dari negaranegara koloni tersebut termasuk Perancis untuk kembali menguasai dan mengeksploitasi segala sumber daya alam di Afrika (Siradag, 2014). Kemudian setelah penandatanganan perjanjian di konferensi Berlin, Perancis mendirikan dua federasi dagang di wilayah Afrika dengan tujuan memperkuat wilayah jajahannya. Yang pertama federasi dagang Perancis berada di wilayah Senegal, dan federasi dagang Perancis yang kedua berada di wilayah Afrika Bagian Tengah meliputi Chad, Gabon, Kamerun, Kongo, dan Republik Afrika Tengah. Yang nantinya, federasi dagang Perancis ini bubar di tahun 1960 setelah banyak negaranegara di Afrika mulai memerdekakan dirinya (Manning, 2004).



1.3 Imperium Kolonial Prancis

Kebijakan yang diterapkan oleh Perancis sendiri, berbeda dengan kebijakan negaranegara Eropa di Afrika lainnya. Negara Eropa lainnya terutama Inggris memiliki kebijakan yang cenderung mengarah ke wilayah ekonomi, dan perlindungan kepentingan para pemukim Inggris, justru Perancis menerapkan kebijakan yang mengusung adanya asimilasi budaya dan politik terhadap Afrika, yang tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengeksploitasi Afrika tentunya, dan untuk meningkatkan prestise Perancis. Dimana kebijakan ini tidak mengindahkan budaya asli Afrika mulai dari bahasa, hingga budaya. Selain itu, dalam melaksanakan kolonialismenya, Perancis juga menciptakan dan membangun sistem ekonominya sendiri yang sedikit banyaknya merugikan warga koloni Afrika, dan warga Afrika. Perancis juga memaksa negara koloninya berdagang dengan Paris. Dimana seluruh kebijakan Perancis atas Afrika didasarkan pada ketidaksetaraan dan rasisme. Dimana diterapkan pula politik pecah belah pula diterapkan dengan membagi Afrika menjadi “Francophone”. Kebijakan Perancis cenderung lebih destruktif, dan

intoleran dengan budaya asli Afrika. Bahkan diketahui bahwa Perancis menjadi salah satu kekuatan kolonial yang paling mendominasi dan signifikan di Afrika.

G. Penjelajahan Inggris di Afrika

Pada abad ke-16, Inggris mulai tertarik untuk menjelajahi wilayah-wilayah di Afrika sebagai bagian dari upaya mereka dalam mencari jalur perdagangan baru ke Asia. Salah satu peristiwa awal yang mencatat kehadiran Inggris di Afrika adalah penemuan Tanjung Harapan pada tahun 1580-an oleh penjelajah Inggris, Sir Francis Drake. Meskipun penjelajahan ini awalnya berfokus pada mencari jalur perdagangan ke Asia, namun seiring berjalannya waktu, Inggris mulai memperhatikan potensi ekonomi dan politik yang dimiliki oleh wilayah-wilayah di Afrika itu sendiri. Pada abad ke-17, Inggris mulai memperkuat kehadirannya di wilayah-wilayah pesisir Afrika Barat. Mereka mendirikan pos perdagangan di sepanjang pantai Afrika, terutama untuk memperdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, emas, dan budak. Misalnya, Inggris mendirikan Fort James di Gambia pada tahun 1651 sebagai basis perdagangan mereka di wilayah tersebut. Penjelajahan Inggris di wilayah-wilayah pesisir ini juga berkontribusi pada perkembangan perdagangan transatlantik budak, di mana jutaan orang Afrika dibawa ke Amerika sebagai tenaga kerja paksa dalam perdagangan budak Atlantik.

Pada abad ke-19, minat Inggris di Afrika semakin meningkat, terutama dalam konteks kolonialisme dan imperialisme yang sedang berkembang di Eropa. Inggris mulai mengejar kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih besar di benua tersebut, dan menjadikan Afrika sebagai salah satu target utama dalam upaya ekspansi imperialis mereka. Pada tahun 1807, Inggris melarang perdagangan budak di wilayah-wilayah koloninya, dan kemudian berupaya untuk mengakhiri praktik tersebut di seluruh dunia, meskipun perdagangan budak masih berlanjut di bawah kendali kolonial Inggris di beberapa wilayah Afrika. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah penjelajahan Inggris di Afrika adalah konferensi Berlin tahun 1884-1885, di mana negara-negara Eropa membagi-bagikan wilayah-wilayah di Afrika tanpa memperhatikan keberadaan penduduk asli atau batas-batas etnis yang sudah ada. Konferensi ini memperkuat kekuasaan Inggris di Afrika dan membuka jalan bagi penjajahan lebih lanjut di benua tersebut.

Pada awal abad ke-20, Inggris telah menguasai sebagian besar wilayah Afrika, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penguasaan atas negara-negara boneka. Mereka mendirikan koloni dan protektorat di banyak wilayah, termasuk Nigeria, Kenya, Ghana, dan Zimbabwe. Pemerintahan kolonial Inggris di Afrika sering kali ditandai oleh eksploitasi sumber daya alam, penindasan politik, dan diskriminasi rasial terhadap penduduk asli. Dampak dari penjelajahan Inggris di Afrika sangatlah kompleks. Di satu sisi, penjelajahan ini membawa kemajuan dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan administrasi di beberapa wilayah, serta penyebaran agama Kristen. Namun, di sisi lain, penjelajahan ini juga menyebabkan penderitaan dan penindasan yang mendalam terhadap penduduk asli, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (Putri, 2011).

H. Penjelajahan Portugal di Afrika

Penjelajahan ini dimulai pada abad ke-15, ketika Portugal menjadi salah satu negara Eropa pertama yang memulai ekspedisi maritim di luar Eropa. Salah satu tujuan utama dari penjelajahan Portugal di Afrika adalah untuk mencari jalur perdagangan baru ke Timur, terutama untuk memperoleh rempah-rempah yang berharga yang dibutuhkan di Eropa. Kedatangan bangsa Portugal di pesisir barat Afrika pada awalnya merupakan langkah awal dalam usaha mereka untuk mencari rute laut yang mengarah ke Asia, tanpa harus melalui jalur darat yang berbahaya dan mahal. Saat penjelajahan dimulai, wilayah yang disebut Tanjung Bojador di pesisir barat Afrika dianggap sebagai batas dunia yang tidak bisa ditembus. Namun, pada tahun 1434, penjelajah Portugal yang bernama Gil Eanes berhasil melewati tanjung tersebut, membuktikan bahwa lautan yang belum terjamah masih bisa dijelajahi. Hal ini membuka jalan bagi penjelajahan lebih lanjut ke wilayah-wilayah yang lebih jauh di pesisir barat Afrika. Penjelajahan ini dipandang sebagai pencapaian yang luar biasa pada masanya dan menjadi tonggak penting dalam sejarah penjelajahan dunia. Seiring berjalannya waktu, penjelajahan Portugal di Afrika semakin berkembang dan meluas ke wilayah-wilayah lain di benua tersebut. Pada abad ke-15 dan ke-16, penjelajah Portugal seperti Vasco da Gama dan Bartolomeu Dias melakukan ekspedisi yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan. Vasco da Gama, misalnya, memimpin ekspedisi yang berhasil menemukan jalur laut ke India pada tahun 1498, membuka pintu bagi perdagangan langsung antara Eropa dan Asia yang sangat menguntungkan bagi Portugal. Akan tetapi, tidak semua penjelajahan Portugal di Afrika berjalan lancar. Beberapa ekspedisi menghadapi tantangan besar, termasuk perlawanan dari

penduduk asli Afrika dan kondisi cuaca yang keras di laut terbuka. Meskipun demikian, Portugal terus melakukan penjelajahan dan ekspansi di Afrika, memperluas pengaruh mereka ke wilayah-wilayah yang lebih dalam di benua tersebut.



1.4 Penjelajah Portugis di Afrika

Selama proses penjelajahan dan penjajahan, Portugal membangun hubungan dengan berbagai kerajaan dan negara di Afrika. Beberapa kerajaan lokal bahkan bersekutu dengan Portugal dalam pertukaran untuk perlindungan atau keuntungan perdagangan. Namun, hubungan dengan beberapa kerajaan juga sering kali penuh dengan konflik dan pertempuran untuk menguasai wilayah dan sumber daya alam. Salah satu dampak utama dari penjelajahan Portugal di Afrika adalah pembentukan koloni-koloni Portugis di beberapa wilayah di benua tersebut. Koloni-koloni ini berfungsi sebagai pos perdagangan dan pangkalan untuk kegiatan penjelajahan lebih lanjut ke dalam benua. Selain itu, koloni-koloni ini juga menjadi tempat untuk memperluas pengaruh budaya, agama, dan bahasa Portugis di Afrika. Selama berabad-abad, Portugal memegang peranan penting dalam perdagangan budak di Afrika. Mereka membawa jutaan budak dari Afrika ke koloni-koloni mereka di Amerika untuk dipekerjakan dalam industri-industri seperti pertanian dan tambang. Praktik ini menyebabkan penderitaan yang besar bagi jutaan orang Afrika dan merupakan salah satu aspek paling gelap dari sejarah penjelajahan Portugal di Afrika. Meskipun penjelajahan Portugal di Afrika telah berakhir pada akhir abad ke-19, warisan mereka masih sangat terasa di benua tersebut. Bahasa Portugis tetap menjadi salah satu bahasa resmi di beberapa negara

di Afrika, sementara budaya dan agama Katolik Roma juga masih mempengaruhi banyak masyarakat di wilayah-wilayah yang pernah menjadi koloni Portugis. Selain itu, jejak penjelajahan Portugal dapat ditemukan dalam arsitektur, seni, dan tradisi budaya di beberapa negara Afrika (Hadi, 2023).

I. Konsekuensi Politik dari Kedatangan Orang Eropa di Afrika dan Perubahan Sosial dan Budaya akibat Penjelajahan Eropa

Kedatangan orang Eropa di Afrika pada era penjelajahan memiliki konsekuensi politik yang dalam bagi benua tersebut. Penjelajahan ini sering dimulai dengan tujuan ekspansi politik dan ekonomi, yang berujung pada pembentukan koloni dan dominasi Eropa atas wilayah-wilayah Afrika. Salah satu konsekuensi politik utama dari kedatangan orang Eropa adalah pembagian kawasan Afrika oleh kekuatan-kekuatan kolonial Eropa dalam Konferensi Berlin tahun 1884-1885. Dalam konferensi ini, negara-negara Eropa membagi-bagi wilayah Afrika tanpa memperhatikan identitas budaya atau politik asli penduduknya, yang mengakibatkan pembatasan etnis dan pembentukan negara-negara yang sering kali bertentangan dengan struktur budaya yang sudah ada sebelumnya. Pembagian ini menciptakan ketegangan politik yang berkepanjangan di antara suku-suku dan kelompok-kelompok etnis di Afrika. Kekuatan kolonial Eropa sering kali memanfaatkan perpecahan ini untuk mempertahankan kendali mereka atas wilayah tersebut, dengan mendukung pemerintahan yang otoriter dan korup yang memperkuat dominasi mereka. Akibatnya, konflik politik antarsuku seringkali meletus, memicu perang saudara, pemberontakan, dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan di banyak negara Afrika (Rahmadi, 2011).

Kedatangan orang Eropa juga mengubah secara fundamental struktur sosial dan budaya di Afrika. Penjelajahan Eropa membawa bersama mereka pengenalan agama, bahasa, dan nilai-nilai Barat yang seringkali bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai lokal yang sudah ada sebelumnya. Misi agama dari para penjelajah Eropa seringkali berujung pada upaya penindasan terhadap agama-agama asli Afrika, yang mengakibatkan kerusakan pada warisan budaya dan spiritual masyarakat asli. Penjelajahan Eropa juga mengakibatkan perubahan ekonomi yang signifikan di Afrika. Kedatangan orang Eropa membawa bersama mereka sistem perdagangan yang baru, yang seringkali didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam Afrika, termasuk manusia yang dijadikan budak. Perubahan ini menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan ekonomi dari masyarakat

lokal ke tangan kolonial Eropa dan elite lokal yang mendukung mereka. Perubahan sosial dan budaya yang diakibatkan oleh penjelajahan Eropa juga meliputi perubahan dalam pola migrasi dan struktur keluarga di Afrika. Kedatangan orang Eropa mengakibatkan migrasi massal penduduk Afrika dari wilayah-wilayah pedesaan ke perkotaan, menciptakan kota-kota baru yang seringkali dipengaruhi oleh budaya Barat. Selain itu, penjelajahan Eropa juga mempengaruhi struktur keluarga tradisional di Afrika, dengan memperkenalkan konsep-konsep Barat tentang pernikahan, keluarga, dan gender yang seringkali bertentangan dengan tradisi local (Fitzgibbon, 2003).

J. Rangkuman

Penjelajahan orang Eropa di Afrika memiliki dampak yang sangat luas dan beragam, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tujuan utama dari penjelajahan tersebut meliputi pencarian jalur perdagangan baru, eksploitasi sumber daya alam, eksplorasi geografis, penyebaran agama dan kebudayaan, serta niat untuk memperluas kekuasaan politik. Dampak dari kedatangan orang Eropa termasuk terjadinya kolonisasi yang mengubah struktur politik, ekonomi, dan sosial di Afrika, serta pembentukan koloni-koloni yang dipimpin oleh kekuatan kolonial Eropa. Selain itu, interaksi antara para penjelajah Eropa dengan bangsa Afrika juga mempengaruhi kedua belah pihak, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Praktik kolonialisme Eropa, seperti perdagangan budak, eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan politik, menyebabkan penderitaan dan ketidaksetaraan di antara penduduk asli Afrika. Namun, interaksi tersebut juga membawa pertukaran budaya dan pengetahuan antara Eropa dan Afrika. Penjelajahan Belgia, Perancis, Inggris, dan Portugal di Afrika masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Penjelajahan Belgia terutama terkenal karena eksploitasi brutal di Kongo, sementara Perancis menerapkan kebijakan asimilasi budaya dan politik yang merugikan bagi bangsa Afrika. Inggris, di sisi lain, memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang besar di Afrika, terutama dalam perdagangan budak dan ekspansi imperialis. Sedangkan Portugal, sebagai negara Eropa yang pertama kali menjelajahi Afrika, membawa perubahan signifikan dalam perdagangan, agama, dan budaya di benua tersebut. Secara keseluruhan, penjelajahan dan penjajahan Eropa di Afrika meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial, dengan dampak yang masih dirasakan hingga saat ini dalam bentuk ketidakstabilan politik, ketidaksetaraan ekonomi, dan pertentangan budaya.

K. Latihan

Kerjakanlah Latihan berikut ini dengan jawaban yang tepat!

1. Apa yang menjadi tujuan penjelajahan orang Eropa di Afrika?
2. Bagaimana dampak kedatangan Orang Eropa di Afrika?
3. Bagaimana interaksi yang terjadi antara penjelajah Eropa dengan bangsa Afrika?
4. Bagaimana penjelajahan Belgia Di Afrika?
5. Bagaimana penjelajahan Perancis Di Afrika?
6. Bagaimana penjelajahan Inggris Di Afrika?
7. Bagaimana penjelajahan Portugal Di Afrika?
8. Konsekuensi politik dari kedatangan orang eropa di Afrika dan perubahan sosial dan budaya akibat penjelajahan Eropa?

L. Rujukan

- Darsiti, S. (2012). *Sejarah Afrika*. Yogyakarta: Ombak.
- Fitzgibbon, K. (2003). Modern Day Slavery? The Scope of Trafficking in Persons in Africa. *African Security Review*.
- Hadi, F. S. (2023). PADROADO REAL: ORGANISASI MISI KATOLIK DI BAWAH BENDERA PORTUGIS. *Historia Vitae*.
- Hadiyanto. (2014). REPRESENTASI KOLONISASI TERHADAP MASYARAKAT KULIT HITAM AFRIKA DALAM NOVEL THINGS FALL APART KARYA CHINUA ACHEBE. *HUMANIKA*.
- M. ADRIANSAH AKBAR P, D. A. (2017). Konsep Pascakolonial dalam Pemikiran Afrosentrisme Kwame Anthony Appiah. *repository.ugm.ac.id*.
- Manning, P. (2004). *Francophone Sub-Saharan Africa: 1880-1995*. Cambridge: Cambridge University.
- Nugraha, M. (2015). Perbudakan Modern (Modern Slavery) Analisis Sejarah dan Pendidikan. *Jurnal T-Turats*.

- Putri, G. S. (2011). KRISIS FASHODA (1898) : KONFLIK ANTARA INGGRIS DAN PERANCIS DALAM MEMPEREBUTKAN HEGEMONI DI SUDAN. *Fakultas Ilmu Sosial*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin.
- Riyadi. (2016). *Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern*. Surabaya: Unessa Press.
- Siradag. (2014). Understanding French Foreign and Security Policy towards. *Afro Eurasian Studies Journa*.
- Sulistiowati, I. (2020). GEJOLAK POLITIK DAN EKONOMI AFRIKA PASCA PERANG DUNIA II. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*.
- Vansina, J. (1974). The Dictionary and the Historian. *History in Africa*.

BAB 5

KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI AFRIKA, KOLONIALISME KUNO DAN MODERN, INDUSTRIALISME DAN NEGARA NEGARA EROPA BARAT

A. Latar Belakang

Kolonialisme dan imperialisme barat di Afrika adalah sejarah yang melibatkan pengambilalihan dan pengawasan terhadap negara-negara di Afrika oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Proses ini telah mempengaruhi sejarah, budaya, ekonomi, dan politik Afrika selama lebih dari satu abad, dari awal tahun 1800-an hingga kemerdekaan Afrika pada abad 20. Tujuan kedatangan penjajah di negara-negara “Dunia Ketiga” didasarkan pada tiga tujuan utama yang dikenal dengan Gold, Glory, dan Gospel (3G). Ketiga tugas tersebut dilaksanakan secara sistematis, seiring dengan misi “membudayakan” wilayah jajahan. Untuk mencapai keunggulan fisik dan non fisik, negara-negara kolonial mengemban tugas menaklukkan wilayah-wilayah di berbagai belahan dunia, yang setelah kemerdekaannya mereka mendapat gelar kolektif “negara Dunia Ketiga”. Zed (2009), dalam naskahnya berjudul “Bagaimana Hidup sebagai Rakyat Jajahan”, merumuskan ciri-ciri pokok kolonialisme adalah sebagai berikut: 1. kolonialisme itu berwatak expansive. 2. Kolonialisme itu berwatak diskriminatif, anti-demokrasi, dengan menciptakan iklim ketergantungan abadi antara penjajah dan rakyat jajahan. 3. Kolonialisme itu berwatak menindas (oppressive). 4. Kolonialisme itu berwatak menguras (exploitative), dengan memeras potensi SDM dan SDA secara maksimal untuk kepentingan penjajah, sedangkan hasilnya diangkut ke negeri penjajah. Dan Dalam konteks ini, Pavan K. Varma (2012) menyebutkan tiga cara penaklukan wilayah kolonial. (a) mengikis budaya, (b) Penciptaan sistem pendidikan kolonial, (c) Penghapusan bahasa (Wardhani, 2016).

Ibarat dua sisi mata uang, kolonialisme dan imperialisme tidak bisa dipisahkan. Karena dimanapun kolonialisme dilakukan, imperialisme juga ada. Hal sebaliknya juga benar. Kolonialisme adalah pilar imperialisme. Segala bentuk kolonialisme berujung pada imperialisme. Prinsip kolonialisme adalah pendelegasian kekuasaan sosial-politik, sedangkan imperialisme memiliki prinsip hubungan ekonomi-politik (memperluas

wilayah tetapi tidak mempunyai wilayah jajahan). Imperialisme menekankan superioritas dan keunggulan negara

imperialis atas negara kolonial. Imperialisme terbagi dalam dua kategori yaitu imperialisme lama dan imperialisme modern. Imperialisme kuno sudah ada sebelum Revolusi Industri dan Revolusi Perancis, dan diterapkan dalam skala terbatas (sebelum zaman penjelajahan laut). Smith (1999), mendeskripsikan bentuk imperialisme Eropa awal abad 19 setidaknya dalam empat kecenderungan atau cara yang berbeda antara lain: (1) imperialisme sebagai ekspansi ekonomi; (2) imperialisme sebagai pendudukan negara lain (the Other19); (3) imperialisme sebagai semangat dan gagasan dengan berbagai macam pengejawantahannya; (4) imperialisme sebagai bidang ilmu pengetahuan diskursif (Miftakhuddin, 2020).

Imperialisme kuno dipraktekkan dengan menaklukkan negara-negara lain untuk mengamankan perdagangan. Kegunaan imperialisme kuno hanya menerima bahan mentah, namun tidak menyerahkan produk jadi kepada negara-negara kolonial sebagai imbalannya. Imperialisme seringkali terjadi melalui ekspansi ke negara lain. Pelopor imperialisme kuno adalah Portugal dan Spanyol. Di sisi lain, imperialisme modern dipimpin oleh Inggris yang berhasil melakukan revolusi industri, dan negara-negara kapitalis lainnya seperti Jepang dan Amerika Serikat pun mengikuti jejaknya. Imperialisme modern dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan surplus kapitalnya melalui eksploitasi dan infiltrasi kebudayaan. Setelah tumbuhnya nasionalisme berkobar di luar Eropa, imperialisme modern berlindung dalam bentuk Protektorat, Wilayah Otonom, Negara mandat, dan Negara boneka (Riyadi, 2016).

Perkembangan industri di Eropa pada abad ke-19 menyebabkan negara-negara Eropa mencari pangsa pasar dan bahan baku industri di luar Eropa. Industrialisme adalah sebuah periode transformasi ekonomi yang dimulai oleh Inggris pada pertengahan abad ke-18 dan menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Mereka mengirim penjelajah untuk menemukan daerah baru. Mengungkap rahasia kekayaan alam benua Afrika jatuh ke tangan D. Livingstone dan H.M. Stanley. Secara bertahap D. Livingstone akhirnya bertemu S.M. pada tahun 1871. Stanley ditugaskan untuk mencarinya. D. Livingstone berhasil menemukan Sungai Zambezi, Lembah Kongo Atas, dan wilayah lainnya. Afrika

merupakan benua baru dengan sumber kekayaan yang luar biasa dan menjadi perhatian negara-negara lain, terutama negara-negara Barat, untuk mendominasi.

Dikabarkan beberapa negara sedang berebut untuk menguasai Afrika, namun Afrika begitu besar sehingga kekuatannya akan terbagi menjadi beberapa bagian tergantung negara mana yang menguasainya nantinya. Negara-negara yang mencoba mendominasi Afrika yaitu Jerman, Inggris Raya, Belgia, Prancis, dll (Riyadi, 2016).

B. Kolonialisme Dan Imperialisme Barat Di Afrika

Era pemerintahan kolonial di Afrika datang terlambat dan tidak berlangsung lama. Kekuatan kekaisaran Eropa menaklukkan Afrika pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1960-an sebagian besar sudah selesai. "Kolonialisme di Afrika" mengkaji bagaimana periode ini membentuk sejarah Afrika. Bagi sebagian orang Afrika, kolonialisme merupakan sebuah ancaman; kesempatan bagi orang lain. Merekonstruksi pola kompleks pada periode tersebut merupakan tantangan besar bagi sejarawan Afrika. Ketertarikan terhadap masa lalu kolonial di Afrika telah meningkat dan menyusut serta muncul kembali belakangan ini. Kolonialisme bukan hanya tentang tindakan orang-orang Eropa, tetapi juga tentang tindakan dan pemikiran orang-orang Afrika (Parker, 2007).

Perhatian harus dialihkan dari fakta bahwa Afrika telah berada di bawah kekuasaan Eropa selama waktu yang relatif singkat. Perjanjian Berlin, yang ditandatangani sekitar 120 tahun yang lalu, hanya menetapkan kolonialisme formal Barat selama sekitar 75-80 tahun di sebagian besar wilayah Afrika. Meskipun demikian, dampak kolonialisme ini sangat besar, tidak hanya pada sistem politik saat itu, tetapi juga pada masa depan politik Afrika. Perjanjian ini, dibuat tanpa persetujuan masyarakat adat, membagi Afrika di antara kekuatan Barat untuk mencegah konflik antar mereka. Hal ini mengakui dan mengesahkan wilayah pengaruh masing-masing kekuatan Eropa di Afrika, sementara memungkinkan perluasan tanpa campur tangan dari negara Barat lainnya. Tujuh negara Barat terlibat dalam kolonisasi Afrika, dan warisan kolonialisme ini masih terasa hingga hari ini (Hamid, 2004).

Kata imperialisme berasal dari istilah kekaisaran. Imperialisme mengacu pada praktik suatu

negara menguasai negara lain untuk memperluas wilayah, kekuasaan, dan pengaruhnya. Ambisi imperialis di Afrika didorong oleh perluasan perdagangan kompetitif di Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan hubungan komersial dan perdagangan dengan masyarakat Afrika dan melindungi hubungan tersebut dari pesaing Eropa lainnya. Eropa menjalin hubungan dagang dengan penguasa Afrika dan mendorong mereka untuk berdagang secara eksklusif dengan mereka. Para pedagang Eropa pada awalnya tidak tertarik untuk berekspansi ke pedalaman Afrika. Selama penguasa Afrika meyakinkan mereka akan pasokan budak dari pedalaman, mereka merasa tidak perlu melakukan ekspansi ke pedalaman. Pesatnya ekspansi industri membuat negara-negara Eropa beralih ke Afrika untuk mendapatkan pasokan bahan mentah yang murah dan tenaga kerja. Ekspansi kekaisaran Eropa ke pedalaman Afrika menyebabkan banyak petani Afrika terpaksa meninggalkan tanah mereka dan berubah menjadi buruh tani di perkebunan milik orang kulit putih, di mana mereka biasanya menjadi sasaran praktik eksploitatif yang kejam. Pemerintah-pemerintah Eropa mendorong warganya untuk menjadi pemukim permanen di koloni-koloni mereka di Afrika, dan memberi mereka lahan pertanian. Hilangnya lahan menyebabkan banyak kebencian di kalangan masyarakat Afrika. Mereka yang tetap tinggal di tanah dan perkebunan terpaksa bertani tanaman komersial seperti kapas, tembakau, kopi dan gula yang penting bagi industri Eropa dibandingkan makanan pokok tradisional mereka untuk bertahan hidup. Mereka masing-masing bertujuan untuk mengalahkan satu sama lain dengan bersaing untuk mendapatkan kendali yang lebih besar atas Afrika dan juga sumber daya alam serta pasokan tenaga kerja. Mereka juga mengklaim hak perdagangan eksklusif dengan koloninya. Praktik-praktik ini menjamin pasar di luar Eropa untuk penjualan kelebihan barang dan berujung pada praktik dumping. Dumping mengacu pada praktik pembongkaran barang dengan harga yang sangat rendah untuk menghancurkan persaingan lokal untuk mendapatkan pelanggan. Produsen di Afrika tidak dapat menandingi harga tersebut terutama karena tidak adanya dukungan serupa dari pemerintah sehingga mereka tidak mampu bertahan dalam persaingan di Eropa (SAHO, 2011).

Kolonialisme dan imperialisme di Afrika saling terkait dalam konteks sejarah. Kolonialisme mengacu pada proses kekuatan asing menaklukkan dan mendominasi wilayah lain untuk eksploitasi ekonomi, politik dan sosial. Pada saat yang sama, imperialisme

adalah ideologi atau kebijakan yang mendukung keunggulan politik dan ekonomi suatu negara atau sekelompok negara dibandingkan negara lain. Di Afrika, negara-negara Eropa menggunakan imperialisme untuk melakukan kolonisasi, membagi dan mengendalikan wilayah Afrika untuk eksploitasi dan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Jadi, meskipun kolonialisme adalah bentuk

penaklukan dan penguasaan secara fisik, imperialisme adalah ideologi atau politik yang mendukungnya.

C. Kolonialisme Kuno Dan Modern Mempengaruhi Afrika

Kolonialisme adalah sistem di mana suatu negara mempertahankan hubungan dengan negara asalnya sambil mengendalikan masyarakat dan sumber daya negara lain. Kolonialisme dapat dibedakan menjadi kolonialisme kuno dan kolonialisme modern (Miftakhuddin, 2019). Kolonialisme kuno di Afrika sendiri mengacu pada periode sejarah ketika negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris Raya, dan Prancis pertama kali mulai menyerbu, menjelajahi, dan menaklukkan wilayah di benua Afrika. Periode ini terjadi sebelum abad ke-19 dan seringkali mencakup berbagai aspek seperti eksplorasi, perdagangan, dan penaklukan wilayah baru. Berikut beberapa poin penting tentang kolonialisme kuno di Afrika (Thornton, 1998):

1. Eksplorasi dan Penemuan: Eksplorasi Eropa di benua Afrika dimulai pada Abad Pertengahan, namun kolonialisme yang lebih intens dimulai pada akhir abad ke-15. Eksplorasi ini didorong oleh keinginan untuk mencari jalur perdagangan baru ke Asia dan keinginan untuk menguasai sumber daya alam Afrika yang kaya.
2. Perdagangan Budak: Aspek penting dari kolonialisme kuno di Afrika adalah perdagangan budak. Negara-negara Eropa membawa budak dari Afrika ke Amerika untuk bekerja di perkebunan dan pertambangan. Perdagangan budak ini menimbulkan penderitaan besar bagi jutaan orang Afrika dan menjadi basis perekonomian Amerika pada saat itu.
3. Perdagangan Barang Dagangan: Selain perdagangan budak, negara-negara Eropa memperdagangkan barang-barang seperti kain, senjata, dan alkohol dengan Afrika

dengan imbalan emas, rempah-rempah, dan barang-barang lainnya. Hal ini mengubah dinamika ekonomi di banyak wilayah di Afrika, dan sering kali lebih menguntungkan pihak penjajah dibandingkan penduduk asli.

4. Kolonisasi dan Pendudukan: Negara-negara Eropa secara bertahap mulai menaklukkan dan menguasai wilayah di Afrika, sering kali menggunakan kekuatan militer dan diplomasi yang terampil. Mereka memperluas kekuasaannya dengan mendirikan koloni, membangun infrastruktur, mengendalikan perdagangan, dan mengorganisir komunitas lokal
5. Pembentukan Kelompok: Kolonialisme kuno di Afrika juga seringkali mengarah pada terbentuknya kelompok yang tidak memperhitungkan batas- batas budaya dan etnis yang ada. Negara-negara Eropa membagi Afrika tanpa mempertimbangkan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang sudah ada di wilayah tersebut.

Sedangkan kolonialisme modern di Afrika mengacu pada periode sejarah setelah abad ke-19 ketika kekuatan-kekuatan Eropa seperti Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, dan Portugal, secara intensif menguasai dan mengendalikan wilayah- wilayah di benua Afrika. Kolonialisme modern ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari kolonialisme kuno, dan dampaknya masih terasa dalam masyarakat Afrika hingga saat ini. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kolonialisme modern di Afrika (Pakenham, 1991):

1. Pembagian Wilayah oleh Kongres Berlin: Kongres Berlin pada tahun 1884– 1885 adalah pertemuan internasional di mana negara-negara Eropa membagi wilayah Afrika tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya atau etnis. Pembagian wilayah ini sering menyebabkan konflik etnis dan politik di banyak negara Afrika.
2. Eksploitasi Sumber Daya Alam: Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam Afrika sering menjadi pendorong kolonialisme modern di Afrika. Negara-negara Eropa mengambil alih tambang, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya di Afrika, seringkali dengan memaksa penduduk lokal bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.

3. Penjajahan dan Penindasan Politik: Negara-negara kolonial Eropa mendirikan pemerintahan kolonial di wilayah Afrika yang mereka kuasai, seringkali dengan menggunakan kekuatan militer untuk menekan perlawanan lokal. Ini menyebabkan penduduk asli ditindas secara politik dan dibatasi kebebasan mereka.
4. Perubahan Sosial dan Budaya: Afrika mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kolonialisme modern. Nilai-nilai Barat, agama, dan bahasa mulai masuk ke masyarakat Afrika, sering kali mengubah prinsip tradisional dan mengancam warisan budaya lokal.
5. Pembentukan Negara-Negara Pasca-Kolonial: Pembentukan negara-negara pasca-kolonial di Afrika sangat dipengaruhi oleh kolonialisme kontemporer. Banyak negara Afrika mewarisi sistem politik dan ekonomi yang dibuat oleh penjajah setelah mereka memperoleh kemerdekaan, yang seringkali tidak mencerminkan perbedaan budaya, etnis, atau politik yang ada di dalam negara tersebut.

D. Kolonialisme Dan Imperialisme Barat Mempengaruhi Industri Di Afrika Dan Hubungan Afrika Dengan Negara- Negara Eropa Barat

Kehidupan di Amerika dan Eropa mengalami transformasi dramatis pada akhir abad ke-18. Tatanan politik baru muncul sebagai hasil dari revolusi di Amerika dan Perancis. Pertanian, pengolahan bahan mentah, dan pembuatan barang menjadi lebih canggih berkat Revolusi Industri Inggris. Industrialisasi kemudian masuk ke Amerika dan Eropa. Industrialisasi memengaruhi perubahan politik, dan peningkatan urbanisasi dan masalah sosial adalah konsekuensi dari kemajuan ekonomi. Industrialisasi menimbulkan permintaan yang besar untuk bahan mentah, yang menyebabkan kolonisasi di Afrika dan Asia untuk mendapatkan sumber daya tersebut, dan sebagai akibatnya, Inggris menjadi negara demokrasi. Kepercayaan diri di Eropa dan Amerika semakin meningkat karena industrialisasi dan kemajuan teknologi. Ini juga meningkatkan kebanggaan nasional. Mereka memperoleh keyakinan yang kuat tentang kemampuan mereka. Di tengah dua Perang Dunia pada abad ke-20, hasrat mereka untuk kekuasaan mencapai puncaknya (SAHO, 2011).

Terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan penjajahan Prancis dan Inggris. Jika Inggris cenderung mengadopsi pendekatan pragmatis dalam mengelola tanah jajahannya dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, Prancis lebih condong pada sisi idealis dengan upaya penyebaran kebudayaannya selain eksploitasi sumber daya kolonial. Prancis banyak mengirim misionaris, serdadu, petani kecil, dan pegawai rendahan, sementara kaum terpelajar, dokter, guru, dan insinyur lebih banyak diutamakan daripada pedagang. Pegawai rendahan dan petani sering bermigrasi ke tanah jajahan demi mencari kehidupan yang lebih baik,

sementara kaum terpelajar sering menuju ke tanah jajahan untuk menyebarkan ide dan semangat Revolusi Prancis (Kurniawati, 2010).

Perluasan perdagangan kompetitif di Eropa mendorong semangat imperialisme Afrika. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga hubungan perdagangan dan komersial dengan orang Afrika dan menjaganya dari pesaing Eropa lainnya. Penguasa Afrika dipaksa untuk berdagang secara eksklusif dengan Eropa setelah Eropa menjalin hubungan dagang dengan mereka. Pada awalnya, para pedagang Eropa tidak tertarik untuk pergi ke pedalaman Afrika karena mereka diyakinkan oleh penguasa Afrika akan pasokan budak dari pedalaman, sehingga mereka merasa tidak perlu pergi ke pedalaman. Negara-negara Eropa beralih ke Afrika untuk mendapatkan bahan mentah murah dan tenaga kerja budak sebagai akibat dari ekspansi industri mereka yang pesat. Afrika Barat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Eropa. Industri Eropa sangat menginginkan minyak sawit Afrika untuk keperluan industri. Keinginan untuk keuntungan yang lebih besar mengarah pada peningkatan produksi industri. Negara-negara Eropa menyadari bahwa memiliki wilayah Afrika akan memungkinkan mereka untuk memperoleh pasokan bahan mentah yang sangat murah yang akan memastikan keberhasilan industri dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Untuk memenuhi permintaan bahan mentah di Eropa, pemerintah kolonial mengawasi pertanian di wilayah jajahan (SAHO, 2011).

Banyak petani Afrika terpaksa meninggalkan tanah mereka dan bekerja sebagai buruh tani di perkebunan milik orang kulit putih, di mana mereka biasanya menjadi sasaran praktik eksploitatif yang kejam, setelah kekaisaran Eropa menyebar ke pedalaman Afrika. Pemerintah Eropa mendorong penduduknya untuk menjadi pemukim permanen di koloni-

koloni mereka di Afrika, memberikan mereka lahan pertanian. Masyarakat Afrika sangat benci karena kurangnya lahan. Untuk bertahan hidup, penduduk yang tinggal di tanah dan perkebunan terpaksa bertani tanaman komersial seperti kapas, tembakau, kopi, dan gula, yang sangat penting bagi industri Eropa. Mereka juga membayar harga yang sangat rendah untuk hasil panen, terutama jika dibandingkan dengan harga jual hasil panen tersebut setelah diolah di Eropa. Maka tidak mengherankan jika penentangan awal terhadap pemerintahan

kolonial Afrika berkisar pada pengembalian lahan kepada pemilik asli (SAHO, 2011).

Tidak semua negara Eropa ingin menguasai Afrika. Hanya negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Jerman yang berusaha untuk menguasainya, bersama dengan negara-negara lemah seperti Spanyol, Portugal, dan Italia, yang hanya memiliki sedikit wilayah di Afrika. Inggris dan Prancis adalah pemimpin imperialisme di Afrika. Kedua negara ini bersaing untuk menguasai ekonomi dan politik Eropa. Mereka berperang satu sama lain untuk mengambil alih Afrika, sumber daya alam, dan tenaga kerja. Mereka juga mengklaim hak eksklusif untuk berdagang dengan koloninya. Praktik-praktik ini mencegah dumping dan menjamin penjualan kelebihan barang di pasar di luar Eropa. Dumping adalah metode pembongkaran barang dengan harga sangat rendah untuk menghancurkan persaingan lokal untuk mendapatkan pembeli. Karena produsen Afrika tidak menerima dukungan pemerintah yang cukup untuk bersaing di Eropa, mereka tidak dapat menandingi harga tersebut. Hal ini menghentikan pertumbuhan industri dan kekayaan Afrika dan mengunci benua tersebut ke dalam hubungan ekonomi yang tidak adil dengan Eropa. Para produsen Afrika hampir tidak mampu bertahan hidup dengan hasil bumi dan barang kebutuhan pokok yang murah. Selain itu, negara-negara Afrika terus bergantung pada bantuan dan pinjaman Eropa. Beban pembayaran kembali pinjaman ini telah menyebabkan banyak negara Afrika menjadi lumpuh (SAHO, 2011).

E. Rangkuman

Kolonialisme dan imperialisme barat di Afrika adalah sejarah yang melibatkan pengambilalihan dan pengawasan terhadap negara-negara di Afrika oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Proses ini telah mempengaruhi sejarah, budaya, ekonomi, dan politik Afrika selama lebih dari satu abad, dari awal tahun 1800-an hingga kemerdekaan

Afrika pada abad 20. Kolonialisme yang terjadi di Afrika terbagi menjadi dua yaitu kolonialisme kuno dan kolonialisme modern. Kolonialisme kuno di Afrika mengacu pada periode sejarah ketika negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris Raya, dan Prancis pertama kali mulai menyerbu, menjelajahi, dan menaklukkan wilayah di benua Afrika. Periode ini terjadi sebelum abad ke-19 dan seringkali mencakup berbagai aspek seperti eksplorasi, perdagangan, dan penaklukan wilayah baru. Sedangkan kolonialisme modern di Afrika mengacu pada periode sejarah setelah abad ke-19 ketika kekuatan-kekuatan Eropa seperti Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, dan Portugal, secara intensif menguasai dan mengendalikan wilayah-wilayah di benua Afrika. Selain itu kolonialisme dan Imperialisme bangsa barat dalam kehidupan di Amerika dan Eropa pada akhir abad ke-18, yang meliputi revolusi politik di Amerika dan Prancis serta Revolusi Industri Inggris, juga memberikan dorongan penting bagi industrialisasi di Afrika.

F. Latihan

Silakan kerjakan latihan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Bagaimana kolonialisme dan imperialisme barat di Afrika?
2. Bagaimana kolonialisme kuno dan modern mempengaruhi Afrika?
3. Bagaimana kolonialisme dan imperialisme barat mempengaruhi industri di Afrika? Dan hubungan Afrika dengan negara- negara Eropa barat?

G. Rujukan

Hamid, H. B. (2004). Kolonialisme dan Politik Pasca Kemerdekaan di Afrika.

Jurnal Sejarah.

Kurniawati. (2010). *Berakhirnya Romantisme Kolonial Prancis Di Francophone Afrika* .

Miftakhuddin. (2019). *Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju*

Hegemoni. Jawa Barat: CV Jejak.

- Miftakhuddin, M. (2020). *Kolonialisme: Eksploitasi dan pembangunan menuju hegemoni*.
- Pakenham, T. (1991). *The Scramble for Africa: White Man's Conquest of the Dark Continent from 1876 to 1912*.
- Parker, J. (2007). *African History*. Oxford Academic.
- Riyadi. (2016). *Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern*. Surabaya: Unessa Press.
- SAHO. (2011). Imperialisme dan Sosialisme dalam konteks Afrika.
- Thornton, J. (1998). *Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400- 1680*.
- Wardhani, B. L. (2016). Respon Poskolonial terhadap Intensifikasi Pendidikan Kolonial di Afrika. *Jurnal Global Strategis Unair*.

BAB 6

KONFLIK-KONFLIK YANG BERKEMBANG DI AFRIKA (KRISIS ETHIOPIA, KRISIS FASHODA, KRISIS MAROKO 1, DAN KRISIS MAROKO 2)

A. Latar Belakang

Benua Afrika terletak pada 35° Lintang Utara (LU) sampai 34° Lintang Selatan (LS), dan 17° Bujur Timur (BB) sampai 51° Bujur Timur (BT). Sebelah Utara Benua Afrika berbatasan dengan Laut Mediterania, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Afrika merupakan benua terbesar ketiga di dunia setelah Benua Asia dan Amerika. Benua ini memiliki luas sekitar 30.200.000 km² ditambah dengan pulau yang saling berdekatan dan populasi penduduk di Benua Afrika mencapai 1,1 miliar penduduk atau sekitar 15% dari total keseluruhan penduduk dunia (Nindiati, 2016)

Gambar 1.1 Peta Benua Afrika



Sumber : Gramedia.com

Benua Afrika memiliki kekayaan alam yang meimpah dan satwanya yang sangat banyak, sehingga pada awal kemunculan benua afrika, benua ini menjadi salah satu benua yang sering diperebutkan. Selain itu, benua afrika juga merupakan benua yang kaya akan keberagaman ras, suku, budaya dan bahasanya. Bahkan terdapat seperempat bahasa di dunia yang hanya diucapkan di benua Afrika (Faiz, 2020)

Afrika sebagai negara yang besar dan kaya tentu tidak terlepas dengan adanya konflik dan ketidakstabilan baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Krisis Ethiopia, krisis Fashoda, krisis Maroko 1, dan krisis maroko 2 merupakan beberapa bentuk ketidakstabilan yang terjadi di Benua Afrika. Keempat konflik tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika internal negara-negara terkait tetapi juga interaksi antara kepentingan lokal.

Krisis Ethiopia sering dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Tigray, dimana konflik tersebut terjadi karena ketegangan antar etnis dan politik. Konflik yang terjadi di Ethiopia ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang cukup parah, hingga ribuan orang kehilangan nyawa dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal (Sari, 2022).Krisis ini menarik perhatian karena dampaknya yang mempengaruhi stabilitas benua Afrika.

Krisis Fashoda adalah konfrontasi kolonial pada tahun 1898 antara Inggris dan Prancis yang mencapai puncaknya di kota Fashoda, sekarang Kodok, di Sudan. Krisis itu merupakan salah satu elemen dari “Scramble for Africa” – bagian dari sejarah yang ada sekarang, hampir semua negara Eropa bertarung di masa itu untuk wilayah di Afrika di akhir abad ke-19 (Arifian, 2020)

Krisis Maroko 1 dimulai ketika Kaisar Wilhelm II dari Jerman tiba di Tangier, Maroko, pada bulan Maret 1905, dan menyatakan bahwa Jerman mendukung Sultan Maroko sebagai penguasa kerajaan yang bebas dan merdeka. Pernyataan ini sengaja menantang kekuasaan Prancis di Maroko. Setelah itu, sultan menolak perubahan pemerintahan yang diusulkan Prancis dan mengundang negara-negara besar dunia untuk berkumpul di sebuah konferensi, yang mengakibatkan konflik di antara negara-negara Eropa. Ketika Jerman mengancam aliansi dengan Maroko pada bulan Juni, krisis ini muncul. Namun, itu diselesaikan oleh Konferensi Algeciras pada tahun 1906.

Krisis Maroko 2 atau krisis Agadir adalah bencana global yang terjadi dari tahun 1911 hingga 1912. Pengiriman kapal perang Jerman ke pelabuhan Agadir di Maroko menyebabkan krisis diplomatik, yang pada akhirnya berakhir dengan perjanjian diplomatik. Krisis Agadir telah membuat konfrontasi Prancis dengan Jerman lebih sulit, dan hubungan Jerman dengan Prancis dan Inggris menjadi lebih buruk. Krisis ini juga meningkatkan Entente Anglo-Prancis (MacMillan, 2013)

Meskipun terjadi dalam berbagai kurun waktu yang berbeda-beda, namun konflik-konflik ini saling berkaitan antara satu sama lain. Studi kasus ini membantu kita memahami bagaimana

sejarah krisis yang pernah terjadi di benua Afrika. Maka dari itu, pembahasan ini difokuskan pada krisis Ethiopia, krisis Fashoda, krisis Maroko 1, dan krisis Maroko 2.

B. Krisis Ethiopia

Ethiopia adalah negara Federasi yang beribukota di Addis Ababa. Negara yang nama resminya adalah Republik Demokratik Federal Ethiopia beribukota di Kota Addis Ababa memiliki 9 negara bagian, yaitu Afar, Tigray, Orokia, Somali, Gambela, Banshangul/Gumuz, Harari, Dire Dawa, dan Addis Ababa. Ethiopia merupakan negara dengan wilayah terbesar kesepuluh di Benua Afrika, di mana masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku serta budaya yang berbeda-beda. Suku Oromo, Amhara, dan Tigre merupakan etnis dengan popuasi terbesar di Ethiopia, sedangkan Somali, Sidama, Gurage, Wolaita, Afar, Kimbata, Hadiya, dan beberapa etnis lainnya yang menyumbang sekitar 28% dari keseluruhan penduduk Ethiopia merupakan suku minoritas. Evolusi konstelasi keamanan politik dunia tidak lepas dari konflik, baik antarnegara maupun internal yang dikenal dengan perang saudara (Wijayanti, 2023)

Tigray adalah bagian Ethiopia. Konflik Tigray berasal dari konflik Ethiopia yang lama. Negara ini terdiri dari sepuluh wilayah dan dua kota, yang masing-masing memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan memiliki penegakan hukum lokal dan milisi (Mackintosh, 2021). Sebelum konflik saat ini, Tigray dan pemerintah Eritrea memiliki sejarah konflik yang lama karena perbatasan yang sama. Sengketa perbatasan ini berperan penting dalam perang 1998–2000 antara Ethiopia dan Eritrea (BBC, 2020). Konflik ini dimulai dengan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menyerang Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), yang dia sebut sebagai "operasi penegakan hukum" pada November 2020. Bahkan sebelum perang, Abiy tampaknya berniat menghancurkan TPLF, kelompok politik pemberontak yang telah menguasai Ethiopia selama hampir 30 tahun (Sari, 2022).

Kaisar Haile Selassie menambahkan Eritrea ke wilayahnya pada tahun 1962, Kaisar Menelik memperoleh Ogaden Somali melalui perjanjian pembagian dengan Inggris dan Itali. Ini adalah langkah-langkah untuk memperluas wilayah kolonial. Jika koloni Ethiopia diatur dengan cara yang sama seperti koloni Eropa, maka dekolonisasi juga harus terjadi di perbatasan Ethiopia. Ada yang mengatakan bahwa alasan utama mengapa konflik serupa tidak dapat diselesaikan melalui peleburan kedaulatan konfederal atau pemin dahan kedaulatan antar Afrika adalah intervensi asing. Itu pasti benar karena hanya bantuan militer dari negara lain, atau bantuan dari Soviet dan Kuba setelah 1976, yang mempertahankan aneksasi Ethiopia. Meskipun demikian, intervensi asing tidak

akan dapat mencegah perubahan progresif di perbatasan warisan kolonial; negara-negara Afrika yang bersangkutan harus bersedia atau berkomitmen untuk melakukannya (Davidson, 1980).

Setelah kerajaan Aksum runtuh, komunitas Muslim menjadi lebih banyak dan dapat membentuk kerajaan sendiri. Contohnya adalah kerajaan Shewa dinasti Makhzumi (896M–1285M) dan kesultanan Aufat dinasti Walashma (1285M–1415M), yang berjiran dengan kerajaan Kristiani dan pagan (animisme) yang sudah ada (Abdullahi, 2017). Selain itu, beberapa kota Muslim di Ethiopia diperintah sendiri atau oleh dinasti Solomonid, kerajaan Kristiani yang baru muncul di Ethiopia dari 1270M hingga 1974M. Kerajaan Ethiopia baru-baru ini percaya bahwa kebijakan politik dan iman Kristiani mereka diancam oleh masuknya Islam. Sejarah Ethiopia penuh dengan peperangan dari 11 juta hingga 15 juta tahun lalu antara kerajaan Kristiani dan Islam. Akhir-akhir ini, Portugis berpartisipasi dalam pertempuran ini dengan niat untuk mengambil alih laluan Laut Merah dengan membantu kerajaan Kristian Ethiopia, dipimpin oleh Pangeran John (Wildan Zaqi, 2021)

2.1 Krisis Fashoda

Di tahun 1875, sekitar 10,8% wilayah Afrika berada di bawah pengaruh Bangsa Barat. Pada saat itu, 1.250.000 m² wilayah Afrika dikuasai oleh bangsa Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris yang memiliki hampir sebagian besar wilayah Afrika. Ketertarikan bangsa Barat kepada Afrika kian bertambah ketika mengetahui kekayaan alam di Afrika, seperti yang diungkapkan oleh penjelajah terkenal yaitu H.M Stanley. Afrika diperebutkan karena memiliki potensi komersial yang besar, penting untuk memenuhi kebutuhan industri, penduduk Afrika dapat dijadikan kekuatan untuk berperang, memiliki lokasi yang strategis untuk berperang, dan dapat digunakan sebagai tempat perpindahan atau pengungsian penduduk (Mansbach, 2021)

Persaingan untuk memperluas jajahan diantara negara-negara Barat tidak dapat dihindari, dan bahkan sering menimbulkan krisis, akan tetapi krisis ini tidak sampai membawa peperangan. Seperti Krisis Fashoda yang terjadi pada tahun 1898, ketika Prancis dan Inggris memperluas wilayah kolonial mereka di Afrika, mereka berusaha untuk menguasai Afrika dari utara ke Selatan dan sebaliknya hingga bertemu di daerah yang disebut dengan Fashoda di Sudan (Kurniawati, 2010).

Fashoda didirikan oleh tentara Mesir pada tahun 1855 sebagai basis untuk memerangi perdagangan budak Arab di Afrika Timur. Letaknya berada di dataran tinggi sepanjang sekitar seratus mil garis pantai berawa di salah satu dari sedikit tempat di mana perahu dapat membongkar muatan. Daerah sekitarnya, meskipun berawa, padat penduduk Orang Shilluk, dan pada pertengahan tahun 1870-

an, Fashoda menjadi pasar dan kota administratif yang ramai. Orang Eropa pertama yang tiba adalah seorang Jerman bernama Georg Schweinfurth pada tahun 1869 dan seorang Rusia bernama Wilhelm Junker pada tahun 1876. Junker menggambarkan sebagai "tempat perdagangan yang cukup besar (Jones, 2010).

Perselisihan tersebut muncul dari keinginan bersama masing-masing negara untuk menghubungkan wilayah kolonialnya yang berbeda di Afrika. Tujuan Inggris Raya adalah menghubungkan Uganda ke Mesir melalui jalur kereta api dari Tanjung Harapan ke Kairo, sementara Perancis, dengan mendorong ke arah timur dari pantai barat, berharap untuk memperluas kekuasaannya melintasi Afrika Tengah dan Sudan (Amy, 2024)

Kapten Jean Marchand dari Prancis dan Jenderal Herbert Kitchener dari Inggris saling berhadapan di rawa Sungai Nil pada tanggal 19 September 1898. Pertemuan ini menciptakan krisis yang berlangsung selama enam bulan. London menganggap Sudan sebagai wilayah Inggris (Eubank, 1960). Khawatir terjadi perang, Perancis memutuskan menarik pasukannya dari Sudan. Krisis Fashoda merupakan peristiwa yang memalukan bagi Prancis, sehingga mereka berusaha keras untuk mencegah peristiwa tersebut terjadi lagi, terutama ketika berhadapan dengan Inggris atau kemudian Amerika Serikat yang juga Anglo Saxon (Kurniawati, 2010)

Terusan Suez yang dibangun oleh Ferdinand de Lesseps pada tahun 1869 juga menjadi bagian dari konflik di atas. Pada awalnya Inggris dengan tegas menolak rencana pembangunan Terusan Suez karena dianggap akan menimbulkan ancaman terhadap India. Namun kemudian Inggris setuju dengan catatan mereka juga turut memegang saham PT Internasional Terusan Suez. Di sisi lain Mesir mempunyai masalah keuangan sehingga mengajukan proposal kepada Prancis, akan tetapi Prancis tidak dapat memenuhi proposal tersebut dikarenakan Prancis baru saja membayar hutang perangnya pada Jerman. Inggris yang mengetahui hal ini kemudian memanfaatkan dengan membeli seluruh saham Terusan Suez dan kemudian menguasainya. Bahkan akhirnya negara Mesir berhasil dikuasai Inggris dan menjadi negara persemakmuran Inggris bernama "*Anglo Egyptian Sudan*" (Riyadi, 2016).

C. Krisis Maroko 1

Krisis Maroko Pertama tahun 1905, juga dikenal sebagai Krisis Tangier, adalah konflik diplomatik antara Jerman, Perancis, dan Inggris tentang kekuasaan dan pengaruh di wilayah Maroko. Maroko berada di bagian barat laut Afrika, lokasinya sangat strategis karena berbatasan dengan Samudera

Atlantik dan Laut Alboran milik Aljazair di sebelah timur, di sebelah utara, Selat Gibraltar memisahkan Maroko dengan Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya (Adnan Adwitama, 2022). Selama awal abad ke-20, krisis ini memengaruhi keseimbangan kekuatan di Eropa dan hubungan antara negara-negara besar.

Sebagai negara yang letaknya sangat strategis, akhirnya justru menjadikan Maroko sebagai incaran negara-negara Eropa yang Tengah gencar-gencarnya meluaskan izin kekuasaan negaranya khususnya di wilayah Afrika, karena Maroko terbilang cukup dekat dengan Eropa. Negara Eropa yang paling dekat Grebutannya dengan Maroko adalah Spanyol yang sempat berusaha mengirimkan pasukan ke Maroko karena kesepakatannya dengan Prancis, tetapi dapat diabaikan jaminannya oleh Inggris. Pada prinsipnya Inggris tidak menginginkan ada kekuasaan permanen Perancis manapun di Maroko. Prancis justru sangat berkeinginan menguasai Maroko, walau Doremsen pernah memilikinya pada 1873 tetapi diserahkan Prancis, ketika Prancis mendirikan Pangkalan militer di Fez, negara-negara Eropa semuanya protes. Maka dari itu agar masalah ini tidak memanasi, diperlukan konvensi untuk membahas masalah Maroko yang diadakan pada 1880, dan dihadiri oleh 15 negara Eropa dan Amerika Serikat di Madrid. Hasilnya “Status quo Sultan Maroko harus dipertahankan dan Maroko tetap menjalankan politik pintu terbuka”.

Pada tahun 1903, Ratu Victoria dan Raja Edward VII lebih suka Prancis daripada Jerman. Prancis awalnya khawatir karena persatuan dengan Inggris dapat melemahkan Persekutuan Prancis-Rusia dan menghasilkan kembali Dreikaiserbund. Namun, Inggris akhirnya meminta Prancis untuk menghentikan konflik di koloni-koloni mereka. Konflik tersebut dapat diselesaikan di Newfoundland, Afrika Barat, dan Afrika Tengah. Tidak ada konflik Inggris-Prancis yang terjadi di Mesir, tetapi di Maroko. Bagi Inggris, penguasaan Prancis terhadap Maroko sangat berbahaya karena mereka berhadapan dengan Jabaltarik dan membuatnya sulit untuk mengawasi Laut Tengah. Karena itu, Inggris ingin jangan ada negara yang menguasai wilayah yang menerima Jabaltarik (Soeratman Darsiti., 2012).

Krisis pertama di Maroko muncul setelah Inggris berjanji akan mendukung klaim Prancis atas negara itu. Pengaruh Prancis yang terus meningkat di Maroko, yang melanggar perjanjian sebelumnya, menghilangkan posisi strategis Jerman di Afrika Utara (Richard, 2021). Maka, pada Maret 1905, Kaisar Wilhelm II berlayar ke Tangier, Maroko, dan menyatakan menentang kolonialisasi Perancis di Maroko. Jerman mendesak kemerdekaan Maroko dari Prancis. Sementara itu Inggris dan Italia mendukung dominasi Prancis di Maroko dan Tunisia. Tantangan Jerman ini

memicu diadakannya Konferensi Algeciras 1906. Dalam konferensi itu Jerman berusaha memecah-belah musuh-musuhnya tetapi justru mendapati dirinya terisolasi, hanya Austria-Hongaria yang mendukung Jerman, sedangkan Prancis mendapat dukungan penuh dari Inggris. *Entente Cordiale* pun ada gunanya. Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat menganggap Jerman sebagai ancaman untuk menaklukkan Eropa setelah Jerman mengintervensi kemerdekaan Maroko, yang sebelumnya merupakan koloni Prancis. Jerman mampu menjadi penguasa dunia (*new world's power*) jika mereka tidak diatasi dengan taktik diplomatik seperti *encirclement* (pengepungan untuk mengisolasi) (Arifian, 2020).

Delcasse mengunjungi London pada tahun 1903. Mesir dibahas, dan mereka berhasil mengatasi semua masalah. Pada tahun berikutnya, Rusia dan Jepang terlibat dalam perang. Prancis tidak membantu Rusia dalam hal ini karena netral. Dua bulan kemudian, perjanjian antara Inggris dan Prancis yang dikenal dengan *Morocco Egyptain Agreement* atau *Entente Cordiale* (1904), menyatakan bahwa "Prancis melepaskan kepentingannya di Mesir, sebaliknya Inggris tidak keberatan jika Prancis menanamkan kekuasaan di Maroko, selain daerah Pantai Utara yang akan diserahkan kepada Spanyol, negeri yang tidak kuat, tidak boleh ada benteng di depan Jabaltarik".

D. Krisis Maroko 2

Krisis kedua Maroko, atau juga dikenal sebagai Krisis Agadir. Prancis merasa perlu memantapkan kedudukannya di Maroko, seperti yang ditunjukkan oleh konferensi Algeciras. Namun, ketika rakyat Maroko mulai melakukan perlawanan terhadap Prancis, situasi di negara itu menjadi kacau. Perubahan yang terjadi dan bagaimana Prancis menangani masalah itu membuat Jerman kembali ke masalah Maroko dengan mengakui kemerdekaannya pada tahun 1808. Akibatnya, pemberontakan semakin meningkat. Pada tahun 1911, Fez, ibu kota Maroko, bahkan dapat dikepung oleh pemberontak, dan tentara Prancis menduduki kota. Karena tindakan ini, Jerman harus mengirimkan kapal perang dan kapal meriam "*Panther*" ke Agadir, yang terletak di pantai Samudera Atlantik. Munculnya "*Panther*" di Agadir merupakan tantangan bagi Prancis dan Inggris. Inggris percaya bahwa tindakan Jerman mengancam perdamaian global karena melibatkan Prancis, Jerman, dan Inggris, tiga negara besar. Namun, situasi ini dapat diselesaikan dengan perjanjian yang, pada tanggal 30 Maret 1912, menetapkan otoritas Prancis atas Maroko dan menuntut Jerman untuk meninggalkannya. Jerman juga mendapatkan sebagian daerah Prancis di Kongo sebagai imbalannya. Krisis Agadir berakhir pada 1 Juli 1911 ketika Sultan Abdelhafid mendeklarasikan Maroko sebagai protektorat setelah setuju untuk menyerahkan kedaulatan negara

tersebut kepada Prancis. Menurut (Rasyid, 2024), nasionalis Maroko menganggap perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan.

E. Rangkuman

Afrika sebagai negara yang besar dan kaya tentu tidak terlepas dengan adanya konflik dan ketidakstabilan baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Krisis Ethiopia, krisis Fashoda, krisis Maroko 1, dan krisis Maroko 2 merupakan beberapa bentuk ketidakstabilan yang terjadi di Benua Afrika. Keempat konflik tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika internal negara-negara terkait tetapi juga interaksi antara kepentingan lokal.

1. Krisis Ethiopia sering dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Tigray, dimana konflik tersebut terjadi karena ketegangan antar etnis dan politik.
2. Krisis Fashoda adalah konfrontasi kolonial pada tahun 1898 antara Inggris dan Prancis yang mencapai puncaknya di kota Fashoda, sekarang Kodok, di Sudan.
3. Krisis Maroko 1 dimulai ketika Kaisar Wilhelm II dari Jerman tiba di Tangier, Maroko, pada bulan Maret 1905, dan menyatakan bahwa Jerman mendukung Sultan Maroko sebagai penguasa kerajaan yang bebas dan merdeka.
4. Krisis Maroko 2 atau krisis Agadir adalah bencana global yang terjadi dari tahun 1911 hingga 1912. Pengiriman kapal perang Jerman ke pelabuhan Agadir di Maroko menyebabkan krisis diplomatik, yang pada akhirnya berakhir dengan perjanjian diplomatik.

F. Latihan

Kerjakan latihan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Bagaimana kondisi Ethiopia saat terjadi krisis Tigray?
2. Apakah penyebab krisis yang terjadi di Fashoda?
3. Dimanakah pusat krisis Maroko 1 terjadi?
4. Mengapa terjadi krisis Maroko 2, setelah krisis Maroko 1 berakhir?

G. Rujukan

Arifian, A. (2020). *Sejarah Lengkap Perang Dunia I: 1914-1918*. . Anak Hebat Indonesia.
BBC. (2020). *Krisis Tigray di Ethiopia*.

- Davidson, B. , & W. B. (1980). Benua Afrika Dalam Pergolakan. . *Analisis Csis*.
- Eubank, K. (1960). The Fashoda Crisis Re-Examined. *The Historian*.
- Faiz, M. (2020). *Sejarah Kawasan Afrika dan Andalusia*. . Institus Agama Islam Negeri .
- Jones, J. (2010). *Insiden Fashoda*.
- Kurniawati, K. (2010). Berakhirnya Romantisme Kolonial Prancis Di Francophone Afrika. . *Jurnal Sejarah Lontar*, 7(2), 1-9.
- Mackintosh, E. (2021). *Ethiopia is at war with itself. Here's what you need to know about the conflict*. . CNN Indonesia.
- MacMillan, M. (2013). The War that Ended Peace: The Road to 1914. *Random House*.
- Mansbach, R. W. , E. Al. (2021). *Perang Dunia: Seri Pengantar Politik Global*. Nusamedia.
- Nindiati, D. Putri. (2016). *Dampak Penyebaran Virus Ebola Dalam Perspektif Human Security di Afrika*. Universitas Jember.
- Rasyid, M. Fajar. , N. Siti. , dan D. Zaini. (2024). Penajajahan Negara-Negara Barat Atas Negara-Negara Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*.
- Sari, V. Y. , N. N. , & N. U. (2022). Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray. Intermestic. *Journal of International Studies*, 7(1), 154-180.
- Soeratman Darsiti. (2012). *Sejarah Afrika*. Ombak.
- Wijayanti, D. T. , & A. S. N. (2023). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 5(2), 82-89. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 82-89.
- Wildan Zaqi, F. (2021). *Tindak Tutur Ekspresif Dalam Novel Zhillul Aswad Karya Najib Kailani: Kajian Pragmatik*. Uin Sunan Gunung Djati.

BAB 7

TERBENTUKNYA NEGARA MERDEKA ZAIRE (JAJAHAN BELGIA)

A. Latar Belakang

Kongres Berlin pada tahun 1884-1885 adalah pertemuan penting di antara negara-negara Eropa yang membagi-bagi wilayah Afrika tanpa memperhatikan identitas budaya atau etnis masyarakat setempat. Di antara hasilnya, Raja Leopold II dari Belgia mendapatkan kedaulatan atas Kongo dalam bentuk kepemilikan pribadi (1885-1908), yang dikenal sebagai Kongo Bebas, sebelum akhirnya dialihkan menjadi koloni Belgia. Pemerintahan Belgia di Kongo ditandai dengan eksploitasi brutal sumber daya dan penggunaan tenaga kerja paksa, yang menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk setempat.

Perkembangan ini juga terkait dengan perluasan wilayah Belgia di Afrika, termasuk Rwanda dan Burundi, yang menjadi bagian dari jajahan Belgia setelah Perang Dunia I. Kebijakan pemerintahan Belgia di wilayah-wilayah ini seringkali menciptakan ketegangan etnis dan konflik internal, yang kemudian mempengaruhi proses nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo) muncul sebagai subjek penting, mengalami perjuangan melawan penjajahan Belgia dan kemudian memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960. Pergerakan nasionalis di Zaire dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk penindasan kolonial, eksploitasi sumber daya alam, dan perjuangan untuk otonomi politik dan ekonomi. Studi tentang proses ini dapat memberikan wawasan yang dalam tentang dinamika kolonialisme, nasionalisme, dan perubahan politik di Afrika.

B. Terbentuknya Negara Merdeka Zaire

Negara Zaire yang kini dikenal dengan nama Republik Demokratik Kongo terbentuk setelah memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960. Proses pembentukan ini dipengaruhi oleh gerakan nasionalis Kongo yang dipimpin oleh tokoh seperti Patrice Lumumba. Setelah kemerdekaan, negara ini mengalami masa ketegangan politik dan konflik internal, yang berpuncak pada perebutan kekuasaan antara tokoh lokal dan kekuatan asing. Pada tahun 1971,

Presiden Mobutu Sese Seko mengubah nama negara menjadi Zaire, yang bertahan hingga tahun 1997, ketika namanya diubah menjadi Republik Demokratik Kongo (Gerard, 2015).

Warisan kolonialisme Belgia hasil perjanjian Kongres Berlin berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mempengaruhi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan politik, ekonomi dan sosial pada masa pasca kemerdekaan (Gerard, 2015).

C. Leopold Berdaulat di Kongo 1885-1905

Leopold memperoleh Kongo bukan karena dipilih secara publik oleh seorang perwakilan demokrasi tetapi melalui penipuan dan manipulasi. Pada saat perdagangan budak sedang berlangsung mengkritik dia perlu menggunakan cara lain untuk mencapai koloni Afrika. Dia pertama kali mencari penjelajah untuk melakukannya memetakan wilayah di Afrika Tengah dan menandatangani perjanjian dengan pemimpin setempat. Setelah itu tercapai, dia akan menunjukkan perjanjian tersebut kepada negarawan mana pun untuk lebih melegitimasi posisi dan kendalinya atas negara tersebut. Namun, perjanjian saja tidak cukup dan Leopold menciptakan kemanusiaan organisasi untuk membantu “memadatkan” Kongo padahal sebenarnya mereka diciptakan untuk mendanai eksplorasinya Kongo dan memberinya pengakuan dari negara-negara besar. Dengan orang-orang seperti Stanley dan Henry Shelton Sanford, Leopold mendapatkan pengakuan yang dia butuhkan dan melalui Konferensi Geografis dan Konferensi Berlin dia akhirnya memiliki koloninya (Johnson, 2014).

Ketika Leopold menjajah Negara Bebas Kongo, dia berusaha mengambil sumber daya dengan harga murah. Beberapa sumber daya yang penting adalah gading dan karet, keduanya memiliki nilai yang tinggi permintaan di seluruh dunia. Untuk mengekstraksi sumber daya ini, Leopold membentuk pasukan militer organisasi dan mengizinkan perusahaan konsesi untuk menyebar di sepanjang Negara Bebas Kongo untuk mengatur mendirikan kampekstraksi. Leopold dan perusahaan-perusahaan ini akan menggunakan kerja paksa untuk memperolehnya sumber daya dan dengan demikian memperoleh keuntungan yang tak terukur (Johnson, 2014).

Tindakan lain yang diambil Leopold untuk mengeksploitasi Kongo adalah melalui pengiriman Para misionaris Katolik, yang tentu saja mendukung perjuangannya karena dia mendanai mereka Para misionaris Katolik ini membentuk sekolah atau koloni untuk mendidik anak-anak Kongo yang bermanfaat bagi Negara. Johannes Fabian, dalam artikelnya “Misi dan Kolonisasi Bahasa Afrika: Perkembangan di Bekas Kongo Belgia,” membahas organisasi dan struktur sekolah. Salah satu aturannya adalah, “Mengajar bahasa nasional Belgia adalah bagian penting

dari kurikulum. Hal ini patut diperhatikan karena mengapa sekolah-sekolah ini tidak mengajarkan bahasa nasional yang penting bagi kehidupan sehari-hari dan komunikasi dalam diri mereka? Ewans menjawab hal ini dengan menyatakan, “Ada juga bias yang kuat dalam mendukung persiapan orang Afrika semata-mata menjadi anggota angkatan kerja yang dibutuhkan oleh pertambangan, pertanian dan perusahaan lain.” Tentu saja Leopold merasakan hal itu agar anak-anak ini tumbuh dan bekerja secara efektif dan efisien di koloninya, mereka harus bisa membaca dan berbicara bahasa Belgia. Sekolah-sekolah misi Katolik ini bekerja secara serempak dan di bawah wewenang Leopold. Mereka hanya mengajari anak-anak apa yang berguna bagi Leopold dan pengikutnya perkembangan Kongo. Namun, jika kita menggali lebih dalam beberapa alasan sebenarnya di baliknya sekolah-sekolah Katolik ini mereka dapat menemukan niat eksploitatif Leopold yang sebenarnya. Leopold menulis, “Saya yakin kita harus mendirikan tiga koloni anak. Satu di Kongo atas dekat ekuator, khususnya militer, dengan pendeta untuk pengajaran agama dan kejuruan pendidikan. Satu di Leopoldville di bawah pimpinan pendeta dan seorang tentara untuk pelatihan militer.” (Hochschild, 1998). Demikianlah Leopold ingin tentara masa depan membantu mengawasi tanah air mereka yang ia ambil untuk dieksploitasi mereka lebih jauh lagi. Leopold memberikan subsidi besar pada sekolah-sekolah ini dan selanjutnya meminta sekolah yang lebih besar perekrutan laki-laki yang akan memperkuat rencana tentaranya di masa depan.

Leopold tahu bahwa tidak ada orang waras yang akan secara terbuka menyerahkan sumber daya kepadanya dia menginginkannya dan dia juga tahu bahwa dia tidak ingin membayar untuk sumber daya tersebut. Oleh karena itu, Leopold mendirikan Force Publique pada tahun 1888 sebagai militer permanen di Kongo untuk mengelola ekstraksi sumber daya dan khususnya karet. Mayoritas Force Publique pada awalnya Orang-orang Afrika dari Zanzibar dan Afrika Barat, meskipun untuk menghemat biaya, mereka mulai merekrut langsung dari sana Kongo (Ewans, 2003). Anggota yang direkrut terdiri dari budak atau wajib militer yang telah dibebaskan, semuanya di bawah kepemimpinan pejabat kulit putih Eropa. Ewans mencatat, “Pada tahun 1895, Angkatan Bersenjata berjumlah sekitar 6.000 orang 4.000 di antaranya berasal dari Kongo sendiri, dan pada tahun 1905 jumlah pria di bawah 360 orang kulit putih berjumlah 16.000 orang. Petugas banyak di antaranya orang Skandinavia.” Pertumbuhan Force Publique berhubungan langsung dengan pertumbuhan dan keuntungan yang dihasilkan dari karet. Ini penting karena menyoroti dengan jelas apa yang selama ini menjadi perhatian utama

Leopold terhadap Kongo adalah cara untuk memanfaatkan sumber dayanya segala cara yang diperlukan. Dia jelas merupakan tipe orang yang menghalalkan segala cara (Johnson, 2014). Bayangkan Force Publique bukan sekedar kepolisian, yang dalam banyak situasi melindungi warga negara, dan lebih merupakan organisasi kejam yang bertekad melakukan apa pun terhadap siapa pun mencapai tujuannya. Tujuan mereka adalah memaksa Kongo menyediakan kuota karet dalam jumlah besar setiap minggu. Tindakan mengerikan mereka biasanya mengikuti pola yang sama di setiap desa Gondola menyatakan bahwa “tentara mulai menjarahnya sebagai pembalasan atas penolakan penduduk desa untuk membawa barang. perintah keluar. Para tentara kemudian menyerang penduduk desa dan menangkap perempuan mereka, yang mereka nyatakan sebagai sandera sampai kepala suku dapat membawa sejumlah karet yang dibutuhkan.” (Gondola, 2002). Demikianlah Leopold, melalui Force Publique, sedang membongkar cara hidup masyarakat Kongo dengan menggunakan penculikan sebagai artinya menyuruh laki-laki di tiap desa mengumpulkan karet. Namun, Force Publique tidak hanya akan terlibat dalam penculikan, tetapi juga para laki-laki pergi, mereka memperkosa perempuan di setiap desa yang mereka datangi. Mereka bahkan menciptakan laki-laki yang memilikinya kembali dengan membawa karet, membeli kembali perempuan-perempuan mereka untuk mendapatkan makanan yang hampir tidak dimiliki penduduk desa sejak mereka kembali tidak diizinkan untuk bercocok tanam. Bagi desa mana pun yang mencoba memberontak, Gondola menambahkan, “Di beberapa desa, pasukan karet memaksa laki-laki di bawah todongan senjata untuk memperkosa ibu dan saudara perempuan mereka sendiri karena mereka menolak menyediakan karet.” Oleh karena itu, hampir tidak ada bantuan apa pun bagi mereka Warga Kongo harus melakukan selain mengikuti perintah Force Publique dan bekerja tanpa henti untuk memperoleh kuota karet mereka. Cara penting lainnya untuk mencapai kuota karet adalah dengan memotong tanaman karet tangan jika suatu desa tidak memenuhi kuotanya. Berat karet yang tidak terpenuhi akan diganti dengan beban tangan kanan yang dipotong sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan sampai beratnya cocok. Hal ini mencerminkan jenis pelanggaran hukum yang terjadi di Kongo (Bruce B, 2007).

Jumlah korban tewas terus meningkat seiring berjalannya waktu dan sebagai dampaknya karet menjadi langka sebagian besar tanaman merambat dipotong dan mati. Betapa buruknya situasi saat ini dan betapa sedikitnya yang dapat dilakukan oleh rakyat Kongo untuk melakukan

pembebasan diri. Meskipun periode di bawah kepemimpinan Leopold ini tidak menghentikan sebagian orang Kongo untuk mencoba melakukan hal tersebut melarikan diri dari Kongo, biasanya dengan biaya yang harus dibayar. Hochschild menyatakan, “Saat mereka melarikan diri Dalam ekspedisi tersebut, penduduk desa terkadang menelantarkan anak-anak kecil karena takut tangisan mereka akan terdengar menyingkirkan tempat persembunyian mereka. Akibatnya, banyak anak yang kelaparan.” Tanpa makanan dan energi, keluarga tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri dan menjadi semakin lemah, menyebabkan jutaan orang menjadi lebih dapat diterima dan meninggal karena penyakit. Perjalanan panjang laki-laki penduduk desa dan wajib militer penduduk desa ke kapal uap atau ke Force Publique membuat mereka melakukan perjalanan jarak jauh. Orang Belgia hanya membawa obat untuk diri mereka sendiri, dan terus berlanjut kelelahan fisik, masyarakat Kongo semakin banyak terkena berbagai penyakit. Cacar dan penyakit tidur menyebabkan angka kematian tertinggi, dan diperkirakan setengah juta orang meninggal dari penyakit tidur hanya pada tahun 1901 (Johnson, 2014).

1.1 Penyebab Wilayah Belgia Semakin Luas

Dalam proses Imperialisme Baru ini, negara-negara Eropa memainkan peran penting. Pada masa kemerdekaan pada tahun 1830, proses industrialisasi di Belgia sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan perubahan teknologi. Sekitar tahun 1895, penetrasi Belgia ke kekaisaran Tiongkok hampir tidak ada, meskipun ada upaya Raja Leopold II dan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan hubungan komersial dan meskipun terdapat kehadiran kelompok Cockerill di Tiongkok. Saat itu, Raja Leopold II yang melakukan lobi melalui Kementerian Luar Negeri mendorong Ferdinand Baeyens dan Société Générale untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalur kereta api antara Hankow dan Beijing, yang dimulai pada tahun 1898 dan selesai pada tahun 1905. Namun Belgia tidak mendapatkan wilayah di Tiongkok, selain dari zona konsesi beberapa kilometer persegi di Tientsin Tiongkok (1902-1929). Tumbuhnya rasa nasionalisme dalam pemerintahan Tiongkok setelah Pemberontakan Boxer membuat perluasan wilayah lebih lanjut menjadi tidak mungkin. Maka dari itu Belgia melakukan ekspansi ke Kongo. Negara Bebas Kongo menjadi Kongo Belgia pada tahun 1908, ketika negara Belgia mengambil alih “perusahaan” Leopold sebagai reaksi terhadap kritik internasional terhadap sistem konsesi yang didirikan Leopold II sejak tahun 1890 di tempat yang seharusnya menjadi Negara Bebas (Abbeloos, 2008).

D. Kasus Rwanda dan Burundi

Rwanda dan Burundi telah lama dianggap sebagai negara yang hampir sama. Mereka pernah menjadi bagian dari koloni Rwanda-Urundi yang sama, yang pertama kali diperintah oleh Jerman dan kemudian oleh Belgia. Mereka memiliki komposisi etnis dan proporsi demografis yang kurang lebih sama, yaitu mayoritas Hutu dan minoritas Tutsi dan Twa. Bahasa mereka terkait erat, begitu juga dengan lanskap, praktik pertanian, dan budaya kedua negara. Mereka juga memiliki dua populasi termuda di dunia. Terakhir, kedua negara ini juga pernah mengalami kekerasan ekstrem, termasuk genosida (Sommers, 2011).

Kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini telah terjadi di Rwanda sejak 6 April 1994. Kasus ini melibatkan dua suku utama Rwanda: Tutsi dan Hutu. Menurut beberapa sumber, genocide ini menewaskan kurang lebih 800.000 orang. Rwanda adalah negara terpadat di Afrika Tengah dengan populasi 7,4 juta orang. Peristiwa ini dimulai ketika Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana (8 Maret 1937–6 April 1994) menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang pada tanggal 6 April 1994. Penembakan kejam itu adalah demonstrasi terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk Rwanda. Dalam upayanya untuk mewujudkan persatuan etnis di Rwanda, Habyarimana bermaksud membagi kekuatan antara kelompok etnis tersebut. Setahun sebelumnya, rencana itu telah dibuat. seperti yang ditetapkan dalam Piagam Arusha (1993). Untuk diketahui, Habyarimana telah menjabat sebagai presiden Rwanda sejak 1993. Sebelum ini, ia adalah Menteri Pertahanan Rwanda (Wardani, 2023).

Pada tahun 1990-an, Habyarimana mendirikan pemerintahan yang menggabungkan tiga kelompok etnis di Rwanda: Hutu (85 persen), Tutsi (14 persen) dan Twa (1 persen). Agathe Uwilingiyama, yang berasal dari suku Tutsi, diangkat menjadi perdana menteri oleh Habyarimana. Kelompok militan yang ingin mempertahankan pemerintahan satu suku jelas menentang penghapusan suku yang berbeda ini. Ketakutan dan kekecewaan yang berlebihan inilah yang akhirnya mengarah pada pembunuhan presiden sendiri. Akhirnya, Habyarimana dan presiden Burundi dibunuh oleh kelompok militan yang menentangnya saat keduanya berada di dalam pesawat atau helikopter yang diberikan oleh Presiden Perancis Francois Mitterand. Penembakan Presiden Habyarimana yang tragis mengakhiri dua dekade

pemerintahannya. Peristiwa ini memicu pembantaian etnis yang mengerikan di Rwanda. tanpa menunggu sehari-hari. Apalagi minggu setelah kematian Habyarimana, seluruh Rwanda langsung diblokade. Pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruktur Perancis segera bertindak (Wardani, 2023).

Pada tanggal 7 April 1994, Angkatan Bersenjata Rwanda (FAR) dan Interahamwe memblokir jalan. Anggotanya dan organisasi Kekuasaan Hutu memulai kampanye pintu ke pintu, dimulai di bagian utara negara dan menyebar ke bagian selatan, dengan tujuan memasukkan orang Hutu moderat dari Rwanda ke bagian selatan. Ribuan orang dibunuh, termasuk Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana. Mereka berkolaborasi dengan kelompok teroris Rwanda, Interahamwe, dan Impuzamugambi. Dimulai dari ibu kota Rwanda, ketiga kelompok bersenjata itu mulai membunuh setiap orang yang mendukung piagam Arusha tanpa peduli statusnya. Pembunuhan kelompok bersenjata tidak dapat dihindari oleh perdana menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi. Nama-nama menteri, pastor, dan orang-orang yang mendukung dan terlibat dalam perundingan piagam Arusha masih ada di luar dia (Wardani, 2023).

Untuk menghentikan genosida dan menyelamatkan tentara yang terperangkap di Kigali, Front Patriotik Rwanda, dipimpin oleh Paul Kagame, memulai pertahanan besar pada 8 April 1994. Pada tanggal lima belas Pembantaian Nyarubuye terjadi antara April dan 16 April 1994, dan melibatkan pembunuhan antara 5000 dan 10.000 orang di Gereja Katolik Roma Nyarubuye di Provinsi Kibungo, yang sekitar 140 km (60 mil) timur ibu kota Rwanda, Kigali. Korbannya adalah orang Hutu dan Tutsi moderat yang mengungsi ke gereja itu. PBB setuju untuk mengirim 6.800 polisi untuk menjaga warga sipil pada 17 Mei 1994, tetapi itu tidak berhasil karena pembunuhan Tutsi terus berlanjut. Pada 4 Juli 1994, Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF. Sekitar 300 mayat masih terlihat di luar di kota Nyarubuye, 100 km timur Kigali. Pemerintah Hutu mengungsi ke pada akhir Juli 1994. RPF menduduki Kigali di Zaire. 31 Pada 8 November 1994, berdasarkan resolusi PBB no. 955, suatu pengadilan kejahatan perang dibentuk untuk kasus genosida Rwanda, yang menewaskan ribuan pengungsi Hutu di Zaire. Pengadilan ini kemudian dikenal sebagai *International Criminal Tribunal for Rwanda* (Wardani, 2023).

Burundi memiliki dua sejarah tragis tentang genosida dan perang sipil setelah kemerdekaannya pada tahun 1962. Genosida terjadi pertama kali pada tahun 1972 dan kedua kalinya pada tahun 1993. Peristiwa yang menelan korban hingga 250.000 orang ini disebabkan oleh ketidakpercayaan antara elit Hutu dan Tutsi dan sebaliknya. Kebutaan karena sistem pemerintahan yang buruk yang diciptakan oleh elit Tutsi dan pemberontakan yang dimulai oleh oknum Hutu, yang akhirnya mengakibatkan ribuan kematian dari penduduk yang tidak terlibat dalam masalah. Hubungan antara Hutu dan Tutsi semakin buruk setelah pembunuhan perdana menteri Pierre Ngendandumwe. Monopoli Tutsi atas jabatan pemerintahan Burundi membuat pihak-pihak Hutu mempersiapkan penggulingan kursi pemerintahan di kemudian hari. Setelah kematian Ngendandumwe, pemilihan kembali diadakan setelah pemilu pertama di tahun 1962 untuk menggantikan jabatan perdana menteri yang saat itu kosong. Joseph Bamina, ketua partai UPRONA dan kandidat dari etnis Hutu, terpilih. Mwami Burundi saat itu, raja Mwambutsa IV, tidak setuju dengan keputusan terpilihnya perdana menteri yang baru ini. Raja Mwambutsa IV secara sepihak menyerahkan perdana menteri kepada Léopold Biha, sekretaris pribadi Mwami yang juga berasal dari etnis Tutsi. Diangkatnya Biha sebagai perdana menteri memicu pemberontakan yang dipimpin oleh Gervais Nyangoma, seorang anggota militer Hutu. Kudeta yang memaksa Mwami Mwambutsa IV meninggalkan Burundi ke Eropa kemudian digagalkan oleh militer Burundi, dan para pimpinan pemberontakan Hutu dibunuh (Melki, 2019).

Tahata pemimpin negara yang saat itu ditinggalkan oleh Mwambutsa kemudian secara sepihak dialihkan kepada putranya yaitu Charles Ndizeye atau Ntare V pada tanggal 8 Juli 1966. Kepemimpinan Ntare V kemudian dikenal sebagai masa kepemimpinan terpendek dalam sejarah Burundi karena Ntare V terbunuh oleh tentara pemberontak Hutu pada tahun yang sama setelah kunjungan ke Uganda. Segera setelah kepergian Ntare V, kepemimpinan jatuh ke tangan Michael Micombero, yang juga merupakan keturunan Tutsi pada bulan Desember 1966. Micombero terkenal sebagai diktator di Burundi. adalah aturan yang menekankan darurat militer, adalah aturan yang diberlakukan setelah tentara. Badan ini secara resmi mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Rezim Micombero juga dikenal sebagai rezim di mana Tutsi memegang seluruh kekuasaan dan cukup dominan baik di kursi pemerintahan

maupun militer Burundi . Orang asal Hutu tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dan kepada tentara Burundi (Melki, 2019).

Pada tanggal 27 April 1972, sekelompok pemberontak Hutu mengumumkan bahwa mereka telah mendirikan wilayah negara baru yang disebut Republik Martyazo. Pada tanggal 30 April , seluruh angkatan bersenjata dikerahkan oleh Micombero untuk menghancurkan seluruh Hutu. berpartisipasi dalam pemberontakan tahun apa yang telah dilakukan sebelumnya. Genosida ini dilakukan secara sistematis dan menewaskan seluruh orang Hutu, termasuk pelajar, elit politik, dan personel militer. Lebih dari 100.000 orang mengungsi ke negara tetangga seperti Tanzania dan Zaire. Peristiwa Genosida pertama di Burundi antara kelompok etnis Tutsi dan Hutu mengakibatkan 210.000 kematian (Melki, 2019).

E. Nasionalisme dan Pergerakan Kemerdekaan

Nasionalisme di Zaire pada masa itu berkaitan dengan upaya untuk membangun identitas dan kesatuan nasional di antara beragam kelompok etnis dan budaya yang ada di negara tersebut. Hal ini bisa tercermin dalam penggunaan simbol-simbol kebangsaan seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selain itu, nasionalisme Zaire juga mencakup promosi budaya nasional, bahasa resmi, dan gagasan-gagasan tentang kesatuan dan kedaulatan negara.

Pergerakan kemerdekaan di Zaire terjadi pada tahun 1960. Pada saat itu, negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belgia. Perjuangan untuk kemerdekaan melibatkan berbagai kelompok politik dan pemimpin nasionalis Kongo yang berjuang melawan penjajahan kolonial Belgia. Kongo sendiri adalah koloni Belgia atau negara jajahan belgia. Ekspedisi Kongo tidak terlepas dari 2 tokoh kunci yaitu Henry Morton Stanley sebagai peneliti. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap situasi di Kongo dapat disajikan dengan keuntungan keseluruhan, H.M. , Stanley juga menemukan dinamit yang sebelumnya tidak diketahui. Hal tersebut yang menyebabkan orang Kongo menyebut Stanley "Boela Matari" atau Penghancur Padas. Orang kedua adalah Raja Belgia , atau Leopold II, dalam hal ini Leopold II berperan dalam mendanai penelitian Stanley di Afrika. Leopold II percaya bahwa Belgia, sebagai negara industri, suatu saat akan mengalami surplus produksi industri dan oleh karena itu perlu mencari pasar baru. Setelah bekerja sama dengan Stanley, Kongo akhirnya ditemukan dan mulai tahun 1908 Kongo resmi menjadi koloni Belgia. Sebagai negara jajahan Belgia, pendidikan di Kongo tentu saja menjadi kendala. Sebuah universitas baru didirikan di

Kongo pada tahun 1954. Meski begitu, pelatihan peradilan tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan, tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan. Dalam keadaan seperti ini, nasionalisme di kalangan masyarakat Kongo semakin meningkat mereka menuntut kemerdekaan penuh bagi rakyat Kongo. Banyak pertempuran terjadi di meja perundingan, namun selalu berakhir dengan kegagalan dan akhirnya pada tahun 1960 diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar). Pada masa KMB ini, Belgia resmi menyerahkan kemerdekaan penuh kepada Kongo pada tahun dan pada tanggal 30 Juni 1960, Kongo memperoleh kemerdekaan penuh setelah perjuangan terus-menerus (Riyadi, 2016).

F. Rangkuman

Era pemerintahan Leopold di Kongo menandai periode penindasan brutal dan eksploitasi yang mengakibatkan penderitaan besar bagi penduduknya. Tindakan kejam seperti pemaksaan kuota karet dan perbudakan oleh Leopold, didukung oleh kebrutalan militer dari Force Publique, menciptakan penderitaan, kelaparan, dan kematian massal di Kongo. Hal ini menunjukkan warisan kelam kolonialisme Belgia di Kongo. Meskipun awalnya berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke Tiongkok, Belgia akhirnya beralih ke Kongo dan berperan dalam eksploitasi kolonial di sana, yang akhirnya menghasilkan kritik internasional dan perubahan menjadi Kongo Belgia pada tahun 1908. Hal ini mencerminkan peran aktif Belgia dalam praktik kolonialisme pada masa itu, dengan dampak yang beragam di berbagai wilayah.

Rwanda dan Burundi memiliki sejarah yang terkait erat, termasuk masa kolonialisme, komposisi etnis yang serupa, dan pengalaman kekerasan yang tragis, termasuk genosida. Kedua negara ini telah mengalami ketegangan etnis yang serius, perang saudara, dan rezim otoriter yang mengakibatkan ribuan kematian dan pengungsian massal. Sementara itu, nasionalisme di Zaire dipicu oleh upaya untuk membangun identitas dan kesatuan nasional di tengah beragam kelompok etnis dan budaya, dengan perjuangan menuju kemerdekaan dari penjajahan Belgia melibatkan berbagai kelompok politik dan pemimpin nasionalis Kongo. Meskipun menghadapi kendala pendidikan dan pelatihan peradilan di bawah penjajahan Belgia, semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Kongo terus tumbuh hingga mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1960 melalui Konferensi Meja Bundar.

G. Latihan

Kerjakan Latihan berikut dan isi jawaban dengan tepat!

1. Bagaimana Terbentuknya negara merdeka Zaire (jajahan Belgia), kongres Berlin?
2. Bagaimana Leopold berdaulat di Kongo 1885 - 1905 serta kebijakan -kebijakan pemerintahan Belgia?
3. Apa yang menyebabkan Wilayah Belgia yang semakin luas?
4. Bagaimana Kasus Rwanda Burundi bisa terjadi?
5. Bagaimana Nasionalisme dan pergerakan kemerdekaan Zaire?

H. Rujukan

- Abbeloos, Jan-Frederik. 2008. Belgium's Expansionist History between 1870 and 1930: Imperialism and the Globalisation of Belgian Business. MPRA : Munich Personal RePEc Archive. Ghent University.
- Bruce B. Mesquita, "Leopold II dan Selectorate: An Account in Contrast to a Racial Explanation," Historical Social Research, 32 (2007) 213
- Gerard, Emmanuel & Kuklick, Bruce. (2015). Death in the Congo: Murdering Patrice Lumumba. Harvard University Press
- Gondola, Didier (2002). [*Sejarah Kongo*](#) . Westport, Connecticut: Kayu Hijau.
- Hochschild. 1998. *King Leopold's Ghost*, 133.
- Johannes Fabian, "Misi dan Kolonisasi Bahasa Afrika: Perkembangan di Bekas Kongo Belgia," Jurnal Studi Afrika Kanada, 17 (1983), 169.
- Johnson, Steven. (2014). *King Leopold II's Exploitation of the Congo From 1885 to 1908 and Its Consequences*. STARS: University of Central Florida
- M Ewans, *European Atrocity, African Catastrophe: Leopold II, the Congo Free State and its Aftermath* (Routledge, 2002).
- Marc Sommers and Peter Uvin. (2011). Youth in Rwanda and Burundi: Contrasting Visions
- Melki, Ryan. 2019. KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP INTERVENSI PBB DI BURUNDI. Lex Et Societatis Vol. VII
- Riyadi. (2016). SEJARAH AFRIKA DARI MASA KUNO SAMPAI MODERN. UNESA PRESS Kelintang Surabaya.

Wardani, Eka and Rini., Hardiyanto, Lutfi and Hardiyanto., & Utami, Purwani and Puji. (2023).
Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994. *Journal of Citizenship Values*, 1(1), 31-38.

BAB 8

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN JAJAHAN INGGRIS DAN TERBENTUKNYA NEGARA-NEGARA EROPA

A. Latar Belakang

Negara-negara yang ada di Eropa, mulai melakukan penjelajahan dunia dengan tujuan untuk mencari kekayaan dan mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan bagi negara asalnya. Yang mana awalnya hanya untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari lewat berdagang, namun seiring berjalannya waktu aktivitas semacam ini dianggap tidak efektif dalam artian kurang menguntungkan, dari pemikiran itulah muncul adanya hasrat atau keinginan bangsa Eropa untuk menguasai dan menduduki wilayah-wilayah yang menurut mereka berpotensi akan penyediaan sumber daya dan kebutuhan hidup lainnya. Tidak hanya berhenti pada pemikiran tersebut, mereka juga mempunyai keinginan untuk menguasai seluruh dunia dan dipandang tinggi martabatnya di mata negara-negara lain. Awal penjajahan Eropa di Afrika dimulai pada abad ke 15 oleh orang-orang Portugis yang kemudian disusul oleh orang-orang Spanyol, daya tarik Benua Afrika saat itu sangat menonjol dimata bangsa Eropa dan negara jajahan lainnya. Mulai dari melimpahnya hasil sumber daya alam dan tak kalah juga dengan sumber daya manusianya, selain itu yang menjadi daya tarik utama yaitu emas yang sangat melimpah, maka dari itu tidak heran jika bangsa Eropa sangat berambisi untuk menguasai kawasan Afrika. Namun, pada abad ke 17 Portugis harus pergi dari Eropa karena terdesak dengan kedatangan bangsa Eropa lain diantaranya Perancis, Belanda, dan Inggris (Irma, 2020).

Inggris menjadi tempat dimana revolusi industri pertama kali muncul yaitu pada tahun 1750, revolusi industri merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berkaitan dengan pengenalan tenaga mesin sebagai alat produksi pabrik yang akan menggantikan tenaga manusia yaitu berupa mesin uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Revolusi industri ini diperkenalkan oleh Fredrieck Engles dan Louis Agueste Blanqui pada pertengahan abad ke 19 sebelum masyarakat Eropa mengenal alat- alat mekanis masih menggunakan alat-alat manual, revolusi ini membawa dampak

positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya membawa Inggris pada

kemajuan dalam bidang teknologi. Namun terdapat pula dampak negatifnya yaitu berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial (kurangnya tenaga kerja karena digantikan oleh tenaga mesin), kemudian dampak sosial budaya adanya psikologis masyarakat karena digantikan oleh mesin sehingga berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat yaitu membuat politik kurang stabil (Kuntowijoyo, 2015).

Kemudian muncul gerakan sosialis yang menjadikan politik Apartheid kulit putih dan kulit hitam karena merasa diperlakukan tidak adil dimana hanya raja dan pemerintah yang berkuasa, sedangkan masyarakat tidak diberikan aspirasi untuk menyatakan pendapatnya. Maka dari itu kemudian lahirlah adanya Imperialisme yang mana tujuannya demi kelangsungan suatu pemerintah dengan kegiatan industri dan imperialisme modern yang bertujuan untuk mencari bahan mentah industri untuk penanaman modal surplus dan mendapatkan tenaga buruh yang murah (Mutiarawati, 2020). Sehingga mendorong Inggris untuk menjelajah dunia luar dan melakukan penjajahan. Imperialisasi dan kolonisasi yang dilakukan Inggris cukup luas meliputi Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Maka dari itu Inggris mempunyai julukan Negeri Matahari Tergelam, bahasa Inggris pun hingga saat ini menjadi bahasa pergaulan dunia, dengan mempunyai koloni yang luas mencirikan Inggris unggul dalam bidang militer dan perekonomian. Namun pada makalah ini akan lebih terfokus pada satu wilayah koloni Inggris yaitu Mesir (Luhulima, 1992)

Maka dari itu dalam pembahasan makalah ini kami akan memaparkan proses mula terbentuknya negara-negara jajahan Inggris di Afrika, bagaimana kekuasaannya di Mesir, dan latar belakang dibukanya Terusan Suez, serta tentunya strategi politik Inggris yang diterapkan di Afrika.

B. Terbentuknya Negara-negara Jajahan Inggris

Awal terbentuknya negara-negara jajahan Inggris di Afrika yaitu karena, kebutuhan Inggris untuk mengendalikan sumber daya alam dan perdagangan di, dimulai dari dibentuknya perusahaan Hindia Timur yang mana bertujuan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya di Afrika. Kemudian pada abad ke 19 Inggris mulai memperluas pengaruhnya di Afrika dengan mendirikan koloni dan protektorat (bentuk pemerintahan dimana suatu negara memberikan perlindungan kepada

negara lain atau negara koloninya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan adanya suatu kepentingan yang strategis). Perkembangan kolonial Inggris di Afrika di dorong oleh adanya persaingan dengan negara-negara Eropa lain, Inggris berusaha agar mengambil alih atau mengendalikan sebagian besar Afrika untuk menhalangi negara-negara lain memperoleh keuntungan dari sumber daya alam dan perdagangan di Benua tersebut (Ahmad, 2016).

Termasuk pembentukan Kekaisaran Britania di Afrika Barat dan Afrika Selatan, selain itu Inggris juga mendirikan koloni di Afrika Utara yaitu salah satunya Mesir. Mesir pada saat itu masih merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah yang mencakup wilayah Turki, sebagian dari negara-negara di Eropa Tenggara, Asia Barat dan Afrika Utara. Sejak Terusan Suez dibuka pada tahun 1869, Inggris mulai menaruh perhatian dan tertarik terhadap Mesir, (Terusan Suez adalah jalan menuju ke India dan Mesir), Kemudian Inggris mulai menyadari betapa pentingnya terusan tersebut sebagai alat penghubung Eropa dan Asia. Mesir menjadi sangat penting bagi Inggris karena letaknya yang strategis diantara Afrika, Asia, dan Eropa sehingga ideal untuk dijadikan sebagai pusat perdagangan dan kontrol maritim. Selain itu Terusan Suez juga dapat mempermudah jalur laut Mediterania dengan Laut Merah, dimana jalur ini penting untuk perdagangan Inggris dengan India dan Timur Jau (Mariot, 1938).

C. Kekuasaan Inggris di Mesir

Khedive Mohammed Ali merupakan pemimpin mesir yang memulai proses modernisasi dengan membuat Terusan Suez dengan tujuan menciptakan negara yang kuat. Namun, akibat pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya kerja paksa, perpajakan, dan menumpuknya utang mesir kepada beberapa orang Eropa. Terusan Suez berdampak besar bagi kelancaran perekonomian antar eropa dan dunia timur dalam bidang ekonomi. Khedive ismail saat itu juga mengklaim bahwa mesir merupakan bagian dari Eropa karena banyaknya orang eropa yang bermigrasi ke Mesir. Pada tahun 1882 terjadi pemberontakan nasionalis rakyat kepada pemerintah Mesir karena perpajakan dan perbudakan yang dialami rakyat Mesir sehingga dalam hal ini Inggris ikut campur dalam konflik tersebut dengan dalih melindungi masyarakat eropa yang ada disana. Kemudian, di tahun yang sama Inggris menduduki mesir dan memulai era protektorat (persemakmuran) di Mesir (Al-Ayubi,

2016).

Kedudukan Inggris mampu mengendalikan pemerintahan Mesir meskipun Khedive ismail tetap menjabat sebagai pemimpin simbolis. Ada beberapa modernisasi yang dilakukan Inggris di Mesir dalam bidang infrastruktur meliputi pembangunan bendungan dan sistem irigasi. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Inggris mampu mengendalikan ekonomi mesir dan memfokuskan produksi kapas untuk industri tekstil modern. Selama sepuluh tahun pertama pendudukan Inggris, sistem pemerintahan Inggris perlahan berkembang di Mesir dengan tidak menentang struktur kelas yang ada dan tetap menjadikan pemimpin Mesir sebagai pemimpin negara. Inggris berusaha menyembunyikan kekuasaan mereka dengan menjadikan pejabat Inggris sebagai penasihat menteri Mesir meskipun realitas kekuasaan mereka tidak tertutupi oleh para pengamat berpengetahuan luas dan Inggris hanya mempunyai fungsi konsultatif dalam pemerintahan. Kemudian, pada tahun 1922 mesir memperoleh kemerdekaan nominal dan tetap mempertahankan pasukan Inggris di Mesir untuk melindungi Terusan Suez (Putra, 2022).

Masyarakat Mesir mulai menyadari betapa buruknya sistem pemerintahan yang ada di negara mereka. Bangsa Mesir menganggap konstitusi pemerintahan yang dibuat hanya berpihak terhadap bangsa Eropa yang ada di Mesir saja dan tidak berpihak pada rakyat. Rakyat Mesir menganggap bahwa sistem politik liberal tidak sesuai dengan budaya dan tradisi islam mereka, sistem liberal juga dianggap sebagai elitis dan hanya menguntungkan kelas atas. Akibatnya, Mesir langsung merencanakan pengusiran Inggris dari Mesir dan membangkitkan kembali semangat bangsa Mesir. Pada dekade 1930-1940 mesir mulai melibatkan para ulama dan tokoh sufi yang posisi politik dan ideologisnya tidak mampu menentang otoritas pemerintahan, serta perhimpunan pemuda islam yang bernama Ikhwanul Muslimin juga ikut serta dalam penolakan kependudukan bangsa asing di negara mereka. Bangsa Mesir yang terpuruk berusaha untuk bekerjasama dengan beberapa perwira militer untuk menggulingkan kepemimpinan Raja Farouk yang selama ini dianggap berpihak pada Inggris dan melakukan korupsi di Mesir. Tidak hanya itu, Raja ini dianggap tidak menunjukkan sifat sebagai seorang raja dengan menghamburkan hartanya disaat masyarakat Mesir sedang mengalami kesulitan ekonomi pasca perang dunia II (Al-Ayubi, 2016).

Kemerosotan mesir semakin di perparah dengan banyaknya pengangguran karena lapangan kerja yang terbatas dan kaum imigran yang berpindah ke Kairo tidak mendapatkan pekerjaan sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial di Mesir. Akhirnya, pada tanggal 23 juli 1952 Dewan Revolusi Militer yang dipimpin oleh Nasser berhasil mengambil alih kekuasaan dan Raja Farouk dipaksa untuk turun tahta dan diasingkan ke Italia. Saat itu, Mesir meminta Inggris untuk menarik mundur pasukannya dari Mesir tetapi Inggris menolak sehingga terjadi ketegangan antar kedua negara tersebut. Pada tahun 1956, Mesir menasionalisasi Terusan Suez yang menyebabkan krisis Internasional karena banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet menentang tindakan Inggris dan Perancis untuk menyerang Mesir. Akibatnya Inggris merasa terisolasi dan tidak punya pilihan selain menarik pasukannya mundur dari Mesir (Trisnawati, 2016).

D. Latar Belakang dibangunnya Terusan Suez

Terusan Suez merupakan jalan air atau terusan buatan di Afrika. Terusan ini memiliki panjang kurang lebih 193 kilometer dengan lebar 200-300 meter yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Dengan meningkatnya perdagangan global dan kebutuhan jalur perdagangan yang lebih efisien pada abad

ke-19, muncul suatu gagasan terkait pembangunan terusan. Terusan Suez dibangun tahun 1859 M-1869 M yang dipimpin oleh seorang insinyur asal Prancis bernama Ferdinand de Lesseps. Namun berabad-abad sebelumnya orang telah memikirkan untuk membangun terusan serupa yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah, sehingga memungkinkan orang berlayar dari Laut Merah, akan tetapi kemudian rusak. Adanya Terusan Suez sangat berpengaruh karena sangat penting sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia dan Timur Tengah. Terusan Suez menjadi wujud nyata perubahan yang terjadi di Mesir, karena menjadi gerbang masuk pelayaran dari berbagai penjuru dan menjadikan Kota Suez sebagai kota Pelabuhan yang ramai (Bilqis, 2019).

Sebelum ada Terusan Suez, jalur pelayaran dari Eropa menuju Asia harus berlayar ke arah selatan yaitu melewati Tanjung Harapan untuk mengitari Afrika. Hal ini menciptakan jarak tempuh yang panjang dan memakan waktu yang lama. Selain itu juga berdampak pada biaya operasional kapal yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, dibangunnya Terusan Suez

merupakan suatu upaya untuk mempersingkat rute pelayaran perdagangan antara Eropa dan Asia dengan menghindari perjalanan yang panjang melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Sehingga biaya operasional kapal lebih rendah serta aktivitas ekonomi lebih efisien dan efektif. Terusan Suez memberikan dampak positif yang cukup signifikan dalam peningkatan perekonomian Mesir karena tarif atau bea masuk yang dapat diberlakukan bagi kapal-kapal yang melintas (Alunaza, 2021).

E. Strategi Politik di Mesir

Upaya Inggris untuk mengontrol jalur perdagangan maritim penting antara Laut Tengah dan Laut Merah, mereka membeli saham mayoritas Perusahaan Terusan Suez pada tahun 1875 dengan menggunakan pendekatan politik yang teliti. Inggris menggunakan kemampuan diplomasi dan negosiasi yang kuat sebagai strategi utamanya. Upaya ini dipimpin dengan bijak oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris saat itu. Terusan Suez memiliki nilai strategis yang signifikan bagi Inggris pada saat itu karena merupakan jalur utama yang mengurangi waktu dan biaya perjalanan antara Eropa dan Asia, terutama India, yang merupakan koloni penting bagi Inggris. Dengan membeli saham mayoritas Perusahaan Terusan Suez, Inggris dapat mengontrol operasi dan keuntungan terusan tersebut serta menjaga kepentingan perdagangan dan militer mereka. Inggris menggunakan kekuatan ekonominya untuk membeli saham dan menerapkan strategi politik yang inklusif. Mereka menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Khedive Mesir, penguasa Mesir saat itu. Inggris berhasil mendapatkan dukungan Khedive Mesir untuk mendapatkan Terusan Suez, yang pada akhirnya memperkuat posisi Inggris di wilayah tersebut secara politik dan ekonomi. Dalam mengelola hubungannya dengan Prancis, yang juga memiliki kepentingan besar di Terusan Suez, diplomasi sangat penting. Dengan cara ini, Inggris berhasil mendapatkan persetujuan Prancis untuk membeli saham mayoritas, sehingga Inggris dapat mempertahankan posisi dominan mereka di wilayah tersebut tanpa mengalami konflik yang mematikan. Selain itu, untuk mempertahankan kepentingannya di Terusan Suez, Inggris siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Kehadiran militer di wilayah tersebut memberikan keamanan dan kestabilan, dan menjadi faktor penting dalam menegaskan kontrol politik dan ekonomi atas jalur perdagangan strategis tersebut. Dengan menggabungkan strategi politik yang cerdas dengan kekuatan ekonomi

dan militer, Inggris telah mempertahankan posisi dominannya di Terusan Suez.

F. Kesimpulan

Setelah memahami berbagai rumusan masalah dan pembahasan mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan Jajahan Inggris dan Terbentuknya Negara-negara Eropa dapat kami simpulkan bahwa, wal terbentuknya negara-negara jajahan Inggris di Afrika yaitu karena, kebutuhan Inggris untuk mengendalikan sumber daya alam dan perdagangan di, dimulai dari dibentuknya perusahaan Hindia Timur yang mana bertujuan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya di Afrika. Kemudian pada abad ke 19 Inggris mulai memperluas pengaruhnya di Afrika dengan mendirikan koloni dan protektorat. Perkembangan kolonial Inggris di Afrika di dorong oleh adanya persaingan dengan negara-negara Eropa lain, Inggris berusaha agar mengambil alih atau mengendalikan sebagian besar Afrika untuk menhalangi negara-negara lain memperoleh keuntungan dari sumber daya alam dan perdagangan di Benua tersebut

Inggris juga menguasai Mesir selama 74 tahun. Kedudukan Inggris mampu mengendalikan pemerintahan Mesir meskipun pemimpin utamanya tetap dari Mesir, dengan kata lain Mesir dijadikan boneka oleh Belanda. Ada beberapa modernisasi yang dilakukan Inggris di Mesir dalam bidang infrastruktur meliputi pembangunan bendungan dan sistem irigasi. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Inggris mampu mengendalikan ekonomi mesir dan memfokuskan produksi kapas untuk industri tekstil modern. Selain itu, sebelum Inggris berhasil menguasai Mesir, pemimpin Mesir membuat Terusan Suez yang menjadi jalur pelayaran utama. Terusan Suez merupakan jalan air atau terusan buatan di Afrika. Terusan ini memiliki panjang kurang lebih 193 kilometer dengan lebar 200-300 meter yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Inggris berupaya untuk mengontrol jalur perdagangan maritim penting antara Laut Tengah dan Laut Merah, mereka membeli saham mayoritas Perusahaan Terusan Suez pada tahun 1875 dengan menggunakan pendekatan politik yang teliti. Inggris menggunakan kemampuan diplomasi dan negosiasi yang kuat sebagai strategi

utamanya. Upaya ini dipimpin dengan bijak oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris pada saat itu.

G. Rujukan

- Ahmad, F. (2016). Pergolakan Politik Mesir Masa Kolonial dan Dampaknya Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Al-Ayubi, S. (2016). Pengaruh Perang Dunia II Terhadap Revolusi Mesir 1952. *Al-Turas Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama*.
- Alunaza, V. S. (2021). The Role of President Abdel Fattah Al-Sisi's Government for the Development of Egypt's Post-Revolutionary Economic Reforms in 2011. *Jurnal CMES*.
- Bilqis, H. (2019). Kebijakan Gamal Abdul Nasser tentang Nasionalisasi Terusan Suez dan Dampaknya terhadap Mesir.
- Irma, S. (2020). Gejolak Politik Dan Ekonomi Afrika Pasca Perang Dunia II. . *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*.
- Kuntowijoyo. (2015). *Sumber-sumber Belajar yang Digunakan Pembelajaran Sejarah di kelas*. . Yogyakarta: Tiara.
- Luhulima, C. (1992). *Eropa Sebagai Kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta : Gramedia.
- Mariot. (1938). History Of Europe 1815-E1939 (Metheuen and Co Ltd 36 Essex street, starnd London).
- Mutiarawati, F. D. (2020). Sejarah Revolusi Industri di Inggris pada Tahun 1760- 1830. *HISTORIA: Jurnal Program Studi pendidikan Sejarah*.
- Putra, J. S. (2022). Dinamika Pergolakan Politikdi Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Farug hingga Muhammad Murdi. *Tsaqofah & Tarikh*.
- Trisnawati, D. (2016). Revolusi Mesir 23 Juli 1952: Berakhirnya Pemerintahan Raja Farouk. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*.

BAB 9

NEGARA-NEGARA JAJAHAN INGGRIIS DI AFRIKA SELATAN DAN PERKEMBANGANNYA

A. Latar Belakang

Afrika Selatan adalah salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku telah tinggal di sana, termasuk Khoi, Bushmen, Xhosa, dan Zulus. Penjelajah Belanda yang dikenal dengan nama Afrikaners tiba di sana pada tahun 1652. Saat itu, Inggris juga tertarik dengan negara tersebut, terutama setelah ditemukannya cadangan berlian yang kaya. Mengarah ke Perang Inggris-Belanda dan dua Perang Boer. Pada tahun 1910, empat republik besar digabung menjadi Uni Afrika Selatan. Pada tahun 1931, Afrika Selatan menjadi koloni Inggris sepenuhnya (Budiman, 2013).

Afrika Selatan juga merupakan negara dengan banyak etnis yang beragam dan memiliki 11 bahasa resmi. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu produsen berlian, emas, dan platinum terkemuka di dunia. Mendengar kata-kata tersebut, Afrika Selatan tidak akan pernah lepas dari “apartheid dan Nelson Mandela”. Negara ini memiliki 11 bahasa resmi termasuk Inggris, Afrikaans, Sesotho, Setswana. Dalam hal ini, pemerintah kulit putih bertindak berlebihan dalam mempertimbangkan ras seseorang. Meski bukannya tanpa permasalahan, negara ini juga sukses menyelenggarakan tiga pemilu, tentunya karena pemerintahan tidak lagi didominasi oleh orang kulit putih. Kekuatan fundamental benua Afrika tidak lepas dari perekonomian negara tersebut. Lihat saja sumber daya alam yang terdapat di negeri ini, ada emas kebanggaannya, ada juga berlian, mineral, platina, dan lain sebagainya. Negara Afrika Selatan dibagi menjadi 9 provinsi (Timur, Barat, Tanjung Utara, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Barat Laut). Meski negara ini beribu kotakan Pretoria, namun terdapat tiga pemerintahan yang menjadi pusatnya. Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein (Aditya, 2021).

Kedudukan masyarakat Afrika Selatan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat Eropa (Belanda atau kulit putih), sehingga persoalan warna kulit menjadi titik awal munculnya rasisme. Belanda kemudian segera menetap. Mereka sering disebut Boer. Kedatangan Belanda kemudian disusul oleh Inggris yang menguasai ujung Afrika Utara

(Mesir) hingga ujung Afrika Selatan (Cape Town). Kedatangan Inggris di Afrika Selatan menyebabkan pecahnya perang saudara. Perang Boer (1899). – 1902) antara Inggris dan Boer (Belanda).

Dalam perang ini, Inggris mengalahkan Boer, sehingga wilayah Afrika Selatan menjadi wilayah Inggris. Inggris akhirnya menjadi penguasa wilayah Afrika Selatan. Selain itu, Uni Afrika Selatan didirikan pada tahun 1910. Dengan kemenangan Inggris di Afrika Selatan, semakin banyak pula orang Inggris yang datang ke Afrika Selatan. Sejak Inggris berkuasa, sistem pemerintahan di bawah pengawasan Inggris didirikan di kawasan Afrika Selatan. Di bidang ini, Inggris juga menerapkan kebijakan segregasi ras (segregasi berdasarkan ras) (Prayoga, 2017).

B. Terbentuknya Negara-Negara Jajahan Inggris Di Afrika Selatan

Penjajahan Inggris di Afrika Selatan dimulai pada abad ke-17, ketika Belanda mendirikan pemukiman di Tanjung Harapan dan sekitarnya. Inggris kemudian berebut kendali atas kekuasaan di wilayah ini dengan Belanda. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan antara Inggris dan Belanda bersaing untuk memperoleh kendali atas wilayah-wilayah di Afrika Selatan. Perang Boer antara Inggris dan komunitas Afrikaner Boer (orang Belanda keturunan Afrika Selatan) menjadi peristiwa penting dalam proses ini. Perang Boer adalah serangkaian konflik antara Inggris dan Boer di Transvaal dan Oranje antara 1880-1881, serta 1899-1902. Inggris meraih kemenangan dan menegaskan pengaruhnya di wilayah tersebut. Setelah perang Boer selesai Inggris menguasai wilayah Transvaal, Oranje, Natal, dan Koloni Tanjung. Penggabungan koloni-koloni tersebut membentuk Uni Afrika Selatan pada tahun 1910 (Ashton, 2008).

Negara negara jajahan Inggris di wilayah Afrika Selatan pada masa kolonialisme:

1. Jajahan Tanjung Harapan Merupakan wilayah di ujung selatan benua Afrika yang dikuasai oleh Inggris dan Belanda pada awalnya, sebelum sepenuhnya menjadi jajahan Inggris. Koloni Tanjung mencakup wilayah di sekitar Tanjung Harapan.
2. Transvaal Wilayah di sebelah utara Koloni Tanjung yang dulunya merupakan wilayah pertempuran dalam Perang Boer. Setelah perang, Transvaal menjadi bagian dari wilayah

jajahan Inggris.

3. Oranje adalah Wilayah lain di sebelah utara Koloni Tanjung yang juga menjadi sasaran Inggris selama Perang Boer dan kemudian dikuasai oleh Inggris.
4. Natal jajahan Inggris di Afrika yang meliputi wilayah di sekitar kawasan Natal di pantaitimur benua Afrika.
5. Uni Afrika Selatan Setelah penggabungan koloni-koloni Inggris di Afrika Selatan, terbentuklah Uni Afrika Selatan pada tahun 1910. Uni ini mencakup wilayah-wilayah seperti Koloni Tanjung, Transvaal, Oranje, dan Natal.

Negara-negara jajahan Inggris di wilayah Afrika Selatan menjadi bagian penting dari sejarah kolonialisme di benua Afrika, dengan peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Boer dan perjuangan menuju kemerdekaan yang mempengaruhi bentuk politik dan sosial wilayah tersebut (Aditya, 2021).

C. Perang Boer Melawan Inggris dan Uni Afrika Selatan

Perang Boer Pertama, juga dikenal dengan nama Perang Transvaal atau Pemberontakan Transvaal, adalah perang yang berlangsung dari tanggal 16 Desember 1880 hingga 23 Maret 1881 antara Imperium Britania melawan Republik Transvaal. Perang ini dipicu oleh keinginan Britania untuk memperkuat kekuasaannya di Afrika Selatan, khususnya setelah penemuan kandungan intan besar pada tahun 1868 di sekitar Kimberley di perbatasan gabungan Transvaal dengan Negara Bebas Oranje dan Koloni Tanjung. Perang ini berhasil dimenangkan oleh Republik Transvaal, tetapi kemerdekaan kedua negara tersebut tidak bertahan lama karena Britania akan mengambilalih kedua negara tersebut sesuai dengan Perang Boer Kedua pada tahun 1902 (Utami, 2021).

Pada perang Boer Kedua yang terjadi pada 11 oktober 1899-31 Mei 1902, sebagian besar penduduk Utland meninggalkan kota, yang menyebabkan perusahaan pertambangan mereka menghentikan operasinya. Boer mengharapkan dukungan penuh dari Cape Colony, sehingga perang tersebut akan menjadi pemberontakan umum bagi semua orang berbahasa

Belanda di seluruh Afrika Selatan. Mereka juga mengharapkan bantuan dari negara-negara Eropa. Namun, meskipun terdapat semangat pro-Boer di sebagian besar negara Eropa dan semangat ini semakin kuat setelah kemenangan Boer, tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang memberikan bantuan. Boer menghadapi lawannya berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengepung Inggris di Mafeking, Kimberley dan Ladysmith di Natal. Pengepungan ini masing-masing dipimpin oleh jenderal Cronje, Wessels dan Joubert. Setelah pengepungan selama berbulan-bulan, ketiga kota tersebut direbut kembali oleh Inggris. Di sisi lain, upaya Jenderal Schoeman di utara Cape Colony telah gagal total sehingga Inggris mampu memperkuat kembali (Soeratman, 2012).

Jenderal Methuen mencoba merebut kembali Kimberley dan Jenderal Lord Redvers Buller secara pribadi mencoba membebaskan Jenderal White di Ladysmith. Namun, mereka semua dikalahkan oleh Boer di Sungai Modder, Magersfontein dan Colenso. Untuk kedua kalinya, bangsa Boer menang. Tampaknya artileri Boer lebih unggul dibandingkan artileri Inggris. Beberapa penembak mereka adalah orang Prancis atau Jerman dan penembak Boer dilatih dan

diinstruksikan oleh orang Eropa. Setelah itu, kabinet Inggris menunjuk Lord Roberts sebagai panglima angkatan bersenjata di Afrika Selatan. Lord Roberts adalah seorang jenderal terkenal; Dua puluh tahun yang lalu, dia mengirim 10.000 tentara ke Afghanistan untuk membebaskan pasukan Inggris yang terkepung di Kandahar. Oleh Roberts, Lord Kitchener diangkat menjadi Panglima Staf Umum (Soeratman, 2012).

Setelah berakhirnya Perang Boer Kedua (1899-1902), yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian damai di salah satu kota di Afrika Selatan, Vereeniging, perang rakyat Boer berikutnya dilakukan dengan syarat-syarat perjanjian tersebut menyatakan: "Otonomi akan diberikan sesegera mungkin kepada Republik Boer lama. Lord Milner, Gubernur Transvaal dan Koloni Sungai Orange, berupaya untuk membawa kemakmuran bagi masyarakat di kedua wilayah dengan memimpin kerja sama terbaik antara koloni Inggris di Selatan. Afrika Perdagangan antar koloni dilakukan dengan bebas (Soeratman, 2012).

Pada bulan Oktober 1908, perwakilan dari empat wilayah Afrika Selatan, Transvaal, Orange Free State, Natal dan Cape Colony, bertemu untuk membahas kemungkinan

pembentukan konfederasi yang mencakup pemerintah pusat dan parlemen. . Parlemen pusat terdiri dari dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan Senat. Berdasarkan rencanatersebut, anggota DPR akan mencakup perwakilan provinsi berdasarkan proporsi penduduk kulit putih. Anggota Senat terdiri dari 40 orang wakil, dari 4 provinsi, masing-masing provinsimengangkat 8 orang dan 8 orang tambahan yang dipilih oleh Gubernur Jenderal, provinsi- provinsi tersebut disebut bekas jajahan (Soeratman, 2012).

Setelah perdebatan panjang, seiring dengan amandemen Menurut proyek konstitusional, dapatditerima oleh mayoritas utusan dan kemudian dikirim ke pemerintah Inggris di London. Pada tahun 1909, usulan pembentukan Persatuan di Afrika Selatan disetujui oleh Parlemen Inggris.Selanjutnya berdasarkan Act of Union, Cape Colony, Natal, Transvaal dan Orange Free State membentuk konfederasi yang disebut Union of South Africa. Rhodesia tidak bergabung denganUni sementara Bechuanaland, Basutoland dan Swaziland tetap menjadi protektorat Inggris (Soeratman, 2012).

Uni Afrika Selatan (Union Of South Africa) pada tahun 1910 secara resmi terbentuk sebagai kekuatan politik menggabungkan 4 wilayah jajahan inggris di afrika selatan, yaitu jajahan tanjung, Transvaal, Oranje, dan Natal. Uni Afrika Selatan dibentuk melalui undang-undang UniAfrika Selatan pada 31 mei 1910, yang menggabungkan 4 wilayah jajajhan inggris yang sebelumnya dikuasai secara terpisah.Pembentukan Uni ini mengakhiri masa kolonialisme

langsung di wilayah tersebut. Konstitusi baru uni afrika selatan memberikan kekuasaan legislatif kepada uni afrika tersebut, dengan dibentuknya parlemen federal yang terdiri dari 2 lembaga, yaitu lembaga rendah dan lembaga tinggi. Konstitusi ini memberikan otonomi yang terbatas kepada wilayah-wilayah yang membentuk Uni Afrika Selatan (Blackwell, 2010).

Sistem pemerintahan uni afrika selatan menggunakan sistem pemerintahan parlementer dengankepala pemerintahan berupa Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Sistem ini menandaitransisi dari administrasi kolonial langsung menuju ke sistem pemerintahan yang lebih mandiri. Pembentukan Uni Afrika Selatan membawa konsekuensi politik yang signifikan bagi wilayahtersebut. Hal ini termasuk penentuan kebijakan politik dan ekonomi

di tingkat federal, serta dinamika hubungan antara kelompok-kelompok etnis dan politik di dalam Uni (Smith, 2008).

Pembentukan Uni Afrika Selatan didasari oleh semangat persatuan dan gabungan antara wilayah-wilayah jajahan yang sebelumnya terpisah. Tujuannya adalah untuk menciptakan kekuatan politik yang lebih kokoh dan merdeka di bawah satu atap pemerintahan yang bersama. Uni Afrika Selatan 1910 menjadi tonggak penting dalam sejarah Afrika Selatan, menandai perubahan signifikan dalam struktur politik dan pemerintahan wilayah tersebut. Pembentukan Uni ini membawa implikasi politik, ekonomi, dan sosial yang mendalam bagi masa depan negara tersebut, serta menjadi landasan bagi perjalanan menuju kemerdekaan (DuToit, 2015).

D. Masalah Apartheid

Kata Apartheid berarti "pemisahan" dalam bahasa Afrikaans dan menggambarkan kekakuan rasial yang mengatur pembagian antara populasi minoritas kulit putih dan mayoritas populasi kulit hitam. Secara struktural, Apartheid mengacu pada kebijakan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas non-kulit putih melalui regulasi sosial di bidang sosial budaya, kebijakan, militer, dan ekonomi. Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 1948. Saat itu, Afrika Selatan terbagi menjadi empat tujuan rasial utama, yaitu: (1). Kulit putih, (2). Kulit Hitam, (3). Warna kulit, (4). Asia (Budiman, 2013).

Masalah Apartheid dimulai dengan pendudukan Afrika oleh negara-negara Eropa. Orang Eropah pertama yang tiba di Afrika Selatan adalah orang Belanda. Belanda tiba di Afrika di bawah pimpinan Jan Anthony van Riebeeck. Kedatangan Belanda menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan masyarakat Afrika bagian selatan. Masyarakat Afrika Selatan berada di bawah penjajahan Eropa (Belanda atau kulit putih), permasalahan kulit inilah yang menjadi titik awal munculnya masalah rasisme. Belanda segera menetap di Afrika Selatan.

Mereka sering disebut Boer. Menyusul kedatangan Belanda, Inggris berhasil menguasai Afrika Utara (Mesir) dan Afrika Selatan (Cape Town). Kedatangan Inggris memicu terjadinya "Perang Boer" antara Inggris dan Belanda. Inggris berhasil mengalahkan Belanda, sehingga wilayah Afrika bagian selatan menjadi wilayah Inggris. Pada akhirnya,

Inggris menjadi penguasa Afrika bagian selatan. Dengan kemenangan Inggris, banyak orang Inggris yang pergi ke Afrika Selatan. Pada tahun 1910 dibentuk Uni Afrika Selatan yang merupakan gabungan dari kedua Republik kaum Boer, yaitu: Transvaal dan Orange Free State dengan Cape Colony dan Natal. Uni Afrika Selatan adalah dominion Inggris (Soeratman, 2012).

Apartheid merupakan kombinasi praktik kolonial dan superioritas kulit putih dengan alasan bahwa setiap ras memiliki panggilan khusus untuk membawa budaya ke dunia. Oleh karena itu, ras-ras harus terpisah satu sama lain agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan budayanya masing-masing. Kontak antar ras harus dibatasi untuk menghindari kontaminasi budaya ras. Berdasarkan keyakinan tersebut, pemerintah Afrika Selatan menerapkan diskriminasi rasial di segala bidang kehidupan, yang secara signifikan mengambil status orang kulit hitam (Dewanto, 1987).

E. Rangkuman

Penjajahan Inggris di Afrika Selatan dimulai pada abad ke-17 dengan Belanda melakukan pemukiman di Tanjung Harapan. Inggris kemudian berebut kendali atas wilayah ini dengan Belanda. Perang Boer antara Inggris dan komunitas Afrikaner Boer menjadi peristiwa penting dalam proses ini. Setelah perang Boer, Inggris menguasai wilayah Transvaal, Oranje, Natal, dan Koloni Tanjung. Penggabungan koloni-koloni ini membentuk Uni Afrika Selatan pada tahun 1910. Negara-negara jajahan Inggris di wilayah Afrika Selatan adalah Tanjung Harapan, Transvaal, Oranje, Natal, dan Koloni Tanjung. Pembentukan Uni Afrika Selatan mengakhiri masa kolonialisme langsung di wilayah tersebut. Uni Afrika Selatan memiliki sistem pemerintahan parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Perang Boer adalah perang antara Inggris dan Republik Transvaal yang terjadi pada tahun 1880-1881. Republik Transvaal berhasil memenangkan perang ini, tetapi pada perang Boer kedua pada tahun 1899-1902, Inggris berhasil memenangkan perang ini. Masalah Apartheid adalah kebijakan pemisahan antara populasi kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Kebijakan ini dimulai pada tahun 1948 dan mengatur regulasi sosial, budaya, kebijakan, militer, dan ekonomi. Apartheid terpecah menjadi empat tujuan rasial utama, yaitu kulit putih, kulit hitam, warna kulit, dan Asia.

F. Rujukan

- Aditya, A. H. (2021). Organisasi Negara-Negara Persemakmuran Inggris : Kesuksesan Filosofi Inggris Dalam Mendominasi Kolonialisme Dan Imperialisme Modern. *Solidarity: Journal Of Social*, 114-128.
- Ashton, E. M. (2008). The Historiography Of The Formation Of The Union Of South Afrika. *Journal History*.
- Blackwell, A. (2010). The Formation Of South African Union: Historical Perspectives. *Journal Of African History*, 52(3), 321-335.
- Budiman, A. (2013). Politik Apartheid Di Afrika Selatan. *Jurnal Artefak*.
- Dewanto, W. (1987). Apartheid Dan Perkembangandi Afrika Bagian Selatan. *Analisis CSIS*, 16(2), 233-233.
- Dipoyudo, K. (1978). Masalah Rasial Di Afrika Selatan. *Analisa*, 125-145.
- Du Toit, B. M. (2015). The Formation Of British South Africa. *Journal Of Southern African Studies*, 41(2). 163-180.
- Prayoga, R. (2017). Dinamika Politik Ekonomi Afrika Selatan Sebelum Dan Sesudah Apartheid. *Jurnal Pendidikan*.
- Smith, R. (2008). Union Of South Africa And Colonial Legacy . *African Studies Quarterly*, 12(4), 457-472.
- Soeratman, D. (2012). *Sejarah Afrika*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Utami, S. F. (2021). Resolusi Konflik Rasial Nirkekerasan Dalam Novel Playing The Enemy. *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama, Dan Humaniora*, 25(1), 11-20.

BAB 10

NEGARA-NEGARA JAJAHAN PRANCIS DAN ALJAZAIR DAN KEMERDEKAAN TUNISIA

A. Latar Belakang

Prancis adalah negara yang berbentuk Republik. dan beribukota di Paris nama resmi negara Prancis sendiri adalah France Republic, secara geografis Prancis terletak di Barat laut benua Eropa dan merupakan negara terluas di benua Eropa (Mulyana, 2017). Negara Prancis memiliki peran yang cukup penting di kancah politik internasional. Prancis merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi internasional, dan sering disamakan dengan negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Prancis menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Pada saat ini Prancis telah menjadi aktor utama dalam politik internasional. Dimana Prancis sering ikut terlibat dalam usaha perdamaian dalam berbagai konflik. (Flower, Bisson, & Blondel, 2018) Prancis sendiri telah beberapa kali terlibat dalam konflik yang terjadi di benua Afrika, dimana banyak terdapat negara-negara bekas jajahan Prancis di benua Afrika pada masa kolonial. kolonialisme Perancis di benua Afrika terdiri dari berbagai aspek yang menggambarkan latar belakang, tujuan, serta konsekuensi dari berbagai kegiatan kolonialisme yang dilakukan oleh negara tersebut. Prancis adalah salah satu negara Eropa yang banyak melakukan kolonialisme dan imperialisme, termasuk di wilayah Afrika. Orang-orang Prancis pada umumnya menganggap tugas utama mereka ialah mengubah orang-orang Afrika menjadi orang Prancis yang lebih beradab. Ada keyakinan dalam pikiran banyak orang Prancis pada masa itu bahwa suatu ikatan kultural dan politik antara Prancis dan jajahannya dapat jauh melampaui tujuan-tujuan ekonomi. Keseriusan Prancis untuk “memerancis-kan Afrika” bahkan membuat Prancis pada 1946 menjadikan orang-orang Afrika yang ada di wilayah jajahannya sebagai warga negara Prancis, (Kurniawati, 2010)

Aljazair merupakan salah satu wilayah dari kawasan Afrika Utara. Aljazair terletak di belahan Afrika Utara yang berbatasan dengan laut Mediterania. Karena letak geografis ini, Aljazair menjadi sumber daya alam yang sangat berlimpah dibanding dengan kawasan Afrika Utara yang lainnya. Aljazair memiliki sejarah panjang karena banyak dikuasai berbagai suku dan bangsa-bangsa asing, sehingga membuat Aljazair pernah tidak memiliki pemerintahan pusat dan identitas teritorial. Namun setelah di kuasai berbagai bangsa, Aljazair mengalami perubahan dalam struktur sosialnya. Banyaknya pengelompokan suku-suku membuat Aljazair menjadi terbelah dan mudah dipengaruhi dari bangsa luar, (Anam, 2019).

Republik Tunisia adalah sebuah Negara Arab di Afrika Utara, yang nama resminya Republik Tunisia, beribu kota Tunis tepatnya di pesisir laut Tengah. Di antara negara-negara yang terletak di rangkaian pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara tanah subur. Republik Tunisia adalah sebuah Negara Arab di Afrika Utara, yang nama resminya Republik Tunisia, beribu kota Tunis tepatnya di pesisir laut Tengah. Di antara negara-negara yang terletak di rangkaian pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara tanah subur, (Mamnuniyatillah, 2022).

B. Negara-Negara Jajahan Prancis di Afrika

1. Kekuasaan Prancis di Aljazair hingga Kemerdekaan Aljazair

Aljazair adalah salah satu wilayah di kawasan Afrika Utara. Aljazair terletak di belahan Afrika Utara yang berbatasan dengan laut Mediterania. Karena letak geografis ini, Aljazair mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dibandingkan dengan kawasan Afrika lainnya. Aljazair dibagi menjadi dua bagian yaitu bangsa Arab dan Bangsa Berber. Penduduk asli Aljazair adalah suku Berber. Aljazair beberapa kali dikuasai oleh bangsa asing, disebabkan oleh penduduknya yang terbagi-bagi ke dalam dua suku, (hak, 2015).

Sebelum Prancis menguasai Aljazair ada beberapa bangsa asing dan dinasti yang telah menguasai Aljazair ini seperti bangsa Fenisia dan Romawi, Dinasti Rustamiyyah, Dinasti Al Murabitun, Dinasti Al Muwahhidun, Dinasti Hafsiyah, Dinasti Mariniyah, dan Turki Utsmani. Pada awal kedatangan Prancis kondisi Aljazair masih sepenuhnya dipimpin oleh beberapa suku dan para pemimpin sufi. Namun setelah Prancis menguasai secara menyeluruh banyak bidang yang diganti peraturannya oleh pihak Aljazair di antaranya dalam bidang politik-ekonomi dan pendidikan. Pihak Prancis memilih pemimpin pemerintahan yang tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat karena itulah Prancis bukan mengambil dari kalangan Sufi. Sehingga dengan mudah Prancis memberikan kebijakan dan disetujui, (hak, 2015).

Tahun 1830 Prancis mengalami kemunduran akibat kekalahannya melawan Yunani sehingga Charles X yang diutus oleh raja Prancis untuk melakukan penyerbuan terhadap Aljazair. Hal ini, merupakan salah satu cara untuk mengalihkan persoalan krisis ekonomi yang dialami Prancis atas kekalahannya melawan Yunani. Awalnya Prancis hanya ingin menguasai beberapa kota saja yang berada di pesisir, namun saat itu pemerintahan Turki Utsmani mengalami kemerosotan sehingga

menjadi jalan bagi Prancis dalam menguasai Aljazair secara menyeluruh. Pada tahun 1832 di Aljazair terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdul Qadir. Abdul Qadir mendeklarasikan diri sebagai pemimpin orang-orang Arab, bertanggung jawab untuk mengaplikasikan hukum Islam di Aljazair dan melawan aksi kolonial Prancis. Perjuangannya memperlihatkan seberapa besar loyalitasnya kepada masyarakat Aljazair. Tetapi upaya perlawanan tersebut membawa Aljazair secara menyeluruh di bawah kekuasaan Prancis. Akhirnya semua perlawanan bersenjata termasuk pasukan Abdul Qadir dan lainnya dihancurkan (Anam, 2019)

Dibawah pimpinan Jendral Beguaed militer Prancis semakin kuat, karena berambisi untuk menguasai Aljazair secara keseluruhan. Dengan begitu serangan terus dilancarkan oleh militer Prancis yang melawan pasukan pembela Aljazair dibawah pimpinan Abdul Qadir, sehingga pihak Aljazair mengalami kekalahan para pasukan dibunuh dan para pemimpinnya diasingkan. Secara otomatis Aljazair secara utuh dikuasai oleh Prancis. Prancis mulai mengambil alih kekuasaan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan peraturan di Prancis. Di bawah pimpinan Beguaed hak-hak masyarakat direbut secara paksa. Dimulai dengan migrasinya para penduduk yang berasal dari bangsa Eropa, Italia dan Spanyol yang bermukim di Aljazair. pada tahun 1847 jumlah penduduk Eropa yang bermigrasi ke Aljazair mencapai 109.000 jiwa. Keadaan masyarakat di Aljazair semakin melemah saat semua peraturan diambil alih oleh Prancis. Terjadinya beberapa kali perlawanan oleh penduduk Aljazair namun, bisa di halau oleh pasukan militer. Hal ini membuat pemberontakan yang dilakukan hanya menjadi sia-sia. Pemberontakan yang dilakukan penduduk Aljazair menambah pasukan Prancis lebih berani dalam menguasai Aljazair. Pemberontakan ini membuat munculnya beberapa kebijakan yang dicanangkan oleh pemimpin Prancis yang di setuju oleh pemimpin pusat di Eropa. (hak, 2015).

Aljazair mendapatkan kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 5 Juli 1962 setelah berjuang melalui perang kemerdekaan yang berlangsung selama delapan tahun. Perang ini dimulai pada 1 November 1954, ketika Front Pembebasan Nasional (FLN) Aljazair melancarkan serangan terkoordinasi terhadap instalasi-instalasi Prancis di Aljazair. Konflik ini merupakan perang gerilya yang sangat intensif, dengan kedua belah pihak mengalami banyak korban jiwa. Perjuangan kemerdekaan Aljazair dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ahmed Ben Bella, Houari Boumediene, dan lainnya. Di tengah tekanan internasional dan tekanan dari dalam negeri Prancis, terutama setelah terjadinya Pemberontakan Aljazair, pemerintah Prancis akhirnya setuju untuk mengadakan referendum yang menghasilkan pemungutan suara yang mendukung kemerdekaan Aljazair.

Setelah kemerdekaannya, Aljazair mengalami proses rekonstruksi nasional yang melibatkan upaya-upaya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembentukan identitas nasional yang baru.

C. Perjanjian Bardo pada Tahun 1881

(Anwar, 2022) Menjelaskan bahwa, perjanjian Bardo 1881 adalah perjanjian yang ditandatangani pada 12 Mei, dimana perjanjian ini menandai titik balik penting dalam sejarah Tunisia. Pada saat itu, Tunisia berada dalam ketegangan antara Kekaisaran Ottoman dan Prancis yang bersaing untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Perundingan untuk perjanjian tersebut dipicu oleh keinginan Prancis untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politiknya di Tunisia yang tengah mengalami ketidakstabilan.

Perjanjian Bardo menetapkan Tunisia sebagai protektorat Prancis, yang berarti Prancis memperoleh kendali penuh atas urusan luar negeri dan pertahanan negara tersebut. Menurut (Ikeda, 2015), meskipun Tunisia masih mempertahankan kemerdekaannya secara nominal, pemerintahan dan kebijakan utamanya dikendalikan oleh Prancis. Selain itu, Prancis juga diberi hak-hak ekonomi yang luas di Tunisia, termasuk hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengontrol sektor-sektor ekonomi penting.

Dampak perjanjian ini terasa dalam perlawanan dan ketidakpuasan di kalangan warga Tunisia. Meskipun memberikan stabilitas relatif di bawah pemerintahan Prancis, perjanjian tersebut juga memicu perlawanan di kalangan warga Tunisia yang menentang kolonialisasi (Anwar, 2022). Perlawanan tersebut muncul dalam bentuk gerakan nasionalis yang menuntut kemerdekaan dari dominasi Prancis.

Menurut (Imaduddin, 2021), kolonialisasi Prancis membawa transformasi besar dalam struktur sosial dan ekonomi Tunisia. Pengaruh budaya, kebijakan ekonomi, dan struktur politik Tunisia diubah secara signifikan selama periode ini. Meskipun Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956, perjanjian Bardo tetap menjadi titik balik penting dalam sejarah negara tersebut, menandai awal dari periode kolonisasi yang panjang dan perjuangan menuju kemerdekaan yang akan berlangsung hingga abad ke-20.

Jadi, secara keseluruhan Perjanjian Bardo 1881 menjadi tonggak bersejarah yang menandai dimulainya era kolonisasi Prancis di Tunisia. Meskipun memberikan stabilitas relatif, perjanjian tersebut memicu perlawanan dan ketidakpuasan di kalangan warga Tunisia yang menentang

dominasi Prancis. Dampaknya terasa dalam transformasi sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Meskipun Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956, perjanjian Bardo tetap menjadi simbol dominasi Prancis dan perjuangan menuju kemerdekaan yang berlangsung hingga abad ke-20.

D. Prancis Di Tunisia Hingga Kemerdekaan Tunisia

Penaklukan Prancis atas Tunisia terjadi pada tahun 1881 tepatnya melalui Perjanjian Bardo. Berbagai usaha masyarakat Tunisia untuk dapat memperoleh kemerdekaannya diwarnai oleh berbagai bentuk perjuangan kemerdekaan Tunisia yang dipimpin oleh berbagai gerakan nasionalis. Berikut gerakan-gerakan nasionalis Tunisia dalam rangka meraih kemerdekaan atas Prancis, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Gerakan Pemuda Tunisia

Gerakan ini merupakan salah satu gerakan partai politik Tunisia yang dibentuk oleh kaum intelektual muda disana pada tahun 1907. Selain itu mereka juga mendirikan surat kabar *Le Tunisien*. Partai politik ini dipimpin oleh Ali Bash Hamba dan Bashir Sfar. Partai ini diikuti oleh kalangan muda terpelajar dan profesional muslim. Tujuan dari berdirinya Gerakan Pemuda Tunisia ini adalah untuk menuntut kendali penuh Tunisia atas pemerintahan dan administrasi negara, serta hak kewarganegaraan Tunisia (Britannica, 1957). Pada tahun 1911, partai ini memprotes secara besar-besaran terhadap pendaftaran pemakaman muslim sebagai milik umum Prancis, yang mana hal tersebut pun menyebabkan terjadinya kerusuhan hingga pembunuhan di Tunis dan memakan banyak korban, akibatnya tokoh-tokoh nasionalis Tunisia ditangkap oleh Prancis dan di usir dari Tunisia. Pada Juni 1912 warga Tunisia yang berjumlah 35 orang yang dianggap terlibat pada kerusuhan tahun 1911 di adili, dengan tujuh orang di hukum mati.

2. Partai Destour

Partai Destour berdiri pada tahun 1920 dengan dipimpin oleh Syekh al Ta'libi yang juga merupakan pemimpin kaum muda Tunisia. Tujuan dibentuknya partai ini adalah untuk membebaskan Tunisia dari penjajahan Prancis. Partai ini sering mengadakan demonstrasi dan aksi masa untuk menentang kebijakan Prancis, aksi yang dilakukan juga tidak jarang melibatkan kerusuhan dan kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan Partai Destour dinilai radikal oleh

Prancis. Syeikh al Ta'libi selaku pimpinan partai pun diasingkan pada tahun 1923 hingga tahun 1925 yang mengakibatkan Partai Destour resmi dilarang pada tahun 1933 (Britannica, 1957).

3. Partai Neo-Destour

Didirikan pada 2 Maret 1934 oleh Habib Bourguiba yang bertujuan untuk meneruskan perjuangan dari Partai Destour. Dibawah pimpinan Borguiba perjuangan nasionalisme semakin kuat mengakibatkan Prancis mereformulasi kebijakannya secara lebih terbuka dan lebih sensitif terhadap tuntutan-tuntutan dari Tunisia. Pada 27 Februari 1956 Habib Bourguiba datang ke Prancis sebagai pemimpin delegasi Tunisia untuk bernegosiasi dengan Prancis mengenai kemerdekaan Tunisia (Nurbaiti, 2018). Hingga akhirnya pada 20 Maret 1956, kemerdekaan Tunisia diakui secara resmi oleh Prancis dan pemerintahan Tunisia pun dikembalikan. Bourguiba pun kemudian diangkat sebagai Presiden Tunisia. Seiring dengan penghapusan sistem monarki dan merubah Tunisia menjadi negara republik pada 25 Juli 1957, Undang-Undang Dasar Tunisia pun segera dibentuk dan resmi ditetapkan sejak 1 Juni 1959.

E. Rangkuman

Benua Afrika dahulunya sempat dikuasai oleh beberapa bangsa Eropa, salah satunya yakni Prancis. Sebelum Perang Dunia I, Prancis telah memiliki koloni yang luas di benua Afrika, yang mana Aljazair dan Tunisia atau Tunis menjadi salah satu wilayah koloni Prancis pada saat itu. Sebagian besar daerah koloni Prancis tersebar di tiga wilayah Afrika, seperti wilayah Afrika Barat Laut, wilayah Afrika Barat, dan wilayah Afrika Equatorial. Aljazair dan Tunisia menjadi salah satu wilayah koloni Prancis di Afrika. Pada mulanya kedatangan Prancis mengklaim ingin membebaskan Aljazair dari kekuasaan Utsmani, namun ternyata pada kenyataannya Prancis memiliki maksud tersembunyi untuk dapat menguasai Aljazair. Sedangkan di Tunisia, Prancis menduduki Tunisia dengan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Bardo 1881, dan bukan dengan ekspansi fisik ke wilayah Tunisia tersebut. Melalui Perjanjian Bardo 1881 tersebut, Prancis pun membuat wilayah protektorat di Tunisia. Aljazair meraih kemerdekaannya sebagai Republik Aljazair pada tahun 1962, sedangkan Tunisia meraih kemerdekaannya pada tahun 1956 setelah melalui berbagai perlawanan dengan Prancis.

F. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat!

1. Jelaskan apa saja Negara-negara jajahan Prancis di Afrika?
2. Bagaimana kekuasaan Prancis di Aljazair hingga kemerdekaan Aljazair ?
3. Jelaskan perjanjian Bardo pada tahun 1881 ?
4. Jelaskan bagaimana Prancis di Tunisia hingga Kemerdekaan Tunisia?

G. Rujukan

- Anam, S. (2019). *Sejarah Perkembangan Islam Di Aljazair*. Di Turots: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2).
- Abdelhamid, H. (2014). *The French Protectorate in Tunisia: A History of Colonialism and Resistance*. Journal of North African Studies, 19(4), 521- 543.
- Bouhdiba, A. (1973). *The Impact of French Colonialism on Tunisian Culture*. International Social Science Journal, 25(3), 467-484.
- Britannica. (1957). *Partai Konstitusi Liberal Tunisia, Gerakan Pembebasan Nasional*. Britannica.com. Diambil kembali dari <https://www.britannica.com/topic/Young-Tunisians>. Diakses tanggal 23 Maret 2024.
- Bourouiba, R. (2011). *The Making of Modern Tunisia: Colonialism, Nationalism, and Decolonization*. Cambridge University Press.
- Cooper, F. (2002). *Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa*. Cambridge University Press.
- Crouzet, F. (2007). *Le protectorat français en Tunisie (1881-1956)*. Paris: Fayard.
- Entelis, J. P. (1980). *The Tunisian Nationalist Movement: A Case Study in Colonial Resistance*. International Journal of Middle East Studies, 11(4), 481-500.
- Esposito, John L. (2001). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Fuller, Graham, E. (1996). *The Next Fundamentalist State*. USA: Rand.
- Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Cornell University Press.
- Khalili, L. (2007). *Tunisia: Colonialism and Independence*. Third World Quarterly, 28(7), 1263-1281.
- Kusmayadi, Yadi. (2018). *Pengaruh Konverensi Asia Afrika (KAA) 1955 Terhadap Kemerdekaan Negara-Negara Di Benua Afrika*. Jurnal Agatsya, Vol. 8(1).
- Levy, Michael, I. (2010) *The History of North Africa*. New York: Britannica Education Publishing.
- Lewis, M. D. (2014). *Divided Rule: Sovereignty and Empire in French Tunisia, 1881–1938 (1st ed)*. United State Of America: University of California Press. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt4cggf5h>
- Nevill, Barbour, D. (2022). *The Protectorate (1881–1956)*. Retrieved from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Tunisia/The-Jasmine-Revolution>
- Nurbaiti, V. (2018). *Transisi Demokrasi Di Tunisia Pasca Arab Spring*.

Universitas Lampung.

- Prasad, B. (1960). *Contemporary Africa*. London: Asia Publishing House. Romein, J., Machten, van, D., T. (1950). *Wereldbibliotheek N. V.* Amsterdam
Antwerpen.
- Rizal, R. (2022). *Negara Mayoritas Islam Yang Pernah Dijajah Prancis*.
Sindonews.com.Diambilkembalidari
[https://international.sindonews.com/read/818971/41/negara-mayoritas- islam-
yang-pernah-dijajah-prancis](https://international.sindonews.com/read/818971/41/negara-mayoritas-islam-yang-pernah-dijajah-prancis). Diakses tanggal 23 Maret 2024.
- Rouseet, Camille. (1889). *Conqueta De L'algerie 1841-1887*. Paris: Librare Plon. Sastradinata,
K. & Padmawijaya, R. (1977). *Sejarah Pergerakan Nasional
Bangsa-Bangsa Afrika*. Bandung: FKIP. Soeratman, D. (2012). *Sejarah
Afrika*. Yogyakarta: Ombak.
- Ul'hak, Silpia. (2016). *Dampak Kebijakan Prancis Terhadap Masyarakat Aljazair 1830-1914*.
Skripsi Adab Dan Humaniora. Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Widodo, S., Yunus, A. Rahim, Syukur, Syamzan. (2022). *Perjuangan Negara- Negara Muslim
Untuk Mencapai Kemerdekaan*.
- Wallbank, Walter, T. (1964). *Contemporary Africa: Continent in Transition*.
Toronto, New York, London: D.Van Nostrand Company Inc.
- Yuliani. (2020). *Modul Pembelajaran Sma Sejarah Kelas Xi: Hubungan Perkembangan Paham-
Paham Besar; Demokrasi, Liberalisme, Sosialisme, Nasionalisme, Pan-Islamisme Dengan
Gerakan Nasionalisme Di Asia-Afrika*.
- Zartman, W. (2009). *The Legacy of French Colonialism in Tunisia*. Mediterranean Politics,
14(2), 235-253.

BAB 11

JAJAHAN NEGARA PERANCIS, MAROKO, PERJANJIAN FEZ 1912, PERISTIWA BAR BAR TAHUN 1950, KEMERDEKAAN MAROKO

A. Latar Belakang

Maroko merupakan negara dengan monarki konstitusional dan parlemen yang dipimpin oleh seorang raja. Dengan letak geografis yang strategis dan menjadi pintu gerbang antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, Maroko memiliki perpaduan budaya yang sangat kaya. Selain itu, terdapat banyak sumber daya alam. Maroko memiliki fosfor di wilayahnya dan merupakan produsen fosfor ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Penghuni Maroko pertama yang diketahui adalah suku Amazigh dan kelompok suku lainnya. Struktur hukum mereka ditentukan oleh sistem informal berdasarkan hukum adat Islam dan non Islam. Awalnya, sebagian besar masyarakat Amazigh menganut agama Kristen, namun melalui pertemuan Arab yang dimulai pada abad ke-7, banyak dari mereka yang masuk Islam, sehingga sistem hukum informal mereka sebagian besar bersumber dari ajaran Islam. Budaya Amazigh berbeda dengan budaya Maroko lainnya terutama dalam hal bahasa, itulah sebabnya banyak anak putus sekolah karena diajar dalam “bahasa asing”, yaitu bahasa Arab. Sekitar dua pertiga penduduk Amazigh Maroko tinggal di daerah pedesaan, dimana budaya mereka sangat mengakar. Sistem politik Amazigh berpusat pada suku dan keluarga. Setiap suku mempunyai kepala suku, dan masyarakat sering kali mempunyai Sharif, sebuah keluarga yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang kemudian diberikan penghormatan dengan penuh rasa hormat.

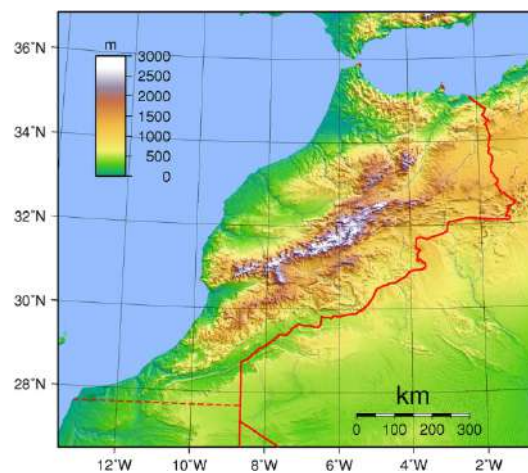
Pada awal tahun 1900-an, Maroko terbagi antara pemerintahan Spanyol dan Perancis, dengan wilayah tengah sebagian besar berada di bawah kendali Perancis, sedangkan wilayah utara dan selatan lebih banyak dipengaruhi Spanyol. Inggris Raya mengakui wilayah pengaruh Prancis dan pada tahun 1912 Maroko dinyatakan sebagai protektorat Prancis. Oleh karena itu, wilayah ini secara hukum dikuasai dan dilindungi oleh Prancis hingga merdeka dari Prancis pada tahun 1956; Penjajah Spanyol lainnya mundur pada waktu yang hampir bersamaan dengan penjajah Prancis (Leila Hanafi, 2020).

Maroko adalah negara mayoritas Muslim. Menurut tahun 1900, populasi negara Maroko awalnya enam juta jiwa. Pertumbuhan penduduk cukup pesat, terutama pada tahun 1950-an dan 1960-an yang tumbuh sekitar 3%. 1981. 20 juta orang tinggal di Maroko menurut data resmi. Jumlah tersebut meningkat menjadi 29,6 juta pada tahun 2004, dan pada tahun 2014, Pusat Statistik Maroko mempublikasikan populasinya sebesar 33,8 juta (Bernard Botiveau, 1993).

Sistem pemerintahan Maroko mengikuti model kerajaan (Kingdom of Morocco) berdasarkan konstitusi (monarki konstitusional). merupakan negara berkembang yang pernah dijajah oleh Perancis. Pada tanggal 2 Maret 1956, Sultan dan pemerintah Perancis mendeklarasikan kemerdekaan Maroko (Deklarasi Persatuan Perancis-Maroko). Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Maroko (Maksum, M. , 2016).

B. Maroko Sebagai Negara Jajahan Perancis

1. Kondisi Geografis Maroko



Gambar 1. Peta Geografis Maroko

Sumber: wikipedia.com

Sultan Hasan II menyatakan bahwa Maroko dapat disamakan dengan sebatang pohon yang memiliki akar yang meluas ke seluruh benua Afrika. Tetapi, menghirup udara di benua Eropa. Tentu saja, Maroko adalah Negara paling barat di antara negara-negara Maghrib lainnya, seperti Algeria dan Tunisia. Rabat merupakan ibu kota kerajaan Maroko, sementara Casablanca menjadi kota terbesar dan paling terkenal di negara tersebut.

Negara Maroko terletak di pertemuan antara benua Eropa, Afrika, dan Asia. Maroko memiliki empat pusat utama: Rabat sebagai ibu kota pemerintahan, Casablanca sebagai pusat bisnis dan industri, Marrakech sebagai destinasi wisata, dan Fes sebagai pusat kebudayaan

dan ilmu pengetahuan. Maroko terdiri dari lima wilayah yang berbeda, yaitu pegunungan, area subur di bagian barat, daerah berlumpur di barat daya, tanah pertanian di tengah wilayah, dan gurun yang berdekatan dengan Gurun Sahara.

Area pegunungan dibagi menjadi tiga wilayah: Middle Atlas, High Atlas, dan Anti Atlas Ranges (Njoke, 2006). Di sebelah selatan Rif dan lembah sungai Sebu terletak wilayah Middle Atlas, yang terpisah dari tepi timur High Atlas yang meluas hingga ke lembah sungai Abid. High Atlas membentang sejauh 450 mil dan mencakup area seluas 40 mil persegi. Karena itu, wilayah High Atlas terbagi menjadi dua zona iklim yang berbeda; satu zona dipengaruhi oleh angin laut Mediterania, sementara zona lainnya dipengaruhi oleh kondisi dari gurun Sahara.

Di selatan Anti-Atlas, terdapat koneksi dengan High Atlas melalui gunung vulkanik Siruoa. Di wilayah yang jauh ke selatan Anti-Atlas, terdapat oase, sungai yang hanya terjadi pada musim tertentu, dan kota-kota kecil yang terisolasi. Terdapat dua pegunungan yang memiliki pengaruh terhadap pembagian kawasan Maroko, yaitu pegunungan Atlas dan pegunungan Rif. Maroko memiliki empat musim yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur.

2. Populasi Penduduk Maroko

Seperti halnya di masyarakat Arab atau Afrika, Maroko juga terdiri dari banyak sekali komunitas bahasa. Pada waktu yang lampau, setiap komunitas bahasa memiliki kehidupan sendiri dan beroperasi secara mandiri. Suku Berber merupakan kelompok etnis asli Maroko. Dia sudah menetap di daerah Maroko dan sekitarnya berabad-abad sebelum bangsa lain menguasainya. Tiga suku yang membentuk Suku Berber adalah Amazigh, Syilha, dan Rifi. Ketiga kelompok masyarakat ini memiliki ragam bahasa dan dialek yang berbeda-beda.

Fenomena ini meredup karena adanya perkawinan antara suku dan pengaruh kuat bangsa Arab dalam hal bahasa maupun identitas. Hingga akhirnya, terjadi perkawinan antara bangsa Arab dan Berber yang menghasilkan generasi baru. Mayoritas penduduk Maroko adalah Arab-Berber Maroko, yang mencapai 99,1% dari total penduduk. Penduduk Yahudi hanya 0,2%, sedangkan minoritas lainnya, termasuk Moor, Arab, Negro, dan Eropa, mencapai 0,7% (Ibid, hal. 26).

Sebanyak 32.209.101 juta jiwa penduduk Maroko, sekitar sepertiga dari total penduduknya, tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, sekitar tiga dari setiap sepertiga yang tinggal di kota tersebut, tinggal di Casablanca. Sebagian besar penduduk lokal Berber tinggal

di daerah pegunungan. Nama Berber sendiri berasal dari istilah Romawi "Barbarus" yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tinggal di wilayah Maroko. Saat ini, mayoritas penduduk Maroko adalah keturunan yang berasal dari perpaduan etnis Arab, Berber, dan Afrika. Masyarakat Maroko yang berdarah Arab dan Berber memiliki beberapa keunikan dan ciri khas yang membedakan mereka dari yang lain: mereka memiliki mata berwarna biru yang bervariasi dengan jenis kulit karena adanya percampuran suku, serta memiliki tubuh yang tinggi dan kurus.

3. Bahasa

tiga bahasa yang menjadi mayoritas di wilayah ini, yakni Arab, Berber, dan Prancis. Lebih dari dua pertiga jumlah penduduk secara keseluruhan menggunakan bahasa Arab. Di Maroko terdapat dua variasi bahasa Arab, yaitu bahasa Arab formal dan bahasa Arab Maroko. Dalam surat kabar, korespondensi, pidato, serta proses pembelajaran agama dan filsafat, Bahasa Arab standar atau yang juga dikenal sebagai Bahasa Arab fushah, seringkali digunakan. Penggunaan bahasa Arab Fushah dalam dialog sehari-hari tidak umum. Dalam percakapan sehari-hari, bahasa Arab Maroko sering digunakan. Bahasa Arab ini telah dipengaruhi oleh dialek orang Berber, Prancis, dan Spanyol. 30% dari penduduk menggunakan Bahasa Berber dengan sementara itu Bahasa Prancis digunakan dalam kepentingan bisnis, pemerintahan, dan hubungan internasional. Pentingnya mempelajari Bahasa Prancis di sekolah ditekankan agar generasi mendatang dapat berinteraksi dengan masyarakat internasional (Ibid, hal. 28).

4. Pemerintahan

Dinasti Alawiyah telah mewarisi takhta kerajaan selama beberapa generasi. Sebagai kepala negara, Raja resmi dilantik mengikuti sistem khalifah dan diangkat menjadi Amirul Mukmin, yang menandakan bahwa Raja juga memimpin umat Islam. Pemerintahan berjalan melalui eksekutif yang terdiri dari kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh kepala negara. Maroko memiliki sistem parlemen dengan dua majelis, yaitu majelis bawah yang dipilih oleh rakyat langsung dan majelis atas yang dipilih secara tidak langsung. Setelah sang ayah meninggal, Raja Muhammad VI mengumumkan bahwa Maroko akan menjadi Negara dengan sistem monarki konstitusional, yang menganut prinsip liberalisme ekonomi dan demokrasi multipartai. Ia berkomitmen untuk menghilangkan kemiskinan, menciptakan peluang kerja, serta lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat (Njoke, 2006)

Maroko adalah suatu wilayah yang terletak di tanah Maghrib dan merupakan negara yang secara resmi tidak pernah dikuasai oleh bangsa manapun. Tunisia, Aljazair, dan Libya memiliki pengalaman yang berbeda dengan negara-negara tetangganya karena sering kali menghadapi gangguan dan intervensi dari kekuatan asing. Akan tetapi, ketika memasuki awal abad ke-20 M, negara-negara yang dianggap sebagai negara dunia ketiga atau negara-negara inferior mulai terkena gelombang kolonialisme. Maroko juga mengalami tekanan dari kekuatan imperialisme barat seperti Inggris dan Prancis (Fitria, 2018).

Pada tahun 1912, Abdelhafid menandatangani *Treaty of Fez* yang menjadi awal dari masa Protektorat Prancis di Maroko. Setelah traktat tersebut ditandatangani, keadaan Maroko bertambah buruk, terutama di sektor ekonominya. Keadaan politik saat ini tidak lagi memungkinkan adanya kebebasan berpolitik seperti yang ada sebelumnya. Budaya Prancis mulai diperkenalkan kepada masyarakat Maroko. Sekolah dan media berperan penting di Prancis dalam mengadopsi budaya secara dalam. Sangat memprihatinkan, pemisahan antara orang Arab dan orang Berber telah dilakukan selama mereka hidup bersama sebelum kedatangan Prancis dengan harapan memberikan keistimewaan kepada orang Berber (Rahman, 2015).

C. Perjanjian Fez 1912

Pada tahun 1894-1908, Maroko jatuh ke tangan Abdul Aziz bin Hassan, atas permintaannya Perancis menyusup pada tahun 1901-1904. Penggantinya, Abdul Hafiz, juga meminta bantuan militer, keuangan dan politik dari Prancis sehubungan dengan pemberontakan rakyat Maroko, dan melepaskan kemerdekaan politik mereka. 30 Maret 1921 M Perjanjian Fez antara Perancis dan Maroko menyepakati bahwa Maroko akan menjadi protektorat Perancis, meskipun para elit tradisional sebenarnya menginginkan kemerdekaan berdasarkan nasionalisme Islam.

Partai Front Nasional dibentuk pada tahun 1930 berdasarkan keputusan Berber tanggal 16 Mei 1930 M. di Rabat. Komite Aksi Maroko lahir sebagai partai nasionalis pertama pada Mei 1932, namun dibubarkan oleh Prancis 3 tahun kemudian. Selanjutnya pada tahun 1934 lahirlah partai Istiqlal (Kemerdekaan) yang dipimpin oleh Allal Al-Fazi yang menuntut kemerdekaan penuh bagi Maroko dalam bentuk pemerintahan konstitusional. Pemimpin Maroko saat itu adalah partai Sultan Muhammad V. Istiqlal yang diubah setelah Perang Dunia II menjadi Partai Kemerdekaan Demokratik yang berorientasi sayap kiri (komunis), meski dengan sedikit pendukung. Pada akhir tahun 1946, partai Istiqlal berubah haluan menjadi partai massa, namun

citranya (Sultani Muhammad V) dibuang. Baru pada tahun 1955 Sultan Muhammad V kembali dari pengasingan, yang secara tiba-tiba mengakhiri rezim protektorat. Pada tanggal 2 Maret 1956, Maroko merdeka dan Barakah menjadi rajanya (Azhar Nur, 2011).

Berdasarkan pemaparan Teguh Santosa, Direktur Pemasaran Media Asing DK-PRIMA dalam wawancara dengan media internet Republik Merdeka, Kerajaan Maroko telah berdiri sejak abad ke-8 dan merupakan salah satu kerajaan tertua di dunia. Penjajah Eropa mulai menyerbu negara-negara Afrika dan akhirnya Maroko jatuh ke tangan Perancis, sedangkan Sahara berada di pihak Spanyol dan wilayah tersebut lebih dikenal dengan nama Sahara Barat. Berasal dari Perjanjian Fez yang ditandatangani pada bulan Maret 1912. Setelah beberapa tahun menduduki wilayah tersebut, setelah Perang Dunia Kedua, Prancis membebaskan Maroko dan Front Polisaria memberikan tekanan kepada Spanyol hingga akhirnya Spanyol menandatangani perjanjian antara Maroko dan Mauritania. kemudian menyerahkan Sahara Barat kepada keduanya. Sedikit demi sedikit, di bawah tekanan berbagai pihak, Mauritania pun mundur dan menyerahkan Sahara Barat (Adnan Adwitama, 2022).

Berdasarkan sejarah panjang Maroko, yaitu sejarah dinasti Islam, kaum nasionalis terus melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan modernisme yang diusung Perancis. Kaum nasionalis percaya bahwa nasionalisme Maroko berkembang jauh sebelum kedatangan Perancis. Identitas Arab-Muslim menjadi pertanyaan penting untuk memperkuat argumen dasar tersebut. Sebab, Dahir Berber menjadi blunder Perancis. Karena Dahir Berbere tidak menguatkan masyarakat Berber, justru menimbulkan perbedaan antara orang Arab dan Berber. Kaum nasionalis menyadari bahwa protektorat hanyalah siasat Perancis untuk menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, yaitu pelaksanaan kebijakan kolonial. Perjanjian Fez yang menjanjikan penghormatan terhadap kedaulatan Maroko, nyatanya secara perlahan mengebiri Perancis (M. Arief Rahman, 2015).

D. Peristiwa Bar-bar

Peristiwa "barbar" yang terjadi di Afrika pada tahun 1950-an meliputi berbagai konflik, pemberontakan, dan pergerakan revolusioner di berbagai negara di benua tersebut. Ini termasuk perjuangan melawan penjajahan Eropa, yang pada saat itu banyak negara Afrika yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Peristiwa tersebut sering kali disebut sebagai "perang-perang kemerdekaan" atau "perang-perang pembebasan," di mana para pejuang kemerdekaan berusaha mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial bagi negara

mereka. Beberapa peristiwa penting termasuk pemberontakan Mau Mau di Kenya, perjuangan di Aljazair untuk meraih kemerdekaan dari Prancis, serta gerakan kemerdekaan di negara-negara seperti Ghana, Nigeria, Kongo, dan banyak lagi. Periode ini menandai awal dari dekolonisasi di Afrika, di mana banyak negara berhasil meraih kemerdekaan mereka dari penjajah Eropa.

Syekh Abu Amran al-Fasi diperintahkan oleh Abdullah bin Yasin untuk menyebarkan agama di kalangan suku Barbar Sanhaja di daerah Sahara, Maroko bagian selatan. Sebagai seorang ulama terkemuka yang bermadzhab Maliki dan berasal dari Maroko Utara, ia mengambil tugas tersebut. Meskipun suku Barbar Sanhaja telah mengenal Islam sejak abad ketiga Hijriah, dakwahnya dianggap terlalu keras bagi masyarakat nomadik Barbar. Akibatnya, ia diusir dari Sahara. Al-Fasi kemudian melanjutkan dakwahnya ke arah selatan, khususnya sekitar sungai Senegal, dimana ia mendirikan sebuah ribath sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama. Kelompok yang mendiami ribath ini kemudian dikenal sebagai Murabithun, juga dikenal sebagai al-mulastimun (bercadar). Mereka berhasil mendapatkan pengikut dan membentuk suatu komunitas keagamaan. Dengan motivasi keagamaan sebagai dasar, mereka kemudian mengorganisir diri untuk melakukan jihad melawan berbagai suku Sanhaja lainnya. Inilah awal mula pergeseran gerakan dakwah agama menjadi gerakan politik. Di bawah pimpinan panglima Abu Bakar bin Umar, kelompok Murabithun melancarkan serangan terhadap suku Barbar lainnya yang dianggap sesat di Sahara dan Maroko (Moh. Nurhakim, 2004).

Perang-perang "barbar" di Afrika pada tahun 1950-an dan 1960-an, yang disebut sebagai "revolusi Afrika," tidak mencerminkan kemerdekaan sejati, tetapi merupakan peristiwa yang digantikan dengan neokolonialisme oleh kelompok yang melakukan penjarahan. Gelombang kemerdekaan di Afrika pada periode tersebut bukanlah representasi dari kemerdekaan yang sebenarnya, melainkan pergeseran dari kolonialisme menuju neokolonialisme oleh mereka yang terlibat dalam penjarahan. Suku Barbar, dalam konteks perang-perang Bar Bar Afrika 1950, memegang peran kunci sebagai pionir dan penyokong kemerdekaan di Afrika. Mereka adalah kelompok kepemimpinan yang berasal dari wilayah Afrika Utara, yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara Barat. Mereka merupakan dinasti pertama yang berhasil meraih kendali atas wilayah tersebut (Syahraeni, 2013).

Perang Barbar Afrika 1950 berakhir pada tahun 1950 dengan pendudukan militer di Ethiopia dan penambahannya sebagai koloni baru di Afrika. Akar penyebab konflik ini berasal dari kekerasan apartheid di Afrika Selatan, yang mendorong ANC (African National Congress) untuk

menyatakan seluruh wilayah Afrika Selatan sebagai zona konflik. Sebelumnya, Afrika Utara dan Maroko secara bertahap melepaskan pengaruh Istanbul, sementara industrialisasi Eropa memperkuat integrasi kawasan Afrika Utara dengan perdagangan Mediterania. Jejak kehadiran orang Phoenician di Maroko menunjukkan peran aktif kawasan ini dalam perdagangan sejak zaman kuno. Pada tahun 670 M, pasukan Umayyah di bawah pimpinan Uqba ibn Nafi menaklukkan Afrika Utara, membawa budaya Arab dan agama Islam ke wilayah tersebut. Setelah kekuasaan dinasti Bani Idrisiah meredup, pengaruh politik Arab menurun di Maroko, memberi kesempatan bagi suku Barber untuk mengambil alih pemerintahan. Puncak keemasan Maroko terjadi di bawah kekuasaan Barber pada abad ke-11 M. Dinasti Almoravids, Almohads, kemudian Marinid dan terakhir Saadi, berusaha memperluas pengaruh Maroko ke Barat Laut Afrika. Dampak pengusiran massal kaum Muslim dari Andalusia dan migrasi besar-besaran kaum Muslim ke Afrika Utara menciptakan masalah sosial di wilayah tersebut, mendorong beberapa untuk melakukan jihad melawan pendudukan Spanyol dan Portugis. Pada tahun 1684, Alwai menyerbu Tangier. Hubungan yang baik dengan Amerika Serikat telah terjalin sebelumnya (Sahabat Maroko, 2010).

E. Kemerdekaan Maroko

- **Perjuangan masyarakat Maroko**

Kekalahan Prancis oleh Jerman dalam Perang Dunia II sudah jelas mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perjuangan masyarakat Maroko. Alasannya adalah hal ini mempengaruhi psikologi masyarakat Maroko, membuat mereka semakin percaya diri, hal ini membuktikan bahwa Prancis tidak seunggul yang diharapkan sampai dikalahkan oleh Jerman pada tahun 1940. Selain itu, hal ini sebenarnya sesuai dengan kasus di Indonesia. Belanda kalah atas Jepang, kekalahan Jepang di tangan sekutu mempengaruhi psikologi para pahlawan dan pendiri bangsa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian peristiwa hal-hal di atas hanya sekedar faktor pendukung namun menjadi kunci utama dalam mencapai kemerdekaan, realisasinya tetap berada di tangan raja. Karena bagaimanapun juga, raja adalah otoritas tertinggi komunitas muslim Maroko. Sultan masih dibutuhkan untuk melangserkan kekuasaan Prancis di Maroko, bagaimanapun juga Sultan Mohammed V adalah tokoh populer di Maroko saat itu. Di sisi lain, kaum nasionalis butuh sosok sultan akan mengisi posisi tersebut ketika Prancis ditaklukkan agar Maroko belum runtuh sebagai sebuah negara. Artinya, kalangan nasionalis sangat tergantung kepada dukungan sultan agar upaya-upaya yang mereka lancarkan dapat berjalan sesuai rencana.

Pada tahun 1943, para pemimpin nasionalis masih ditahan dan mengasingkan. Hal ini memaksa kaum nasionalis untuk segera mengubah bentuk perjuangannya, awalnya hanya memaksakan perubahan di Perancis, dari beberapa hal terkait hubungan Maroko dan Prancis saat itu beralih ke tuntutan kemerdekaan. Permintaan itu terkandung dalam satu Pernyataan Ahmed Balafrezi, Abdallah Ibrahim dan Mohammed Ryazidi dan Umar Abdeljalil, ini bukan hanya ditujukan kepada gubernur umum, namun diangkat ke forum internasional untuk memungkinkan Prancis untuk mendapat tekanan dunia internasional. (Lahbabi, hal 23)

- **Proses kemerdekaan**

Pada tanggal 11 Januari 1944, Partai Istiklal (Hizb al-Istiqlal) didirikan bersamaan dengan berlakunya proklamasi kemerdekaan. gubernur baru Gabriel Pyuault. Setelah pengiriman selesai, Prancis akan mempertimbangkan reformasi hubungan antara Maroko dan Prancis, namun hal itu tidak berarti mengakui kemerdekaan Maroko. Pada tanggal 13 Januari 1944, di Konferensi Brazzaville, tampaknya Prancis tidak mempertimbangkan tuntutan nasionalis. Tanggal 29 Januari orang-orang Istiklal menjadi tahanan politik. Selain itu, Sultan juga dinyatakan sebagai pembangkang oleh de Gaulle karena simpatinya terhadap gerakan tersebut yang dilakukan oleh kaum nasionalis. Hubungan komunikasi implisit yang dibangun selama ini tampaknya telah diketahui oleh orang Prancis.

Pada tahun 1947, Sultan mulai secara terbuka mendukung perjuangan kalangan nasionalis. Dia menunjukkan ini selama kunjungannya ke Tangier, sebuah lokasi yang dijadikan tempat netral, zona internasional. Meski terang-terangan mendapat dukungan penuh dari Sultan, kalangan nasionalis masih kekurangan dukungan dari wilayah pedesaan. Disebabkan oleh memburuknya kondisi perekonomian (Bidwell, hal 185). Pada tahun 1946, Laoux digantikan oleh Eric Labonne. Sebagai sebuah langkah pertama, Labonne memerintahkan pembebasan tahanan yang tersisa. Sejak berdirinya Istiklal, tindakan represif segera diambil. Pada tahun 1944, Raja Mohammed V sangat berhati-hati menjadi pelindung yang memegang kunci akan keberhasilan pergerakan nasionalis untuk kedepannya. Pada tahun 1945, ia disambut oleh antusias pendukung yang menyuarakan kemerdekaan di Marrakesh (Abderrahim Ouardighi, 1976). Namun sebelum itu dapat dilakukan terjadi kerusuhan di Casablanca, bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh militer Prancis, Setidaknya beberapa ratus orang tewas (Leveau, hal 19-25). Setelah tragedi tersebut, Labonne digantikan oleh Jenderal Juin. Mengganti gubernur Jenderal adalah angin segar bagi kaum nasionalis Maroko. Alasannya, Juin ingin mengakui Sultan sebagai pemimpin

independen Maroko. pada saat yang sama, sultan dapat terus berbicara kepada publik dengan mewakili bangsa Maroko. Dengan cara ini, sultan lebih leluasa melakukannya untuk memperkuat rakyat Maroko. Selain itu, berita positif lainnya adalah bahwa pada tahun 1947, daerah pedesaan mengalami pemulihan pasca perang dan kekeringan, dan siap mendengarkan pidato-pidato dari sultan (Julien, Le Maroc, & Stephen Bernard, 1968). Kaum nasionalis harus menunjukkan kebencian serupa menentang perlindungan Perancis sebagai dasar penyatuan masyarakat Maroko. Hasilnya jelas, untuk melawan protektorat Perancis, sehingga Maroko bisa menjadi negara merdeka. Dalam perkembangan selanjutnya, inilah gerakan nasionalis yang memainkan peran penting dalam mencapai kemerdekaan Maroko. Mengerahkan masyarakat untuk mendukung pemberontakan dan Protes tersebut dapat dengan Maroko memperoleh kemerdekaannya (Jonathan, 2013).

Gerakan nasionalis Maroko dan mobilisasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembebasan lahan wilayah yang dibombardir perang. Masyarakat Maroko mendukung gerakan kemerdekaan negara melalui berbagai cara, termasuk gerakan nasionalis, mobilisasi masyarakat, perjuangan politis-politisi, perjuangan rakyat dan raja, perjuangan Aljazair, perjuangan Front Polisario, dan perjuangan pahlawan kemerdekaan. Semua ini merupakan bagian dari proses perjuangan kemerdekaan Maroko. Proses kemerdekaan Maroko dari kekuasaan Prancis dan Spanyol berlangsung dalam dua fase. Pada tahun 1956, Maroko mendapatkan kemerdekaan dari Prancis, dengan Sultan Mohammed V memegang kendali pemerintahan pada saat itu. Meskipun begitu, bagian selatan Maroko masih tetap di bawah kekuasaan Spanyol. Pembebasan bagian selatan Maroko dari Spanyol terjadi sekitar dua tahun setelahnya, ketika Spanyol mundur dari Sahara. Sebelum itu, sekitar dua tahun sebelum penarikan Spanyol, Aljazair dengan dukungan dari Uni Soviet membantu sekelompok pejuang Maroko untuk membentuk Polisario, yang mengklaim Sahara Barat sebagai negara merdeka.

Setelah Spanyol meninggalkan Sahara, Polisario mendeklarasikan Sahara Barat sebagai negara merdeka, namun klaim ini tidak diakui oleh Raja Hassan II dan penduduk Maroko. Pada tanggal 16 Oktober 1975, International Court of Justice (ICJ) di Den Haag mengeluarkan keputusan yang tetap menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Keputusan ini mendorong Raja Hassan II untuk memerintahkan rakyat Maroko mengadakan Gerakan Hijau, sebuah demonstrasi massal yang dilakukan secara damai untuk membuktikan bahwa Sahara adalah bagian dari wilayah Maroko.

Saat ini, Maroko dan Polisario masih terlibat dalam pembicaraan di Komisi IV PBB mengenai status Sahara (Rahman, M. A , 2015).

F. Rangkuman

Pada tahun 1912, Perancis mendapatkan kontrol atas Maroko melalui Perjanjian Fez, mengukuhkan posisinya sebagai kolonisator utama di wilayah tersebut. Penandatanganan perjanjian ini memicu perlawanan, termasuk peristiwa Bar Bar, di mana suku-suku Berber menghadapi penjajah Perancis. Pada tahun 1950, Dekrit Bar Bar dikeluarkan oleh pemerintah Perancis, mencoba untuk membagi Maroko menjadi beberapa wilayah otonom untuk mengendalikan perlawanan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Namun, upaya ini tidak berhasil meredakan ketegangan dan aspirasi kemerdekaan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan perundingan politik, Maroko memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956. Masyarakat Maroko mendukung gerakan kemerdekaan negara melalui berbagai cara, termasuk gerakan nasionalis, mobilisasi masyarakat, perjuangan politis-politisi, perjuangan rakyat dan raja, perjuangan Aljazair, perjuangan Front Polisario, dan perjuangan pahlawan kemerdekaan. Kemerdekaan tersebut menandai akhir dari era kolonial Perancis di Maroko dan awal dari sebuah negara merdeka yang berdaulat.

G. Latihan

Kerjakan Latihan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Bagaimana Maroko Sebagai Negara Jajahan Perancis?
2. Bagaimana Perjanjian Fez 1912 Terjadi?
3. Apa Itu Peristiwa Bar-bar?
4. Bagaimana Proses Kemerdekaan Maroko?

H. Rujukan

Abderrahim Ouardighi, *LaGrande Crise Franco-Marocaine, 1952-1956* (Rabat: L’Imprimerie nouvelle, 1976), h. 14.

Adwitama Adnan, (2022), *Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power)*, Yogyakarta 55281, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bernard Botiveau. (1993). *Loi islamique et droit dans les sociétés arabes*. Paris : Karthala.

Bidwell, Morocco under Colonial Rule, h. 185.

Fitria, R. I. V. C. (2018). *Faktor-faktor Penerimaan Positif Maroko Terhadap Pengungsi Pasca Pengesahan Konstitusi 2011*. (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018). Diakses dari <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/10202/1/Ipik.pdf/>

Hanafi, Leila. (2020). *The Legal System of Morocco – An Overview*. Konrad-AdenauerStiftung e. V.

Julien, Le Maroc, h. 454 dan Stephen Bernard, *The Franco-Moroccan conflict, 1943-1956* (New Haven: Yale University Press, 1968), h. 318-337.

Jonathan Wyrzten, *Performing the Nation in Anti-Colonial Protest in Interwar Morocco*, Journal of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism 19 (4), 2013, h. 615-634.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat*. Retrieved from Daftar Duta Besar Indonesia untuk Maroko: <https://kemlu.go.id/rabat/id>.

Lahbabi, *LeGouvernement Marocain a l'aube du XXe Siècle*, h. 23.

Leveau, *Fellah Marocain*, h. 19-25.

Maksum, M. (2016). *Kedudukan Syariah sebagai sumber hukum positif: Kajian awal atas hukum perkawinan, ekonomi Islam, dan Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko*. Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram, 15(2), 281-295.

Moh. Nurhakim. (2004). *Sejarah dan Peradaban Islam*. Malang: Umm Pres. h.112.

Nur Azhar, (2011), *Sejarah Islam Di Maroko*, Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.

Rahman, M. A. (2015). *Resistensi Politik: Pergerakan Nasionalis Maroko Vis Á Vis Kolonial Perancis*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32889/1/M%20ARIEF%20RAHMAN-FAH.pdf>

Raphael Chijioke Njoke, *Culture and Costumes of Morocco* (USA:Greenwwod Press: 2006) hal.31.

Sahabat Maroko. (2010). *Sejarah Singkat Maroko*. <https://www.sahabatmaroko.com/read/2010/02/01/112/sejarah-singkat-maroko> Diakses pada tanggal 23 maret 2024.

Syahrani, A. (2013). ISLAM DI AFRIKA UTARA BAGIAN BARAT AL-MURABITHUN DAN AL-MUWAHHIDUN. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 1(01).

BAB 12
KOLONISASI DAN KEKUASAAN ITALIA DI AFRIKA TIMUR
TAHUN 1934-1943

A. Latar Belakang

Ethiopia adalah sebuah negara yang terletak di Benua Afrika dan mendapatkan julukan sebagai negara Tanduk Afrika. Negara ini seluruhnya terletak di garis lintang tropis dan relatif kompak dengan dimensi utara-selatan dan timur-barat yang serupa. Ibukotanya adalah Addis Ababa “Bunga Baru” yang terletak hampir di tengah negara sebagai pusatnya. Ethiopia adalah negara terbesar dan terpadat di Tanduk Afrika (Kresna et al., 2018). Dengan pemisahan diri Eritrea pada tahun 1993 sebagai bekas provinsi di Laut Merah, Ethiopia menjadi negara yang tidak memiliki daratan. Libya merupakan negara yang terletak di pusat Benua Afrika terutama di bagian wilayah utara (Indrawan, 2013). Sebelah wilayah utara dibatasi oleh laut, di bagian wilayah timur berbatasan dengan wilayah Mesir dan Sudan, di bagian selatan berbatasan dengan Chad dan Nigeria, dan bagian barat berbatasan dengan Aljazair dan Tunisia. Lokasi Libya sangat strategis karena dimasa lalu negara ini telah menjadi sasaran dari para penakluk Eropa. Terdapat beberapa bangsa yang ingin menaklukkan Negara Libya, yaitu Polinesia, Yunani, Romawi, dan Italia yang telah berhasil menduduki wilayah Libya terutama sepanjang pantai Timur Tengah. Italia menjadi negara Eropa yang terakhir menyerbu Libya dan datang pada Tahun 1911.

Eritrea merupakan negara kecil yang terletak di Afrika Timur dengan total panjang perbatasan 110 KM. Letaknya di bagian timur benua Afrika, berhadapan langsung dengan Laut Merah dan Teluk Aden (Mesfin, 2008). Kedua negara ini dulunya merupakan wilayah jajahan Eropa, tepatnya wilayah jajahan Italia yang kini menjadi Eritrea dan wilayah jajahan Perancis yang kini menjadi wilayah kedaulatan Djibouti. Kedua negara ini sama-sama terletak di kawasan Tanduk Afrika. Tanduk Afrika adalah subkawasan Afrika Timur yang membentang dari Eritrea di utara hingga Mozambik di selatan. Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya menjadi salah satu negara di Afrika yang kerap mendapat perhatian global karena gejolak yang terjadi di negaranya (Erlina, 2019). Gejolak di Ethiopia diartikan sebagai situasi yang tidak tenang, tidak menguntungkan, dan suasana terjadi kekeruhan kondisi sehingga tidak terkendali sesuai keinginan sebagai negara berdaulat. Gejolak ini memiliki konotasi

yang mengarah pada suasana kekacauan, pergolakan, dan kegelisahan atau pergulatan fisik yang tidak terkendali.

Pergolakan di Etiopia, Eritrea, dan Libya dapat dilihat sebagai kisah berkelanjutan yang dimulai sekitar masa ini dengan kolonialisme Eropa di benua Afrika (Kresna et al., 2018). Kolonialisme adalah dominasi langsung dan total atas negara lain berdasarkan kekuatan asing. Tujuan kolonialisme yang pertama adalah dominasi politik, sedangkan tujuan kedua adalah eksploitasi terhadap negara yang dijajah. Jika berbicara tentang kolonialisme di Afrika, ada fenomena yang terjadi antara tahun 1800 hingga 1960. Sebuah fenomena yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena ini adalah imperialisme dan faktanya kolonialisme adalah bentuk langsung dari imperialisme. Dapat diartikan bahwa semua kolonialisme adalah imperialisme, tetapi tidak semua imperialisme adalah kolonialisme. Terkait dengan pergolakan yang terjadi di Ethiopia, jika dicermati, pergolakan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi antara Ethiopia dengan bangsa Eropa yang saat itu sangat bercita-cita untuk menguasai kawasan Afrika (Ocheni & Nwankwo, 2012). Negara Eropa yang paling dominan adalah Italia, disusul beberapa negara Eropa lainnya yang menguasai wilayah sekitar Ethiopia, Eritrea, dan Libya.

Sebelum berlakunya kolonisasi Italia pada tahun 1885, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eritrea dikuasai oleh berbagai kekuatan lokal dan internasional yang lambat laun mendominasi wilayah Laut Merah. Pada tahun 1896, orang Italia menggunakan Eritrea sebagai batu loncatan dalam upaya mereka untuk menaklukkan Ethiopia (Pankhurst, 1999). Setelah Italia menyerah pada Perang Dunia II, Eritrea berada di bawah kekuasaan militer Inggris. Pada tahun 1952, resolusi PBB untuk menyatukan Eritrea dan Ethiopia mulai berlaku. Resolusi tersebut mengabaikan tuntutan kemerdekaan Eritrea, namun menjamin hak demokrasi dan otonomi bagi warga Eritrea. Namun, segera setelah ketentuan ini mulai berlaku, hak-hak ini mulai dibatasi atau dilanggar. Hal tersebut telah memberikan dampak yang besar bagi pergolakan di Ethiopia, Eritrea, dan Libya (Kresna et al., 2018). Dampak pergolakan tersebut muncul dalam bentuk krisis, perlawanan, dan sebagainya yang terjadi pada negara-negara yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

mengangkat dan mengkaji topik yang berkaitan dengan judul, yaitu “Kolonisasi dan Kekuasaan Italia di Afrika Timur Tahun 1934-1943”.

B. Koloni Italia di Wilayah Afrika

Dua koloni utama Italia di Afrika pada abad ke-20 adalah Libya saat ini (terdiri dari Libya Italia, Cyrenaica Italia, dan Tripolitania) dan Afrika Timur Italia (termasuk wilayah dengan nama yang sama, serta Eritrea Italia dan Etiopia Italia, Somalia, Italia). Dalam kasus Libya Italia, setelah perang singkat Italia-Turki melawan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1911, Italia menguasai Tripolitania dan Cyrenaica dan memperoleh pengakuan internasional berkat Perjanjian Lausanne Tahun 1923 (Pankhurst, 1999). Setelah “perdamaian” yang sulit dan berdarah pada tahun 1920-an, kedua wilayah tersebut disatukan dengan nama “Libya” pada tahun 1934. Pada tahun 1943, selama Perang Dunia II, Italia diusir bersama sekutu Jermanya dan kehilangan kendali atas wilayah tersebut, namun memperoleh kembali kemerdekaan setelah konflik berakhir pada tahun 1951.



Gambar 1. Peta negara yang menjajah Afrika

Sumber: <https://www.slideshare.net/AdrianaLA1/kolonialisme-bangsa-eropa-di-afrika>

Eritrea, sebaliknya, sudah menjadi bagian dari wilayah Afrika Timur Italia, namun menjadi koloni Italia pada tahun 1889 setelah Perjanjian Uchale (James, 1890) ditandatangani antara Ethiopia dan Italia. Setelah Perang Italia-Ethiopia Pertama (1895-1896) dan kekalahan telak Italia pada Pertempuran Adwa, yang pada saat itu dianggap oleh banyak orang sebagai

hilangnya kehormatan nasional, benih-benih balas dendam Italia disemai dan membuahkan hasil setelah Perang Italia-Etiopia Kedua. Perang Italia. Perang Etiopia: Perang Etiopia (1935-1936) berakhir dengan penaklukan Abyssinia. Mengenai wilayah Somalia, invasi Italia dimulai pada tahun 1890 dalam bentuk protektorat, yang mencakup wilayah Jubaland pada tahun 1920, dan diperkuat oleh pendudukan Somalia Inggris pada tahun 1940 (Wicaksana & Rachman, 2018). Wilayah-wilayah ini disatukan dengan nama "Afrika Timur Italia" (1936), dan termasuk Abyssinia (Ethiopia) yang ditaklukkan, dipertahankan, hingga dikalahkan.

C. Sejarah Pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Sejarah pergolakan yang terjadi di Etiopia, Eritrea, dan Libya sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi antara negara tersebut dengan pihak Eropa yang sebenarnya sedang berusaha menguasai kawasan Afrika saat itu. Salah satu negara terkuat di Eropa adalah Italia yang disusul beberapa negara Eropa lainnya yang menguasai wilayah sekitar Ethiopia, Eritrea, dan Libya.

1. Italia Dalam Perang Dunia I Di Afrika

Italia adalah sebuah negara di semenanjung Italia. Semenanjung Italia terletak di selatan Eropa, yang bentuknya seperti sepatu laras panjang. Di masa lalu, semenanjung ini adalah rumah bagi banyak negara. Namun, saat ini hampir seluruh semenanjung hanya dihuni oleh satu negara, yakni Italia. Dalam bahasa Italia, proses penyatuan dikenal dengan nama “Risorgimento” yang artinya “kebangkitan” (Zulham, 2016). Unifikasi atau penyatuan Italia adalah proses menyatukan dan menggabungkan banyak negara yang sebelumnya menduduki semenanjung Italia hingga akhirnya menjadi satu negara, Italia modern.

Italia melakukan proses unifikasi pada tahun 1870, namun belum menjadi negara pemimpin. Karena letak geografisnya, kekayaan alamnya dan terutama keberadaan tambangnya, Italia tidak mampu menandingi status perkembangan negara-negara Eropa kontinental karena lemahnya kapitalisme. Karena Italia bukanlah negara yang kuat, situasi politik luar negerinya tidak stabil, sehingga Italia berusaha membentuk aliansi atau aliansi dengan kekuatan-kekuatan Eropa Barat demi kepentingan Italia.

Melalui usahanya yakni memperoleh koloni di Afrika bagian utara dan timur. Italia dikalahkan oleh Ethiopia dalam Pertempuran Adua pada tahun 1896. Negarawan Tuscan Fernando Martini menggambarkan "imperialisme orang-orang yang dirampas" dalam bukunya tahun 1879, yaitu "Cose Africane atau Concerning Afrika" (Pankhurst, 1999). Dia mendukung kebijakan imigrasi ke koloni Italia. Dalam hal ini, koloni tidak mementingkan industri, keuangan, kebutuhan bahan mentah, atau bahkan pertahanan militer, tetapi mengatasi fenomena kelebihan penduduk di dalam negeri.



Gambar 2. Sekutu Italia dalam Perang Dunia I di Afrika

Sumber: <https://images.app.goo.gl/dvGenDSjRHWWhDNWg7>

Fenomena kelebihan populasi mendorong imigrasi yang cepat. Penduduknya cenderung bermigrasi ke Amerika Serikat. Jika fenomena migrasi ini terus berlanjut maka akan berdampak buruk bagi Italia baik secara politik maupun ekonomi. Bahkan, mereka yang bermigrasi akan mengalami perubahan peradaban, bahasa, dan gengsi Italia. Tak hanya itu, jumlah orang yang bermigrasi ke negara lain juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan keturunan Italia melupakan budaya, bahasa dan peradaban nenek moyangnya (Mesfin, 2008). Oleh karena itu, kelebihan populasi tersebut ditampung di beberapa koloni yang diawasi langsung oleh negara induknya. Dengan pendapatnya, Fernando Martini diangkat menjadi gubernur sipil Eritrea untuk Italia.

Sebelum pecahnya Perang Dunia I, Italia mempunyai wilayah jajahan di Afrika yaitu Libya, Eritrea, dan Somaliland. Luas total koloni ini kira-kira 700.000 mil persegi, enam kali luas kota besar. Dari ketiga wilayah jajahan tersebut, Libya mempunyai wilayah terluas, namun wilayah tersebut tidak subur (Sulistiowati, 2021). Pada tahun 1912, wilayah tersebut menjadi bagian dari Italia, yang memperluas koloninya hingga ke pedalaman pada tahun berikutnya. Ketika Italia memperluas wilayahnya, mereka berhadapan dengan Sa'id Idris, yang juga dikenal sebagai Sanusi, seorang pemimpin agama Muslim yang sangat menentang pemerintahan Italia sehingga Said Idris as Sanusi berjuang hingga tahun 1931.

Selama Perang Dunia I, Italia menerima undangan Inggris untuk bergabung dengan Sekutu. Ini merupakan langkah awal Italia untuk mempertahankan dan memperluas wilayahnya di Afrika. Pada tahun 1882 Italia bergabung dengan Triple Alliance (Sulistiowati, 2021). Namun selama perang, Italia mengambil sikap netral dan tidak memihak wilayah tengah. Artinya perjanjian rahasia yang ditandatangani antara Perancis dan Italia pada tahun 1902 mulai berlaku kembali. Pada tahun 1915, sebuah perjanjian rahasia antara Sekutu dan Italia ditandatangani di London. Perjanjian rahasia tersebut menyatakan bahwa ``Jika Italia ikut perang dan memihak Sekutu, maka Italia akan menerima bantuan, yaitu dana, dan dijanjikan wilayah tambahan, yaitu Afrika, Austria, dan Turki.

Pada tahun 1915, Italia menyerukan perang melawan Austria, yang dimenangkan Italia. Namun ketentuan perjanjian rahasia antara Sekutu dan Italia tidak terpenuhi. Pada tahun 1919, Italia diberi wilayah kecil, berbeda dengan Perancis yang diberi oasis Ghadames dan Ghats. Inggris membebaskan Italia dan menguasai Oasis Kufra dan sekitarnya yang menjadi pusat pergerakan Sanusi. Sayangnya Italia meminta wilayah antara Libya dan Danau Chad, namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan akan merugikan Perancis karena akan mempengaruhi hubungannya dengan Afrika Barat, Perancis dan Afrika Equatorial Perancis. Setelah Perang Dunia I, Italia sangat kecewa dengan keputusan perdamaian tersebut, karena sebagian besar harapan Italia untuk menguasai wilayah di benua Afrika yang merupakan bekas jajahan Jerman tidak

terpenuhi dan tidak dapat memperoleh wilayah tambahan di Asia Kecil (Njoo, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Perang Dunia I, Italia merupakan satu-satunya negara imperialis yang secara serius berupaya memperluas jangkauannya di Afrika, tetapi Italia gagal.

2. Ekspansi Italia di Afrika, yaitu Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Ambisi untuk melakukan ekspansi kembali datang dari kaum Fasis yang menguasai Italia. Benito Mussolini atau lebih dikenal sebagai Mussonlini, adalah seorang pemimpin politik Italia yang merupakan diktator fasis Italia dari tahun 1925 hingga 1945 (ARYANI, 2010). Mussolini, seorang sosialis revolusioner, memulai gerakan fasis paramiliter pada tahun 1919 dan menjadi perdana menteri pada tahun 1922. Mussolini berupaya memulihkan status Kekaisaran Romawi kuno. Oleh karena itu, agar nasib Italia tidak menyerupai “tawanan Mediterania”, Italia harus menguasai Mediterania. Untuk mewujudkan keinginannya menguasai Mediterania, Italia harus menghadapi banyak negara seperti Albania, Inggris Raya, Prancis, Spanyol, dan Turki, serta upaya Mussolini untuk mencari sekutu.

Berikut prestasi-prestasi pada masa pemerintahan Mussolini yang berkaitan langsung dengan kebijakan imperialis. Pertama, merebut posisi sentral pasukan Sanusi, yaitu Oasis Kufra. Ia kemudian memerintah Ethiopia pada tahun 1936 dan menobatkan Raja Italia Victor Emmanuel III menjadi Kaisar Ethiopia. Ketiga, Albania dipersatukan dengan Italia, suatu kesatuan pribadi yang kemudian dilayani oleh Raja Victor Emmanuel III. Ia dilantik sebagai Raja Albania dan memberikan pemerintahan Mussolini kendali atas Laut Adriatik (ARYANI, 2010).



Gambar 3. Perang Italia di wilayah Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Sumber: <https://images.app.goo.gl/uW3L1JF6yLpqUCwa8>

Pada tahun 1935, Italia menguasai Ethiopia yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Haile Selassie I. Haile Selassie I digantikan oleh Permaisuri Zauditu pada tahun 1930 (Pankhurst, 1999). Sebelum menjadi kaisar, Haile Selassie menjabat sebagai penasihat utama Zayditu, Mankubumi, dan ahli warisnya. Pada masa ini, Haile Selassie terlibat dalam pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta program pengiriman anak-anak Ethiopia untuk belajar ke luar negeri, hingga Haile Selassie I berhasil mendapatkan akses dan mendirikan negara Ethiopia pada tahun 1923. Ia juga mempunyai pengaruh yang besar dalam administrasi nasional termasuk manajemen. Ia bergabung dengan organisasi internasional dan berhasil menghapuskan perbudakan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 1902, Ethiopia berjanji kepada Inggris bahwa tidak ada negara yang akan menggunakan air Danau Tana. Danau Tana berperan penting bagi Inggris karena salah satu sumber airnya adalah Sungai Nil Biru yang digunakan untuk mengairi perkebunan kapas di Sudan. Pada tahun 1906 perjanjian yang mengikat ditandatangani antara Inggris Raya, Perancis dan Italia (Sulistiowati, 2021). Perjanjian tersebut menyatakan bahwa "tidak ada negara yang boleh bertindak melawan Ethiopia tanpa persetujuan dan sepengetahuan negara lain".

Sekutu dan Italia menandatangani perjanjian rahasia pada tahun 1915. Namun pada tahun 1919, pelaksanaan perjanjian rahasia tersebut tidak terpenuhi, khususnya bagi Italia, terutama mengenai persoalan peningkatan wilayah Afrika. Italia menuntut

kompensasi dari Ethiopia untuk mengungkapkan kekecewaannya. Italia kemudian menandatangani perjanjian persahabatan dengan Ethiopia pada tahun 1928 (Pankhurst, 1999). Perjanjian tersebut mencakup pembangunan ekonomi dan perluasan Ethiopia dan Eritrea. Hal ini dicapai dengan membangun jalan raya yang membentang dari Dessi, ibu kota negara bagian Wollo di Etiopia, hingga kota Assab di Eritrea di pantai Laut Merah. Perjanjian persahabatan ini memungkinkan Italia untuk menyerang pertahanan alami Ethiopia yang hanya berupa wilayah gurun.

Pada tahun 1934, Haile Selassie I memodernisasi negara dan memperkuat militernya. Langkah Haile Selassie ini merupakan respons terhadap upaya memperluas sistem pertahanan Italia di wilayah Somalia dan Eritrea, yang memicu kemarahan di Italia atas serangan tersebut (Mesfin, 2008). Sejumlah insiden juga terjadi tahun ini, termasuk bentrokan antara Warwai dan pasukan patroli di wilayah perbatasan. Ketika Italia mengirim pasukan ke kawasan Afrika, Ethiopia melaporkan hal tersebut ke PBB. Namun, lembaga nasional tersebut belum menyelidiki keseluruhan masalah yang muncul antara Italia dan Ethiopia. Perancis dan Italia menandatangani perjanjian di Roma pada Januari 1935. Kedua negara takut terhadap Jerman, yang saat itu sangat maju secara politik dan merupakan ancaman bagi kemerdekaan Austria.

Mussolini beralih ke Prancis, yang diterima dengan baik dan Perjanjian Mussolini-Laval ditandatangani. Perjanjian Laval Mussolini: (1) Jika situasi di Austria terancam serius, kedua belah pihak akan berkonsultasi. (2) Prancis memberi Libya tambahan 45.000 mm wilayah dan beberapa warga Somalia Prancis untuk berintegrasi dengan Eritrea, dan memberi Italia akses ke sebagian Sahara dan Teluk Aden. (3) Italia dapat melakukan investasi dalam bentuk saham dalam pembangunan jalur kereta api Perancis antara Addis Ababa dan Djibouti. (4) mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara kedua negara di Tunisia, memperoleh hak membangun lembaga pendidikan dan hak kewarganegaraan khusus bagi penduduk Italia (Watt, 1971).

Berdasarkan perjanjian rahasia, Italia akhirnya diizinkan beroperasi di Ethiopia. Ethiopia akan digunakan sebagai sumber bahan mentah untuk memperkaya Italia,

sumber pangan bagi Italia, dan sumber tenaga kerja bagi Italia Fasis. Jika kita melihat isi Perjanjian Laval yang diusung Mussolini, kita dapat melihat bahwa hal tersebut memberikan manfaat yang besar bagi Italia (ARYANI, 2010). Hal ini karena Perjanjian Laval Mussolini memasukkan klausul yang ``memberikan kebebasan bertindak kepada Ethiopia," dan resonansi dari klausul ini dianggap sangat penting. Antara tahun 1936 dan 1942, Ethiopia kehilangan kemerdekaannya. Victor Emmanuel III adalah Kaisar Etiopia. Pada tahun 1936, Afrika Timur Italia dibentuk, termasuk wilayah Ethiopia, Eritrea, Italia, dan Somalia (Watt, 1971). Militerisasi Afrika Timur Italia kemudian dilakukan dengan aksi lanjutan penaklukan Somalia Prancis, Sudan, Kenya, dan Uganda.

Italia telah mengembangkan "rencana enam tahun" untuk mengeksploitasi kekayaan alam Ethiopia. Selain mineral, Italia juga mengharapkan produk pangan seperti kapas, wol, dan gandum. Italia berencana menggunakan bahan tambang seperti besi dan batu bara untuk membangun pabrik baja, rel kereta api, meriam, dan senjata api. Namun, rencana hanyalah sebuah rencana. Hasil yang diharapkan belum tercapai selama hampir satu setengah tahun karena sanksi dari organisasi negara dan terus berlanjutnya gerakan perlawanan rakyat Ethiopia (Sulistiowati, 2021). Selain itu, karena kurangnya modal di Italia, banyak bahan mentah yang ditambang tidak dapat dikembangkan sesuai rencana semula.

Setelah Italia menaklukkan Ethiopia, terjadi perubahan kebijakan luar negeri. Italia mengubah arah dari Sekutu dan menuju Jerman. Hal ini karena Jerman tidak ikut serta dalam sanksi negara terhadap Italia dan karena Jerman mengakui Italia karena kekuasaannya di Ethiopia. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hubungan Ethiopia, Eritrea, dan Libya dengan Barat mempengaruhi apa yang melatarbelakangi terjadinya kerusuhan di Ethiopia, Eritrea, dan Libya, antara lain:

1. Pembagian wilayah Afrika secara sepihak oleh Eropa pada Konferensi Berlin Kedua. Kongres Berlin Kedua (1885) merupakan konferensi pertama yang membahas isu-isu mengenai Afrika. Konferensi ini dihadiri oleh seluruh negara di benua Eropa kecuali Swiss, Balkan, dan Amerika Serikat. Konferensi tersebut

diakhiri dengan pembagian benua Afrika secara sepihak oleh Eropa. Konferensi Berlin pada akhirnya menghasilkan penetapan batas wilayah hingga berakhirnya masa kolonial.

2. Perluasan wilayah jajahan negara-negara Eropa pada masa penjajahan menimbulkan kerusuhan fisik dan peperangan, serta menimbulkan manuver politik antar negara-negara Eropa dengan tujuan berbeda.
3. Perjanjian kekuasaan dibuat, disengketakan atau tidak, untuk mencapai kesepakatan di antara negara-negara Eropa mengenai batas-batas wilayah kolonial dan pengaruhnya di Afrika. Dan hal ini menimbulkan konflik terbuka setelah bangsa Eropa meninggalkan benua Afrika.
4. Mengingat ketidakpastian seputar batas-batas wilayah setelah penarikan orang-orang Eropa dari Afrika, khususnya Ethiopia dan wilayah sekitarnya, para pemimpin regional ingin memperluas wilayah mereka melalui sengketa wilayah dan penggunaan kekuatan, yang dapat menyebabkan ketidakamanan (Ocheni & Nwankwo, 2012).

B. Proses Pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya

1. Masa Kolonisasi di Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Pada tahun 1875, sekitar 10,8% wilayah Afrika berada di bawah pengaruh Barat. Saat itu, wilayah Afrika seluas 1,25 juta meter persegi dimiliki oleh Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris. Inggris memiliki sebagian besar wilayah Afrika. Ketertarikan Barat terhadap Afrika meningkat ketika S. M. Stanley, seorang penjelajah terkemuka, menemukan kekayaan keindahan alam Afrika (Riyadi, 2016). Berkat pengalaman para penjelajah tersebut, negara-negara Barat menjadi tertarik untuk memperoleh tanah dan memperluas wilayahnya. Alasan terjadinya perebutan Afrika adalah karena Afrika memiliki potensi perdagangan yang besar, penting untuk memenuhi kebutuhan industri, penduduk di kawasan Afrika dapat digunakan sebagai kekuatan tempur, merupakan basis strategis untuk perang, dan Hal ini karena ruang angkasa memiliki kemungkinan. Digunakan sebagai tempat pemukiman kembali atau evakuasi. Tahun 1885-1900 merupakan masa ekspansi paling kuat bagi negara-negara Eropa (Erlina, 2019). Pada saat ini pula, Eropa Barat menunjukkan bahwa mereka akan mendominasi

dunia. Pada awal tahun 1876, 10,8% wilayah Afrika berada di bawah kendali Barat, namun pada tahun 1900 proporsi ini melonjak hingga hampir 90,4%. Artinya luas wilayahnya telah meningkat sekitar 79,6% dalam seperempat abad.

Konferensi Berlin tahun 1885 merupakan konferensi pertama yang membahas masalah-masalah Barat mengenai Afrika. Negara-negara peserta konferensi ini antara lain Swiss, Balkan, dan hampir seluruh negara Eropa kecuali Amerika Serikat (Watt, 1971). Pada konferensi ini, nasib kapal-kapal Kongo yang berlayar di dalam dan sekitar Sungai Niger serta masalah perbudakan diputuskan. Setelah konferensi tersebut, pembagian benua Afrika oleh negara-negara Eropa dimulai. Persaingan antara negara-negara ini tidak bisa dihindari dan bahkan seringkali berujung pada krisis, namun krisis tersebut tidak pernah berujung pada perang. Perjanjian atau kesepakatan internasional dibuat untuk mengatasi masalah ini. Pada tahun 1890, perjanjian Inggris-Jerman ditandatangani dengan tujuan memenangkan persaingan di Afrika Timur. Pada tahun 1898, Perjanjian Inggris-Prancis ditandatangani, dan masalah Fashoda dibahas di sana (Sulistiowati, 2021). Terjadi kesepakatan antara Inggris Raya, Italia, dan Portugal untuk menentukan batas wilayah masing-masing.



Gambar 4. Ilustrasi Masa Kolonisasi Italia di Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Sumber: <https://images.app.goo.gl/geHZdo9JoKr3izkJ8>

Perjanjian antara Inggris, Italia, dan Portugal menjadikan Ethiopia sebagai negara yang terkurung daratan. Italia berhasil menguasai Eritrea, dan negara-negara Eropa membagi wilayah pesisir Somalia berdasarkan ketentuan yang menjamin jalur laut untuk perdagangan Ethiopia (Sulistiowati, 2021). Ethiopia kehilangan kedaulatan atas beberapa wilayah pesisir dan sebagian wilayah Eritrea. Hal ini membawa keuntungan khusus bagi Etiopia: pengakuan kemerdekaan Etiopia dan perluasan Etiopia untuk mengusir penjajah asing. Ketika era Italia berakhir, kedaulatan Ethiopia dikembalikan ke Haile Selassie I pada tahun 1941 (ARYANI, 2010). Namun, Inggris terus menguasai sebagian Somalia selatan selama beberapa tahun hingga Inggris mengembalikan kekuasaan ke Ethiopia dan memulihkan masalah perbatasan sesuai dengan pengaturan yang telah disepakati sebelumnya.

C. Masa Pergolakan di Ethiopia, Eritrea, dan Libya

Sebuah catatan sejarah Afrika yang penuh dengan sengketa perbatasan dan pemberontakan separatis. Organisation of African Unity (OAU) seringkali tidak mampu menemukan solusi (Wicaksana & Rachman, 2018). Beberapa negara asing mencakup seluruh angkatan bersenjata dan kelompok penasihat militer, sementara negara lain mempertaruhkan kemerdekaannya. Transisi yang mudah menuju kelompok masyarakat pascakolonial mandiri yang dapat berkembang secara mandiri. Hal ini dianggap mustahil dilakukan di negara-negara berkembang di Afrika. Mengingat banyaknya permasalahan struktural dan warisan budaya masa pra-kolonial dan kolonial, sungguh mengejutkan bahwa perdamaian sudah ada sejak proses pembentukan negara modern dimulai dan mulai berkembang pada tahun 1950-an (Riyadi, 2016). Sejak itu, peperangan dan pertempuran terus berlanjut.

Situasi ini selaras dengan situasi di Eropa dan Asia yang masih didominasi oleh kegigihan nasionalis yang kemudian berujung pada konflik. Salah satu negara yang memberikan contoh nyata adalah Ethiopia. Etiopia mungkin merupakan gejala penyakit yang umum, namun mungkin merupakan kondisi yang luar biasa karena Etiopia adalah negara merdeka dan bukan koloni Eropa (Kresna et al., 2018). Namun, karakter Etiopia yang luar biasa dilemahkan oleh fakta bahwa sebagian besar

perbatasan Etiopia tercipta akibat pengepungan imperialis. Kaisar Menelik menerima wilayah Ogaden di Somalia berdasarkan perjanjian partisi dengan Italia dan Inggris Raya. Ini adalah tindakan kolonial, dan jika aturan yang sama diterapkan pada koloni, Ethiopia juga harus menjalani dekolonisasi. Diperkirakan tidak akan ada perdamaian di kawasan sebelum dekolonisasi.



Gambar 5. Peta Masa Pergolakan Ethiopia Dan Eritrea

Sumber: <https://images.app.goo.gl/vpwKHu3mPgoGuPFp8>

Intervensi asing terkadang disebut-sebut sebagai alasan penting mengapa konflik-konflik yang terjadi saat ini belum terselesaikan melalui penyerahan kedaulatan Afrika atau penyatuan kedaulatan melalui sebuah federasi. Tidak ada keraguan bahwa hal ini memang terjadi, dan hingga tahun 1976 intervensi asing dalam bentuk bantuan militer dari Amerika Serikat atau bantuan dari Uni Soviet dan Kuba mendukung aneksasi Ethiopia (Zulham, 2016). Faktanya, jika negara-negara Afrika yang bersangkutan mampu melakukan hal tersebut, intervensi asing tidak akan mampu mencegah

penyesuaian bertahap perbatasan yang diwarisi dari kolonialisme. Salah satu bentuk kerusuhan yang menimpa Ethiopia, Eritrea, dan Libya adalah konflik Ogaden. Konflik yang pecah pada bulan Juni 1977 di Ogaden antara Ethiopia dan Somalia meningkat menjadi perang (Erlina, 2019). Ethiopia mampu mengakhiri perang dengan bantuan militer dari Uni Soviet dan Kuba. Namun konflik terus berlanjut, Somalia memperebutkan wilayah Ogaden, dan gerakan Front Pembebasan Somalia Barat juga terus memperebutkan wilayah.

D. Dampak dari Kolonisasi dan Kekuasaan Italia di Negara Ethiopia, Eritrea, Dan Libya

1. Dampak Kolonisasi Italia di Libya

Sejarah penjajahan Italia di Libya dimulai pada masa perang Italia dengan Turki pada tahun 1911. Pada saat itu, wilayah Libya terdiri dari tiga wilayah, Tripolitania, Fezzan, dan Cyrenaica, yang merupakan bagian dari provinsi Kekaisaran Ottoman di Afrika Utara (Grigoriadis & Kassem, 2021). Ada dua aliran nasionalisme imperial yang kontradiktif di wilayah ini. Pada tanggal 2 Oktober 1911, pasukan Italia mendarat di pelabuhan Tripoli dan membombardir benteng di sekitar kota. Perang berlanjut hingga Perjanjian Ussi tahun 1912 dan pecahnya Perang Balkan Pertama, yang memaksa Turki Utsmaniyah mundur dari perang dan membiarkan penduduk ketiga wilayah tersebut berjuang sendirian mencari tempat tinggal.

Italia menggabungkan ketiga wilayah tersebut menjadi satu unit administratif dan menamainya Libya. Istilah ini berasal dari nama provinsi Romawi kuno, yang dimaksudkan untuk mengasosiasikan Kekaisaran Italia dengan kejayaan nasionalnya. Dari segi geografis, tujuan Benito Mussolini adalah menjadikan Tripolitania sebagai wilayah pesisir keempat di Italia (Nasution, 2022). Dari segi ideologi, imperialisme ini diharapkan mampu menghancurkan pemerintahan dan sistem sosial Islam yang telah mapan selama berabad-abad dan menggantikannya dengan budaya Kristen yang tidak sejalan dengan Islam. Ini adalah kesalahan fatal Italia, yang memicu pemberontakan selama seperempat abad dan pertempuran berdarah antara Italia dan Libya.



Gambar 6. Perlawanan Libya kepada invansi Italia

Sumber: <https://images.app.goo.gl/kJMWaoYKvY5FbJxs6>

Untuk menekan pemberontakan dan pertempuran, Italia melakukan berbagai kejahatan, setelah itu Libya menuntut reparasi. Hal ini termasuk (1) genosida atau pembunuhan berencana terhadap ribuan warga Libya karena kelalaian medis yang disengaja, pembunuhan dan kematian baik dalam peperangan perkotaan maupun di kamp konsentrasi, (2) musnahnya nyawa manusia baik secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, (3) musnahnya lingkungan hidup akibat peletakan ranjau darat yang mengancam kehidupan masyarakat Libya khususnya pada masa Perang Dunia II, (4) Penghapusan paksa dan penghancuran moral maupun budaya dengan membagi warga Libya menjadi "pengkhianat Libya" (mendukung Italia) dan "warga Libya sebenarnya" (Watt, 1971). Hal ini menghancurkan landasan psikologis, moral dan budaya masyarakat Libya. Dengan cara tersebut, Italia akhirnya berhasil menguasai seluruh Libya pada tahun 1932.

Selama pemerintahannya di Libya, Italia menjajah negara tersebut secara demografis. Pendekatan Mussolini terhadap kebijakan kependudukan terinspirasi oleh teori Corradi Gini, seorang ilmuwan Italia yang terkenal atas kontribusinya pada demografi dan genetika (ARYANI, 2010). Gini menolak gagasan bahwa perkawinan silang menghasilkan varietas yang kurang produktif dan berkualitas rendah. Menurutya, bukti sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, berbagai ras selalu bersatu dan bercampur dengan ras-ras yang dekaden dan vital untuk melahirkan ras-ras baru dengan generasi biologis. Kolonisasi Libya akan fokus pada sektor pertanian, karena struktur lahan Libya adalah surga bagi para petani. Pada tahun 1938, rencana ini diwujudkan melalui emigrasi massal 20.000 petani Italia ke Libya di bawah arahan langsung Gubernur Libya Italo Balbo.

Rangkaian rencana ini gagal setelah terjadinya penjajahan, terutama setelah Perang Dunia II. Beberapa tahun sebelum pecahnya perang, Italia kehilangan kendali de facto atas beberapa koloninya di Afrika, khususnya Libya. Tripolitania dan Cyrenaica berhasil ditaklukkan oleh Administrasi Militer Inggris (BMA), dan Fezzane diduduki oleh pasukan Perancis Merdeka pada tahun 1943 (Riyadi, 2016). Pasal 23 Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1947 secara resmi memisahkan ketiga wilayah ini dari Italia, dan nasib masa depan mereka ditentukan berdasarkan hasil Perang Dunia II. Libya akhirnya mencapai kemerdekaan penuh pada bulan Desember 1951 sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB yang menetapkan pembebasannya pada tanggal 1 Januari 1952.

Berakhirnya penjajahan Italia tidak berarti pengaruh dan kekuasaan Italia hilang sama sekali. Italia secara aktif menjalankan proyek pertanian yang mengharuskan petani Italia untuk terus menggarap lahan pertanian Libya (Riyadi, 2016). Proyek ini diawasi oleh Institut Nasional untuk Jaminan Sosial Italia, sebuah badan paranasional, dan dilaksanakan dengan tujuan menghentikan gerakan pemberontak para penggembala Libya dan petani Italia, yang telah menyebabkan emigrasi massal ke luar negeri. Namun, proyek tersebut gagal dan pihak berwenang Italia memutuskan untuk menjual tanah tersebut kepada penduduk setempat dan kembali

ke tanah air mereka. Pada tahun 1961, hampir 70% lahan pertanian petani Italia dijual (Ocheni & Nwankwo, 2012). Pada tahun 1964, masih ada 120 petani Italia di Libya.

2. Krisis Ethiopia

Terjadi konflik antara Etiopia dan Eritrea yang berujung pada krisis di Etiopia. Dengan janji untuk menyelesaikan konflik, Hailemariam Desalegn melanjutkan upayanya untuk menormalisasi hubungan dengan Eritrea (Riyadi, 2016). Namun hubungan diplomatik antara Ethiopia dan Eritrea mengalami pasang surut selama dekade terakhir, dan kurangnya dukungan dari pemerintah yang berkuasa membuat penyelesaian konflik menjadi sulit. Hal ini didukung oleh perubahan cara pandang di kalangan masyarakat Ethiopia dan Eritrea, yang meyakini bahwa konflik yang terjadi saat ini bukan hanya sebatas sengketa perbatasan, namun merupakan upaya untuk melindungi reputasi kedua negara (Berouk, 2008). Dampaknya, Ethiopia mengisolasi Eritrea dari berbagai kancah internasional, dan peluang perdamaian kedua negara pun semakin berkurang.

Hal ini berimplikasi pada munculnya krisis politik akibat reformasi politik dan ekonomi. Ethiopia mengalami kekeringan berkepanjangan, yang berpuncak pada kelaparan yang tak terelakkan. Krisis politik yang telah lama tidak terselesaikan dan menyebabkan ratusan orang tewas dan terus memburuk, melemahkan pemerintahan yang berkuasa (Riyadi, 2016). Akibatnya, Hiemariam Desalegn terpaksa melepaskan kendali pemerintahan.

E. Rangkuman

Italia memiliki kerajaan kolonial di Libya dan Afrika Timur, seperti Ethiopia bahkan Eritrea pada paruh pertama abad ke-20. Meskipun lebih dari separuh dari mereka mempunyai sikap menghormati kehidupan masyarakat adat dan manfaat peradaban yang diberikan oleh pemerintah kolonial, tetapi hampir seperempatnya mempunyai sikap yang menunjukkan kejahatan dari kekuasaan mereka. Pendominasian terhadap kehidupan masyarakat adat dan penanaman peradaban dari pemerintah kolonial memiliki dominasi yang sangat merugikan

masyarakat lokal Libya, Ethiopia, dan Eritrea khususnya di Afrika Timur. Secara keseluruhan, terutama sejak tahun 1930-an dan seterusnya, gambaran eksotisme muncul, memperkuat gagasan bangsa Italia sebagai sebuah kerajaan baru yang bertujuan untuk menampilkan dirinya kepada dunia dalam bentuk kolonisasi dan perluasan wilayah yang berorientasi pada pertanian maupun ekonomi.

F. Latihan

Kerjakanlah latihan berikut ini!

1. Bagaimanakah Koloni Italia di wilayah Afrika?
2. Bagaimanakah sejarah pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya?
3. Bagaimanakah proses pergolakan di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya?
4. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari kolonisasi dan kekuasaan Italia di Negara Ethiopia, Eritrea, dan Libya?

G. Rujukan

- ARYANI, R. (2010). *Fasisme Italia 1922-1944*. UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- Berouk, M. (2008). Situation Report The Eritrea-Djibouti border dispute. *Institute for Security Studies Situation Report*, 1–19.
- Erlina, M. (2019). KONFLIK DI KAWASAN TANDUK AFRIKA: ERITREA DAN ETHIOPIA TETANGGA YANG SULIT AKUR Meri. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1).
- Grigoriadis, T. N., & Kassem, W. (2021). The Regional Origins of the Libyan Conflict. *Middle East Policy*, 28(2). <https://doi.org/10.1111/mepo.12560>
- Indrawan, J. (2013). Legalitas dan Motivasi NATO Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(2).
- James, W. (1890). TREATY OF WUCHALE UMBERTO. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1(1).
- Kresna, M., Hakam, S., Fuady, H., & Erwiza. (2018). Ringkasan Hasil Penelitian: Pertumbuhan Dan Pembangunan Di Sub-Sahara Afrika: Pengalaman Ethiopia. *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2).
- Mesfin, B. (2008). *The Eritrea-Djibouti border dispute*. Institute for Security Studies : Situation

Report 2.

- Nasution, A. E. M. (2022). *ANALISIS FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KERJASAMA MIGRASI ITALIA DAN LIBYA TAHUN 2017*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Njoo, F. (2008). Peranan Adolf Hitler Dalam Perang Dunia Ii 1939-1945. In *PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH*. UNIVERSITAS SANATA DHARMA.
- Ocheni, S., & Nwankwo, B. C. (2012). Analysis of colonialism and its impact in Africa. *Cross-Cultural Communication*, 8(3).
- Pankhurst, R. (1999). Italian Fascist War Crimes in Ethiopia: A History of Their Discussion, from the League of Nations to the United Nations (1936-1949). *Northeast African Studies*, 6(1).
- Riyadi. (2016). Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern. In *Unesa Press*. Unesa Press.
- Sulistiowati, I. (2021). Gejolak Politik Dan Ekonomi Afrika Pasca Perang Dunia II. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 17(1).
- Watt, D. C. (1971). Document: The Secret Laval-Mussolini Agreement of 1935 on Ethiopia. *The Origins of the Second World War*, 15.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Bentuk dan Sistem Negara. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(1).
- Zulham. (2016). Reintegrasi Etno-Nasionalisme Separatis Pada Nasionalisem Indonesia Raya: Studi Etni-Nasionalisme Aceh Pasca Damai. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 2(2).

BAB 13

KEMERDEKAAN NEGARA- NEGARA MERDEKA LAINNYA KEKUASAAN JERMAN, SPANYOL, DAN PORTUGAS DI AFRIKA

A. Latar Belakang

Awal mula penjajahan Eropa di Afrika dimulai pada abad ke-15 oleh Portugis. Ketika penaklukan Konstantinopel oleh Turki Ottoman pada tahun 1453 menutup jalur perdagangan antara dunia Barat dan Timur, menyebabkan orang-orang Eropa bersaing untuk mendapatkan wilayah yang kaya sumber daya. Daya tarik Afrika sangat terlihat jelas bagi orang Eropa dan penjajah lainnya. Sebab Afrika merupakan benua yang kaya akan sumber daya alam. Menurut para ahli, kawasan Afrika dan Sudan khususnya, memiliki seperempat cadangan emas dunia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika bangsa Eropa sangat berambisi untuk melakukan eksploitasi dan menguasai kawasan Afrika demi kepentingannya sendiri maupun kepentingan bersama (Sulistiowati, 2021). Pelopor penjelajahan Afrika adalah bangsa Portugis yaitu Bartolomeuz Diaz dan kemudian Vasco da Gama. Pada tahun 1415, Portugis berhasil menaklukkan Ceuta, sebuah pelabuhan di Afrika Utara, karena ingin menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Dan setelah Perjanjian Tordesilas, seluruh kawasan Afrika berhak dikuasai hanya oleh Portugal, sehingga Spanyol tidak mempunyai kebebasan untuk menerapkan kebijakannya di kawasan Afrika. Portugis memperoleh kekuasaan yang semakin besar di Afrika dan mendirikan koloni-koloni yang cukup besar selama 75 tahun. Namun, pada abad ke-17, Portugis terpaksa meninggalkan Afrika karena tekanan kedatangan negara-negara Eropa lainnya (Sulistiowati, 2021). Hampir seluruh Afrika menjadi tujuan orang Eropa. Karena menyimpan potensi industrialisasi Eropa yang maju pada abad ke-19 dan mendorong bangsa Eropa mendominasi kawasan Afrika sehingga menimbulkan persaingan dan konflik di berbagai kawasan Afrika (Riyadi, 2016).

Afrika selatan menjadi sasaran Jerman karena letaknya yang strategis untuk kepentingan industry, yaitu pangsa pasar dan kekayaan alam yang melimpah. Jerman juga ingin memperluas wilayahnya dan membangun kekaisaran global di Afrika Selatan. Jerman menyebarkan propaganda untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Afrikaner, namun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketegangan politik di Afrika Selatan selama Perang Dunia II. Kondisi Afrika Selatan sendiri mengalami perang antar ras saat politik Apartheid dijalankan. Diskriminasi rasial di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam Undang-undang, dengan demikian rakyat

kulit hitam menolak klaim kulit putih bahwa kodrat orang kulit putih mempunyai keunggulan dan hak untuk memimpin dan untuk menyatakan penolakan itu tentu keluar dari lingkup gereja yang dikuasai golongan kulit putih untuk membangun gereja yang merdeka. Bangsa Barat juga menyatakan menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat semua orang, dan tidak setuju dengan diskriminasi rasial dan politik Apartheid di Afrika selatan. (DIPOYUDO, n.d.).

B. Kekuasaan Bangsa Jerman di Afrika

Jerman datang ke Afrika pada abad ke 19. Pada 1871 Jerman mengalami penyatuan, isu koloni mulai menyibukkan masyarakat dan kepemimpinan Jerman, dan berbagai kelompok lobi memberikan tekanan pada pemerintah untuk proaktif dalam akuisisi koloni di Afrika, dengan alasan bahwa Jerman memerlukan koloni untuk mempertahankan wilayahnya termasuk keunggulan ekonomi. Karena dimasa itu, banyak Negara Eropa sudah memiliki koloni di Afrika dan Asia. Sehingga kepemilikan koloni dianggap penting untuk mendapat akses ke sumber daya alam dan pasar baru. Kelompok lobi terkemuka, yang dibentuk setelah penyatuan, termasuk Masyarakat Kolonisasi dan Ekspor Jerman Barat pada 1881, kelompok ini didirikan oleh pengusaha dan pedagang yang ingin memperluas perdagangan Jerman ke luar negeri dan melihat koloni sebagai pasar baru untuk produk Jerman dan sumber bahan baku yang murah, dan Asosiasi Pusat Geografi Komersial dan Promosi Kepentingan Jerman di Luar Negeri pada 1878, kelompok ini didirikan oleh para geographer, ilmuwan, dan politisi yang ingin mempromosikan eksplorasi dan perdagangan Jerman di luar negeri dan percaya bahwa koloni akan membantu untuk mencapai statusnya sebagai kekuatan dunia. Namun, Pemerintah enggan menyetujui pandangan mereka dan menganut gagasan kolonisasi, seperti Kanselir Otto von Bismarck yang khawatir koloni akan menjadi beban keuangan dan militer bagi Jerman dan menyebabkan konflik dengan Negara lain (Smith, 1974).

Pada tahun 1884, di bawah kepemimpinan Kanselir Otto von Bismarck, Jerman akhirnya mendirikan koloni pertamanya di Afrika barat daya, sekarang Namibia, dan mulai menjajah kawasan Afrika. Pada masa penjajahan Jerman, timbul konflik antara Jerman dengan suku asli, khususnya suku Namaqua. Di bawah kepemimpinan pemimpin suku Hendrik Witbooi, suku Namaqua melakukan perlawanan sengit terhadap penduduk Jerman, namun perlawanan Namaqua gagal. Pada tahun 1894 Hendrik Witbooi harus menandatangani perjanjian kekalahan dengan Jerman. Artinya perjanjian tersebut tetap memberikan izin kepada suku Namaqua untuk memiliki senjata, dan Witbooi dibebaskan setelah memberikan jaminan bahwa dia akan melanjutkan

pemberontakan Hottentot. Juga pada tahun 1894, Theodor Leutwein diangkat menjadi gubernur Jerman di Afrika Barat Daya, dengan demikian menerapkan prinsip kolonialisme tak berdarah. Namun usahanya gagal. Hingga tercapainya kesepakatan protektorat yang menjamin stabilitas, semangat pemberontakan tetap hidup. Resimen elit Jerman dikerahkan dan tidak ada perdamaian yang terjalin antara penjajah dan penduduk setempat. Meskipun demikian, Namibia adalah satu-satunya koloni Jerman yang cocok untuk kolonisasi kulit putih (Pratignyo et al., 2022).

Kebijakan Kolonial Jerman di Afrika

Kebijakan koloni Jerman beremigrasi dan mencoba membangun tanah air baru. Afrika Barat Daya menjadi contoh sempurna kolonialisme rasialisme kolonialisme Jerman. Pemerintah Jerman mendukung penjajahan kulit putih hingga menguasai tanah air dan memperkenalkan kerja paksa yang serupa dengan perbudakan. Gubernur Theodor Leutwein dituduh menerapkan kebijakan non-kekerasan dan tidak menyukai pertumpahan darah. Akhirnya ia digantikan oleh jenderal yang sangat kejam, Lothar von Trotha. Pada tahun 1904, kerusuhan lokal menyebabkan Perang Herero dan Namaqua, yang sebelumnya von Trotha memberikan ultimatum kepada tentara Herero untuk mencabut kewarganegaraan mereka dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan daerah tersebut atau dibunuh. Pasukan Herero mundur ke wilayah Omaheke, di mana tidak ada persediaan air di Gurun Kalahari bagian barat dan banyak yang mati kehausan. Pasukan Jerman diperintahkan untuk menembak semua pria dewasa Herero, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri ke daerah terdekat di bawah kekuasaan Inggris. Peristiwa ini dikenal sebagai Genosida Herero dan Namaqua (Pratignyo et al., 2022).

Jerman menerapkan sistem hierarki ras yang ketat yang menyebabkan diskriminasi dan penindasan budaya di Afrika. Dalam Perang Dunia I, Afrika Selatan melancarkan serangan militer dan menduduki Namibia dengan dasar perjanjian perwalian Dewan Liga Bangsa-Bangsa. pada 1946, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) bubar dan digantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintahan Afrika Selatan memasukkan Namibia kedalam wilayahnya namun secara tidak resmi dan ditetapkan menjadi provinsi kelima Afrika Selatan dengan politik Apartheid. Selain itu, Jerman juga membangun jalan dan rel kereta api yang bertujuan untuk administrasi kolonial dan eksploitasi ekonomi pada masa jajahannya (DIPOYUDO, n.d.).

C. Kekuasaan Spanyol di Afrika

Jalur penjajahan Spanyol di benua Afrika dimulai melalui Kepulauan Canary hingga Maroko. Wilayah Maroko ini merupakan wilayah penjajahan Spanyol terpenting di Afrika. Selain

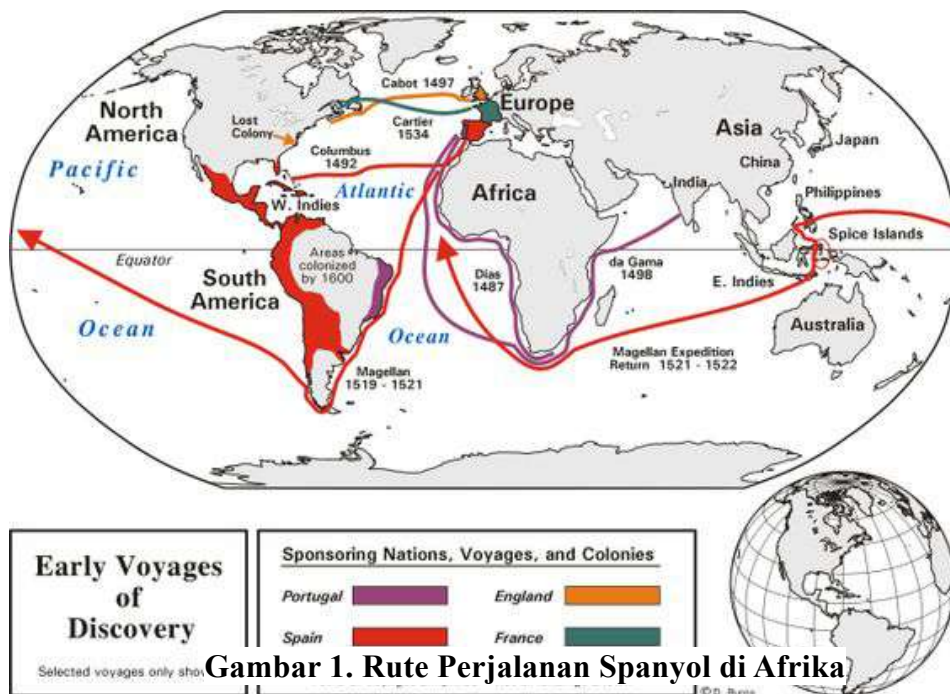
melintasi Kepulauan Maroko, bangsa Spanyol menjelajahi Samudera Afrika melalui wilayah sepanjang Samudera Atlantik, sepanjang jalur Benua Amerika - Samudera Pasifik - Indonesia - Samudera Hindia - Tanjung Harapan - kembali ke Spanyol. Penjelajahan lautan dilakukan oleh Magellan pada tahun 1519–1521 dan oleh Loaisa pada tahun 1526–, hanya berakhir di Filipina. Kolonisasi Spanyol di benua Afrika tidak terlalu signifikan, hal ini dapat dikaitkan dengan Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Perjanjian Tordesillas dilatarbelakangi oleh konflik antara Portugal dan Spanyol mengenai penguasaan wilayah di "Dunia Baru" menyusul penjelajahan lautan oleh Portugal dan Spanyol. Untuk mengatasi masalah ini, Paus Alexander VI mengeluarkan dekret. sebuah “keputusan kepausan.” Isinya tentang pembagian dunia di luar benua Eropa menjadi dua bagian, yaitu bagian barat untuk Portugal dan bagian timur untuk Spanyol (Wari, 2020).

Wilayah Afrika yang dikuasai Spanyol adalah Ifni, Rio de Oro, Ginea dan Maroko. Sebagai negara Eropa yang hampir merokok, Spanyol menjajah Maroko dengan intensitas yang lebih besar karena seringnya terjadi bentrokan antar negara Barat. Maka pada tahun 1094, Perancis dan Spanyol mengadakan perjanjian rahasia yang membagi zona merokok menjadi dua zona, yaitu flu Perancis dan flu Spanyol. Perancis menguasai hampir seluruh Meksiko dan Spanyol menguasai sebagian kecil wilayah barat daya Sahara Spanyol. Namun pendudukan Spanyol di wilayah Sahara menuai kecaman luas dari masyarakat internasional. Spanyol, yang menguasai wilayah tersebut sejak tahun 1912, menarik diri pada tahun 1976. Selain Sahara Spanyol dalam perjanjian tersebut Fes (1912) Spanyol juga menaklukkan wilayah sekitar Melilla dan Ceuta. Pada tahun 1920, Komisaris Jenderal Spanyol Damaso Berenguer memutuskan untuk menaklukkan wilayah timur suku Jebala, namun hal yang dilakukannya kurang efektif (Darsiti, 2012).

Penerapan imperialisme kuno di Spanyol mengacu pada tiga elemen utama: Gold, Glory, dan Gospel. Untuk mencapai tujuannya, Spanyol menyatukan negara-negara pribumi di bawah satu pemerintahan dan satu keyakinan agama, yaitu keyakinan Kristen. Untuk mencapai tujuan ini, banyak gereja didirikan di koloni untuk mengubah penduduk asli menjadi Katolik. Selain itu, para ulama secara intensif melatih beberapa kelompok yang terdiri dari penduduk asli untuk mengajari mereka perilaku dan budaya Eropa yang patut mereka tiru. Selain itu, Spanyol juga membangun infrastruktur perekonomian yang memadai di wilayah jajahannya, sehingga

menjadikan wilayah jajahan Spanyol termasuk salah satu wilayah yang paling maju saat itu dibandingkan wilayah jajahan lainnya di benua Afrika (Sulistiowati, 2021).

Pada tahun 1860, setelah Perang Tetouan, Maroko menyerahkan Sidi Ifni ke Spanyol, yang terbagi antara Prancis dan Spanyol pada tahun 1911. Karena ketidakmampuan militernya, tentara Spanyol akhirnya memberontak pada tahun 1921. Pemberontakan ini merupakan ancaman bagi posisi Spanyol, namun masih dapat direbut kembali. Pada tahun 1956 Perancis mengakui kemerdekaan Maroko. Selanjutnya Sultan Mohammed V melakukan perundingan dengan pemerintah Spanyol yang menghasilkan pengembalian sisawilayah Maroko yang masih dikuasai Spanyol kepada pemerintah Maroko. Akhirnya, dengan dihapuskannya pemerintahan internasional di Tangier di bawah tekanan masyarakat internasional, Maroko akhirnya menjadi negara yang bersatu dan merdeka sepenuhnya, dan Spanyol akhirnya menyerahkan Maroko kepada Sidi Ifni. Begitu pula pada tahun 1959 Spanyol harus membebaskan koloni Spanyol di Guinea, yang diperlakukan sama seperti provinsi Spanyol lainnya. Di bawah tekanan kelompok nasionalis Guinea dan PBB, Spanyol akhirnya menyerah, pada bulan Maret 1968. Setelah kemerdekaan, Guinea mempunyai pendapatan tertinggi dibandingkan negara Afrika lainnya yang baru saja merdeka (Sulistiowati, 2021).



<https://i.pinimg.com/564x/fd/99/c2/fd99c2eba43eb137f14da776faad687d.jpg>

Kebijakan Kolonial Spanyol di Afrika

Beberapa kebijakan Spanyol di Afrika yaitu :

1. Pemerintah Spanyol telah membeli sejumlah besar lahan pertanian yang kaya akan sumber daya alam. Mengingat perubahan iklim dan volatilitas pasar dunia, Spanyol ingin memastikan akses terhadap sumber pangan yang stabil dan pada saat yang sama mendapatkan keuntungan dari sektor pertanian yang menguntungkan negara lain.
2. Memanfaatkan dan memodernisasi pertambangan dan pelabuhan. Pelabuhan tersebut digunakan untuk mengekspor sumber daya mineral Afrika dan mengimpor produk industri dari Spanyol, sejak perusahaan Spanyol TCB Group menandatangani kontrak untuk pembangunan dan konstruksinya pada tahun 2019, melayani terminal peti kemas di pelabuhan Tanger Med di Maroko.
3. Spanyol setuju untuk menyerahkan wilayah Sahara Barat kepada Maroko di hadapan pengadilan internasional. Hal ini jelas disambut baik oleh masyarakat Maroko, namun tidak oleh Front Polisario yang mengkritik perubahan kebijakan Spanyol sebagai sebuah pengkhianatan.
4. Mengembangkan infrastruktur perekonomian yang memadai di wilayah tersebut sehingga wilayah jajahan Spanyol termasuk wilayah termaju saat itu, seperti jalan, pelabuhan, pertambangan, dan perkebunan. Namun perkembangan ini tidak merata di seluruh koloni dan menimbulkan dampak yang kompleks.
5. Spanyol secara lepas tangan menyerahkan 2/3 wilayah Sahara Barat ke tangan Maroko, sedangkan 1/3 dari Sahara Barat dilepaskan ke Mauritania, dari timur ke selatan. Karena kedua bagian ini hanya mengacu pada Madrid accord kedua negara ini pun lanjutkan tindakan nya untuk menguasai daerah Sahara Barat sesuai dengan pembagian di dalam Madrid accord Marokok menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar dan menerobos masuk ke dalam wilayah Sahara Barat, dan Mauritania juga menempatkan militernya masuk ke Sahara Barat, tindakan ini juga didorong oleh adanya gerakan dari Polisario yang mendeklarasikan dirinya sebagai republik demokratik Arab Sahrawi (RDAS kedua negara ini ingin mengamankan wilayah Teritori mereka masing masing sekaligus wilayah mereka di Sahara Barat.

(Hadiyanto, 2016)

Selama Perang Dunia Pertama, Spanyol tetap netral, namun ikut serta dalam beberapa pertempuran di Afrika, antara lain Pertempuran Annual dan Perang Rif, dimana masyarakat

Afrika melakukan perlawanan terhadap negara imperialis Spanyol yaitu Maroko yang hampir seluruh penduduknya menganut Islam. dan menolak Islam. . mempunyai pengaruh terhadap agama non-Muslim yang didirikan Spanyol di Maroko. Perlawanan bangsa Maroko sendiri dipimpin oleh Amir Abdul Karim, seorang pahlawan Rif yang sangat terkenal pada tahun 1921-1926, yang mempertahankan kemerdekaan dan jati dirinya serta berhasil mengalahkan pasukan Spanyol yang di beberapa daerah disebut sebagai pertempuran Annual tahun 1921, namun akhirnya dikalahkan oleh pasukan Spanyol dan Perancis dengan menggunakan senjata kimia, yang disebut Perang Rif. Perang Dunia Pertama melemahkan kekuatan Spanyol di Afrika (Darsiti, 2012).

Selama Perang Dunia II, Spanyol tetap netral tetapi memberikan bantuan kepada Nazi Jerman dan Italia. Spanyol akhirnya ikut serta dalam Pertempuran Sidi Ifni yang dikalahkan oleh pasukan Prancis, dan dalam Pertempuran Ceuta. Kekuasaan Spanyol mengalami kemunduran pada akhir abad ke-19 akibat melemahnya kekuasaan Spanyol dan hilangnya banyak wilayah jajahan di Afrika akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Koloni Spanyol terakhir di Afrika, wilayah Guinea Ekuatorial, memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968 (Darsiti, 2012).

D. Kekuasaan Portugis di Afrika

Portugis mulai menjelajahi pantai Afrika pada abad ke-15. Pada tahun 1415 mereka menaklukkan Ceuta, sebuah kota di Maroko utara yang menandai dimulainya kolonialisme Eropa di Afrika. Kekuasaan Portugis di Afrika berlangsung selama beberapa abad, dimulai dengan pendudukan Portugis di Afrika Selatan pada abad ke-15 dan berakhir dengan pembebasan negara-negara Afrika pada abad ke-20. Perubahan politik di Portugal pada tahun 1974 yang dikenal dengan Revolusi Bunga memperkuat penegakan demokrasi dan memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada koloni Portugis (Atma Jaya, 2009).

Penaklukan Portugal yang paling penting pada saat itu adalah penaklukan Angola pada tahun 1482, yang mencakup wilayah sekitar 500.000 mil persegi, diikuti oleh Mozambik pada tahun 1505, yang mencakup wilayah seluas 300.000 mil persegi. Jika keduanya digabungkan dan dijumlahkan dengan luas Guinea, maka luasnya sama dengan luas Eropa Barat. Selama lima abad, Portugal berhasil memperluas pengaruhnya di koloni-koloninya di Afrika, dan sementara negara-negara Eropa yang memiliki koloni di Afrika pada tahun 1menjalankan kebijakan imperialis modern, hingga akhir Perang Dunia II, politik Portugis masih menggunakan sistem lama yang benar-benar unik: arus muncul Pada tahunia datang ke Portugal untuk memperbarui sistem politik koloninya.

Salah satu alasan Portugal mempertahankan wilayahnya di wilayah Angola adalah karena Portugis mampu menguasai jalur perdagangan budak dan emas. Pada abad ke-19 hanya terdapat 1.832 orang kulit putih di wilayah tersebut (Hadiyanto, 2019).

Meningkatnya jumlah orang Portugis di wilayah Angola tidak dibarengi dengan membaiknya kontrol administratif oleh pemerintah kolonial, dan akibatnya banyak terjadi konflik di wilayah tersebut yang meskipun dipahami, dapat mengancam posisi pemerintah kolonial. Selain itu, jumlah penduduk kulit putih yang sedikit karena tidak memiliki sistem kekebalan yang sama dengan penduduk asli sehingga mudah terkena penyakit tropis (Riyadi, 2016: 81).

Pada awal abad ke-16, Portugis terlibat dalam perdagangan budak di Afrika. Pada tahun 1550-an, kapal-kapal Portugis membawa budak dari Afrika ke seluruh belahan dunia; Afrika sendiri merupakan pemasok budak di Mesir kuno dan Roma (Berkin Carol, 2013). Pada tahun-tahun awal perdagangan budak transatlantik, Portugis membeli budak Afrika selama perang suku. Ketika permintaan akan budak meningkat, Portugis mulai bergerak lebih jauh ke Afrika untuk mengambil tawanan secara paksa. Setelah ditangkap, orang-orang Afrika yang diculik itu dibawa ke pantai sejauh 300 mil dengan rantai di pergelangan kaki mereka dan barisan tahanan diikat dengan tali di leher mereka. Oleh karena itu, diperkirakan 10 hingga 15 persen narapidana meninggal dalam perjalanan menuju pantai. Sebelum perdagangan budak Afrika dimulai pada tahun, Portugis menggunakan orang India sebagai budak di bidang pertanian dan pertambangan (Indah Mutia Rahma, 2023).

Pada awal abad ke-17, Portugal mendapat tekanan dari negara lain seperti Belanda dan Inggris, yang menyebabkan ketidakstabilan kekuasaan Portugis di Afrika. Belanda mendirikan koloni di São Tomé dan Príncipe pada tahun 1599 dan di Angola pada tahun 1641 dan pada saat yang sama menguasai perdagangan rempah-rempah di Afrika Timur. Demikian pula Inggris menduduki beberapa wilayah Portugis di Afrika Barat, seperti wilayah Gold Coast pada tahun 1662 dan Gambia pada tahun 1664. Persaingan komersial antara Belanda, Inggris, dan Portugis semakin ketat hingga Portugis sulit bersaing dalam persaingan harga dan kualitas. Diproduksi pada tahun oleh Belanda dan Inggris. Pada abad ke-20, Revolusi Bunga yang terjadi di Lisbon pada tanggal 25 April 1974 merupakan kudeta yang menggantikan pemerintahan yang sebelumnya berbentuk kediktatoran. Ketika Revolusi Bunga pecah, Portugal membebaskan wilayah jajahannya di Asia dan Afrika, seperti Timor Timur, yang akhirnya memperoleh kemerdekaan. Oleh karena

itu, kedatangan pemerintahan baru Portugis membawa perubahan dalam konstelasi politik Timor (Mahendra et al., 2022).

Kebijakan Koloni Portugis di Afrika

Dalam melaksanakan kolonialisme, Portugis menggunakan sistem politik kolonial yang berdasarkan persamaan ras dengan perbedaan budaya, yang umumnya disebut politik patrimonial, khususnya di bidang pendidikan. Dan dalam menerapkan prinsip ini, Portugis termasuk negara kolonial yang paling meremehkan politik rasial. Namun kebijakan kolonial yang tidak mengakui diskriminasi rasial hanya merupakan cerminan dari sistem yang ada di Portugal. Di bawah Dr. Pada masa kediktatoran Salazar, pemerintahan pada tahun bersifat otokratis dengan sentralisasi ketat yang tidak memungkinkan pemikiran demokratis di daerah jajahan. Setelah pemerintahan otokratis Salazar, penerapan undang-undangnya gagal dan sebagian besar tidak berubah (Nurlaila, 2019).

Dengan menerapkan kebijakan warisan budaya, Portugis berharap dapat menciptakan kelompok elit di antara penduduk asli. Kebijakan-kebijakan ini berdampak pada penduduk Afrika dan pada akhirnya menunjukkan bahwa sejumlah besar pemukim tidak memiliki hak-hak sipil dan secara brutal dan kejam dipaksa bekerja untuk pemerintah dan koloni kulit putih. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki sertifikat petani no. dan jika mereka tidak memiliki sertifikat ini maka mereka harus mencari pekerjaan. Pemerintah kolonial Portugis di Afrika melakukan diskriminasi budaya terhadap masyarakat adat. Diskriminasi budaya terlihat jelas dalam aturan bahwa semua perempuan berpakaian tradisional harus duduk di kelas tiga di kereta, sementara penduduk setempat yang berpakaian dan berperilaku seperti orang Portugis diperbolehkan bepergian dengan kereta api. Kegiatan mahal, biaya masuk ke hotel dan restoran, dan orang Afrika dapat menonton pertunjukan di bioskop setelah menunjukkan kartu asimilasi (Darsiti, 2012).

Dampak Koloni Portugis di Afrika

Pengaruh koloni Portugis di Afrika terhadap bidang ekonomi, agama dan pendidikan. Dalam bidang perekonomian, segala kegiatan perekonomian hanya dapat dilakukan atas nama raja, sehingga mereka kehilangan prakarsa dalam bidang perekonomian dan juga menjadi bangsawan yang sangat komersial, sehingga menggunakan cara-cara feodal untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Semula penduduk asli menganut agama yang menyembah berhala dan patung, namun pada tahun, dengan kedatangan bangsa Portugis, mereka mengganti berhala yang disembah

penduduk asli dengan agama Kristen. Saat itu pendidikan penduduk pribumi masih sangat pas-pasan, sehingga Portugis memanfaatkannya dan mengandalkan landasan agama Kristen. Masyarakat adat mendapat pendidikan di gereja-gereja dimana gereja berperan sangat aktif. dalam menjaga kepatuhan penduduk asli dengan mengajarkan keterampilan dasar Eropa seperti membaca, menulis dan berhitung. Selain itu, para ulama juga tak lupa menularkan dogma-dogma iman Kristen agar masyarakat adat tetap patuh dan disiplin kepada penguasa. Namun proses akulturasi tersebut mengakibatkan penduduk pribumi tidak mempunyai keterampilan yang sama dengan masyarakat kulit putih, sehingga menjadikan penduduk pribumi tidak mampu berpikir, terbuka dan aktif. Dengan kata lain, hal tersebut dapat mengakibatkan karakter masyarakat adat tetap inferior (Darsiti, 1969).

Pada abad ke-20, sebagian besar koloni Portugal di Afrika memperoleh kemerdekaan setelah bertahun-tahun perang kemerdekaan. Mozambik, Angola, Guinea-Bissau dan Kepulauan Cape Verde adalah beberapa contoh koloni yang memperoleh kemerdekaan dari Portugal. Namun jejak kekayaan budaya dan sejarah Portugis masih terlihat di beberapa negara Afrika yang pernah menjadi jajahannya (Nurlaila, 2019).

E. Gerakan Kemerdekaan Negara-Negara Kolonial di Afrika

Proses dekolonisasi di Afrika terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika negara-negara terjajah menuntut hak kemerdekaan dari pemerintahan kolonial, yang terjadi antara tahun 1945 dan 1975, dan banyak negara Afrika memperoleh kemerdekaan dari negara-negara jajahan Eropa. Pada akhir tahun 1975, meskipun permasalahan kolonial masih berlanjut di Afrika (Rachman, 1974).

1. Kenya

Kemerdekaan Kenya menantang pemerintahan kolonial Inggris, dan Pemberontakan Mau-Mau tahun 1952 berlangsung selama tujuh tahun dan berhasil ditindas oleh pemerintah Inggris, yang menimbulkan tekanan internasional untuk kemerdekaan Kenya. Dengan juru bicara Jomo Kenyatta, Kenya memperoleh kemerdekaan pada 12 Desember 1963, dan Jomo Kenyatta menjadi Perdana Menteri pertama.

2. Tanganyika

Kemerdekaan Tanganyika dalam menentang pemerintahan kolonial Jerman dengan tokoh Yulis Nyrere seorang pemimpin Tanganyika African National Union (TANU) untuk menyuarakan kemerdekaan penuh dari Inggris. Akhirnya pada Mei 1961 Tanganyika mendapatkan hak untuk mengatur pemerintahan dan pada desember 1961 Tanganyika resmi merdeka.

3. Kamerun

Bangsa Portugis memberi nama Kamerun dengan Rio Dos Camaoes. Kamerun adalah protektorat Jerman sebelum Perang Dunia I, tetapi setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, Kamerun diserahkan kepada Inggris Raya dan Prancis, yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (LBB). Kamerun diperintah oleh Prancis, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, dan memperoleh kemerdekaan di bawah pemerintahan Inggris pada tahun 1961. Setelah konstitusi diterbitkan pada tahun 1972, Kamerun diintegrasikan ke dalam Republik Persatuan Kamerun dengan Presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan.

4. Republik Somalia

Republik Somalia terletak di Tanduk Afrika dan dikendalikan secara terpisah oleh Inggris dan Italia. Warga Somalia Britania mulai memperjuangkan kemerdekaannya dan merdeka pada Juni 1960, sebulan setelah Somalia berada di bawah kekuasaan kolonial Italia dan keduanya bersatu membentuk Republik Somalia. Republik ini menganut sistem demokrasi parlementer hingga tahun 1969, ketika presiden dibunuh dan pemerintahan diambil alih oleh militer.

5. Angola

Portugis adalah orang pertama yang mencapai Angola di bawah pimpinan Diago Cao. Pada saat yang sama, Inggris memperluas wilayahnya dan ingin menguasai Angola hingga Inggris setuju untuk menguasai wilayah perbatasan. Setelah Perang Dunia II, Portugis mengubah status hukum tanah jajahan menjadi Provinsi Sebrang Laut dan memberikan kemerdekaan pada 1975.

6. Mozambik

Mozambik pernah menjadi jajahan Portugis karena terdapat budaya Portugis yang kuat di sana. Pada tahun 1964, sebuah kelompok pemberontak bernama Frelimo (Front Pembebasan Mozambik) lahir untuk memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya, setelah kekacauan di pemerintahan Portugis, Mozambik resmi merdeka pada bulan Juni 1975, dengan Samora Machel menjadi presiden pertama dari tokoh Frelimo.

(Riyadi, 2016)

Setelah memperjuangkan kemerdekaan melawan kekuatan kolonial di Afrika. Namun karena negara Afrika sejak awal terdiri dari berbagai suku, ras, dan etnis, berbagai permasalahan seperti masalah persatuan nasional masih terus bermunculan hingga berujung pada perebutan kekuasaan dan perang saudara yang biasa terjadi di Afrika. Terlebih lagi, Afrika dipandang sebagai benua yang penuh kerusuhan. Perekonomian Afrika pada awalnya makmur dan stabil setelah melepaskan

diri dari kekuasaan kolonial. Namun adapihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga terlihat dari korupsi bantuan luar negeri dalam jumlah besar sehingga menimbulkan kemiskinan di berbagai belahan Afrika (Riyadi, 2016).

F. Rangkuman

Jerman datang ke Afrika pada abad ke 19. Jerman menerapkan sistem hierarki ras yang ketat yang menyebabkan diskriminasi dan penindasan budaya di Afrika. Dalam Perang Dunia I, Afrika Selatan melancarkan serangan militer dan menduduki Namibia dengan dasar perjanjian perwalian Dewan Liga Bangsa-Bangsa. pada 1946, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) bubar dan digantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Spanyol telah membeli sejumlah besar lahan pertanian yang kaya akan sumber daya alam. Mengingat perubahan iklim dan volatilitas pasar dunia, Spanyol ingin memastikan akses terhadap sumber pangan yang stabil dan pada saat yang sama mendapatkan keuntungan dari sektor pertanian yang menguntungkan negara lain. Dengan menerapkan kebijakan warisan budaya, Portugis berharap dapat menciptakan kelompok elit di antara penduduk asli. Kebijakan-kebijakan ini berdampak pada penduduk Afrika dan pada akhirnya menunjukkan bahwa sejumlah besar pemukim tidak memiliki hak-hak sipil dan secara brutal dan kejam dipaksa bekerja untuk pemerintah dan koloni kulit putih. Setelah memperjuangkan kemerdekaan melawan kekuatan kolonial di Afrika. Namun karena negara Afrika sejak awal terdiri dari berbagai suku, ras, dan etnis, berbagai permasalahan seperti masalah persatuan nasional masih terus bermunculan hingga berujung pada perebutan kekuasaan dan perang saudara yang biasa terjadi di Afrika.

G. Latihan

Kerjakanlah latihan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Bagaimana Kekuasaan Bangsa Jerman di Afrika?
2. Bagaimana Kekuasaan Bangsa Spanyol di Afrika?
3. Bagaimana Kekuasaan Bangsa Portugal di Afrika?
4. Bagaimana Gerakan Kemerdekaan Negara-Negara Kolonial di Afrika?

H. Rujukan

Atma Jaya. (2009). Uma Fukun Timor Lorosa' : Parliament Building República Democrática de

- Timor Lest. *Yogyakarta University*, 1–16.
- Berkin Carol, D. (2013). *Making America A History Of United States Brief Fifth Edition. Boston: Wadsworth.*
- Darsiti, S. (1969). *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Moderen: Jilid 1. Yogyakarta.*
- Darsiti, S. (2012). *SEJARAH AFRIKA. Yogyakarta: Ombak.*
- DIPOYUDO, K. (n.d.). *MASALAH RASIAL DI AFRIKA SELATAN* (hal. 125–145).
<https://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/download/70/50/85>
- Hadiyanto. (2019). Kolonisasi Terhadap Masyarakat Kulit Hitam. *Jurnal Humanika*, 19(01), 25–27.
- Hadiyanto, . (2016). Representasi Kolonisasi Terhadap Masyarakat Kulit Hitam Afrika Dalam Novel *Things Fall Apart* Karya Chinua Achebe. *Humanika*, 19(1), 20.
<https://doi.org/10.14710/humanika.19.1.20-34>
- Indah Mutia Rahma. (2023). *PERBUDAKAN DI AFRIKA TENGAH PADA MASA KOLONIAL PERANCIS DI TAHUN 1881-1914. Skripsi*, 1–67. [http://digilib.unila.ac.id/76585/3/3.SKRIPTSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/76585/3/3.SKRIPTSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)
- Mahendra, M. A., Rusadi, E. Y., & Dzakiruddin, M. (2022). Kemerdekaan Timor Portugis sebagai The New World Order Portugal. *Jurnal Al Ma’Arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(1), 21–28.
- Nurlaila, A. (2019). Kolonialisme Spanyol dan Portugal di Afrika. *Universitas Siliwangi.*
- Pratigny, W. E., Sjahril, S., Karnida, A. M., Hadiman, A., Ariastuti, D., Upiastirin, A., & Beslit, C. (2022). *Indonesia-Namibia.*
- Rachman, A. (1974). *AFRIKA BERGOLAK TERUS. Journals.csis.or.id.*
<http://journals.csis.or.id/index.php/analisis/article/download/244/467>
- Riyadi. (2016). *Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern. In Unesa Press (Nomor Riyadi. (2016). Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern. Unesa Press, 128+vii.).*
- Smith, W. D. (1974). The Ideology of German Colonialism, 1840-1906. *The Journal of Modern History*, 46(4).
- Sulistiowati, I. (2021). *PASCA PERANG DUNIA II AFRICAN ECONOMIC AND POLITICAL SYMPTOMS POST WORLD WAR II. 17(1).*
- Wari, N. P. (2020). Ekspansi Dan Imperialisme Barat Kenegeri Negeeri Islam Hingga Jatuhnya Khalifah Utsmani Turki. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 54–63.

BIODATA PENULIS



Bahtiar Afwan lahir di Simpang Pematang, pada 28 Maret 1994. Lulus dari SDN 02 Simpang Pematang (2006), SMPN 1 Simpang Pematang (2009), SMA Al-Kautsar Bandar Lampung (2012), Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung (2017), dan Magister Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (2020). Pernah bekerja sebagai tenaga pengajar di SMPN 35 Bandar Lampung (2017), tenaga pengajar SMA Ar-Raihan Bandar Lampung (2021), Dosen tetap S1 Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro (2021-2025). Sejak 2025 telah menjadi dosen tetap di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung.

Beberapa karya buku yang telah diterbitkan, yaitu Biografi Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2000-2021 (2021); Panduan pembelajaran Berbasis PJBL & PBL tema sejarah lokal & cagar budaya untuk kurikulum merdeka (2023); Metro dalam dua dasawarsa (2024); Buku Cergam Petualangan Adelia ke cagar budaya (2024); Sebagai Editor buku Sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga abad pertengahan (2024).



Sumargono lahir di Jakarta pada tanggal 08 Januari 1988. Ia menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 2 Pule, SMP Negeri 1 Wonogiri, SMA Negeri 1 Wonogiri. Penulis merupakan alumnus S1 Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010, lulus S2 Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2014, dan menyelesaikan S3 Pendidikan Universitas Lampung pada tahun 2025. Saat ini mengabdikan diri di Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung sejak tahun 2018, yang sebelumnya pernah mengajar di SMA Warga Surakarta, SMK Farma Sains Nasional Surakarta, SMA Negeri 2 Surakarta, dan SMA Negeri 1 Surakarta.

Sebagai pengajar, karya buku yang sudah pernah dibuat adalah Buku Pengayaan Sejarah untuk SMA (2017); buku sejarah lokal yang berjudul 'Grebeg Sudiro.

SINOPSIS

Buku ajar ini membahas tinjauan historis mengenai sejarah kehidupan penduduk di Afrika mulai dari masa pra sejarah sampai pasca Perang Dingin, serta munculnya negara-negara merdeka di wilayah Afrika hingga abad ke-20.

Materi yang disajikan dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Afrika berkembang dari masa-masa awal peradaban Afrika, pengaruh kolonialisme, hingga proses dekolonisasi dan munculnya negara-negara merdeka di wilayah Afrika.

